



# LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

2020



# KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja KKP Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini menguraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, dan prestasi serta penghargaan yang telah diraih sepanjang tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum, capaian kinerja KKP tahun 2020 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2020 sektor kelautan dan perikanan mengalami tantangan yang luar biasa di tengah perlambatan perekonomian dunia dan risiko ketidakpastian yang cukup tinggi akibat pandemi Covid-19. Namun demikian seluruh jajaran KKP tetap optimis dan berupaya untuk dapat meraih kinerja yang lebih baik melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk percepatan



pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan pasca pandemi.

Kami menyadari penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja ke depan. Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan peran strategis seluruh jajaran KKP semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban KKP dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 22 Februari 2021  
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	ix
Ringkasan .....	xi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Maksud dan Tujuan .....	2
Tugas dan Fungsi KKP .....	3
Sumber Daya Manusia KKP .....	4
Jumlah Pegawai .....	4
Potensi .....	7
Permasalahan dan Tantangan .....	8
Lingkungan Strategis .....	10
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja .....	13
<b>BAB 2. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan .....	17
Tujuan .....	17
Sasaran Strategis .....	17
Penetapan Kinerja .....	18
Program Pengelolaan Ruang Laut .....	21
Program Pengelolaan Ruang Laut .....	23
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap .....	23
Program Penguatan Daya Saing Produk KP .....	23
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya .....	23
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	24
Program Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	24



Program Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .....	24
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP .....	25
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP .....	25
<b>BAB 3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	<b>27</b>
STAKEHOLDER PERSPECTIVE .....	29
Nilai Tukar Nelayan (NTN) .....	33
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) .....	34
Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) .....	36
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) .....	37
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE .....	61
Produksi Perikanan Tangkap .....	84
Produksi Perikanan Budidaya .....	87
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE .....	102
<b>KINERJA ANGGARAN .....</b>	<b>115</b>
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	121
<b>PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
<b>Lampiran 1. Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2020 .....</b>	<b>127</b>
<b>Lampiran 2. Penghargaan .....</b>	<b>130</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	22
Tabel 2	CAPAIAN IKU KKP TAHUN 2020	28
Tabel 3	CAPAIAN IKMKP TAHUN 2020	30
Tabel 4	CAPAIAN NTN TAHUN 2020	34
Tabel 5	CAPAIAN NTPI TAHUN 2020	36
Tabel 6	CAPAIAN NTPG TAHUN 2020	37
Tabel 7	CAPAIAN NTPHP TAHUN 2020	38
Tabel 8	CAPAIAN KINERJA JUMLAH KELOMPOK PELAKU UTAMA/PELAKU USAHA YANG MENINGKAT KELASNYA (KELOMPOK)	40
Tabel 9	CAPAIAN SATMINKAL PENYULUHAN TELAH BERHASIL MENINGKATKAN KELAS KELOMPOK KP	41
Tabel 10	REALISASI PERTUMBUHAN PDB PERIKANAN	42
Tabel 11	PERBANDINGAN PERTUMBUHAN PDB PERIKANAN TAHUN 2020 TERHADAP PDB NASIONAL PDB PERTANIAN, KEUTANAN DAN PERIKANAN	43
Tabel 12	NILAI PDB PERIKANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN DAN BERLAKU TAHUN 2020	44
Tabel 13	PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA NILAI EKSPOR HASIL PERIKANAN	45
Tabel 14	VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN BERDASARKAN KOMODITAS TAHUN 2020	46
Tabel 15	VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN BERDASARKAN NEGARA TUJUAN EKSPOR	46
Tabel 16	IKHTISAR PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KONSUMSI	50
Tabel 17	CAPAIAN IKU “PROPORSI TANGKAPAN JENIS IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN” TAHUN 2020	53
Tabel 18	CAPAIAN IKU LUAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020	58
Tabel 19	RINCIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020	59
Tabel 20	PERSENTASE LULUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG TERSERAP DI DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI	61
Tabel 21	SEBARAN SERAPAN LULUSAN SATUAN PENDIDIKAN KP TAHUN 2020	62
Tabel 22	SEBARAN JUMLAH LULUSAN PELATIHAN YANG MASYARAKAT KP YANG TERSERAP DUDI	63
Tabel 23	HASIL RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIADOPSI/DITERAPKAN	65
Tabel 24	RINCIAN HASIL RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIADOPSI/DITERAPKAN	66



Tabel 25	IKU WPP YANG MENJADI MODEL PERCONTOHAN PENGUATAN TATA KELOLA	68
Tabel 26	CAPAIAN PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR	70
Tabel 27	RINCIAN CAPAIAN PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR	71
Tabel 28	CAPAIAN PERSENTASE KEPATUHAN (COMPLIANCE) PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	74
Tabel 29	PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN IKU “PERSENTASE KEPATUHAN (COMPLIANCE) PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN”	74
Tabel 30	CAPAIAN KINERJA KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN	75
Tabel 31	CAPAIAN HASIL PENGAWASAN USAHA BUDIDAYA IKAN	76
Tabel 32	CAPAIAN HASIL PENGAWASAN PELAKU USAHA KELAUTAN	78
Tabel 33	PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK MERUSAK	82
Tabel 34	PRODUKSI PERIKANAN	84
Tabel 35	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	85
Tabel 36	LOKASI KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN ATAU PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN TAHUN 2020	85
Tabel 37	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2020	87
Tabel 38	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2020	87
Tabel 39	PRODUKSI GARAM NASIONAL TAHUN 2020 (JUTA TON)	89
Tabel 40	RINCIAN PRODUKSI GARAM NASIONAL TAHUN 2020	90
Tabel 41	LUAS LAHAN INTEGRASI GARAM TAHUN 2020	93
Tabel 42	CAPAIAN IKU PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU DARI KEGIATAN ILLEGAL FISHING	96
Tabel 43	CAPAIAN IKU “PERSENTASE PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN”	98
Tabel 44	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK PEMBENTUK PERSENTASE PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	99
Tabel 45	CAPAIAN NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI KKP TAHUN 2020	103
Tabel 46	CAPAIAN PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI KKP TAHUN 2020	104
Tabel 47	CAPAIAN IKU-17. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) KKP	108
Tabel 48	CAPAIAN IKU-17. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PER UNIT KERJA ESELON I	111
Tabel 49	PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KKP TAHUN 2020 PER UNIT KERJA ESELON I	117
Tabel 50	EFISIENSI KKP TAHUN 2020 BERDASARKAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA	122



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	STRUKTUR ORGANISASI	6
Gambar 2	KERAGAAN SDM KKP	7
Gambar 3	KERAGAAN BERDASARKAN PENDIDIKAN	8
Gambar 4	SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ) BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 53 TAHUN 2014	15
Gambar 5	PETA STRATEGI	19
Gambar 6	TAMPILAN DASHBOARD APLIKASI KINERJAKU	27
Gambar 7	CAPAIAN IKMKP TAHUN 2020	30
Gambar 8	CAPAIAN IKMKP TAHUN 2019 DAN 2020	31
Gambar 9	PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) TAHUN 2020	33
Gambar 10	GRAFIK NTPi BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2020	34
Gambar 11	GRAFIK NTPi BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2020	35
Gambar 12	GRAFIK NTPHP BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2019-2020	38
Gambar 13	GRAFIK NILAI LT, LB DAN NTPHP BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2020	39
Gambar 14	LOKASI SAMPLING PERHITUNGAN NTPHP	40
Gambar 15	PERTUMBUHAN PDB PERIKANAN 2015-2020	43
Gambar 16	GRAFIK TREN NILAI PDB PERIKANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) TAHUN 2016-2020	44
Gambar 17	VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN (JANUARI-DESEMBER TAHUN 2020)	45
Gambar 18	VIRTUAL EXHIBITION-TRADE EXPO INDONESIA (VE-TEI) KE-35 TAHUN 2020	47
Gambar 19	SEBARAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) MENURUT PROVINSI	48
Gambar 20	PETA SEBARAN KONSUMSI IKAN PER KAPITA TAHUN 2020	50
Gambar 21	BAZAR PRODUK PERIKANAN SELAMA TAHUN 2020	51
Gambar 22	KAMPANYE GEMARIKAN SELAMA TAHUN 2020	51
Gambar 23	GRAFIK PROPORSI TANGKAPAN JENIS IKAN TAHUN 2019-2020 TERHADAP POTENSI DAN JTb	54
Gambar 24	GRAFIK PERKEMBANGAN KEGIATAN LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN TAHUN 2016-2020	55



Gambar 25	GRAFIK PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN TAHUN 2016-2020	56
Gambar 26	LUAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020	59
Gambar 27	SEBARAN LOKASI UPT YANG MENUNJANG LULUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG TERSERAP DI DUDI	62
Gambar 28	TESTIMONI PESERTA PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	64
Gambar 29	PETA WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP-NRI)	67
Gambar 30	STRUKTUR ORGANISASI LPP DI WPPNRI	68
Gambar 31	STATUS CAPAIAN DAN PROGRES RZWP3K	72
Gambar 32	STATUS CAPAIAN DAN PROGRES RZ KAWASAN ANTAR WILAYAH (KAW)	72
Gambar 33	STATUS CAPAIAN DAN PROGRES RZ KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) 2017-2020	73
Gambar 34	STATUS CAPAIAN DAN PROGRES RZ KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT) 2017-2020	73
Gambar 35	PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2015-2020	83
Gambar 36	SEBARAN LOKASI PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT	92
Gambar 37	HARI OPERASI KAPAL PENGAWAS DAN PESAWAT PATROL TAHUN 2019-2020	96
Gambar 38	HASIL OPERASI KAPAL PENGAWAS TAHUN 2020 DI WPPNRI	97
Gambar 39	PENANGANAN PELANGGARAN TAHUN 2020	99
Gambar 40	GRAFIK PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN (TPKP) TAHUN 2020	100
Gambar 41	PENANGANAN BARANG BUKTI TPKP 2020	101
Gambar 42	CAPAIAN IKU IKPA KKP TAHUN 2020	110
Gambar 43	PEMBOBOTAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TAHUN 2020	110
Gambar 44	PAGU DAN REALISASI APBN KKP 2015-2020	115
Gambar 45	GRAFIK PERSENTASE REALISASI APBN KKP 2015-2020	116
Gambar 46	PAGU DAN REALISASI APBN KKP 2020	118

# RINGKASAN

Laporan Kinerja KKP Tahun 2020 berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi selama tahun 2020 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2020. Tahun 2020 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra KKP Tahun 2020. Secara umum kinerja KKP pada tahun 2020, termasuk kategori baik dengan tercapainya beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target. Pada tahun 2020, KKP mempunyai 9 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Nilai kinerja atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis KKP Tahun 2020 yaitu sebesar 102,14% atau termasuk kategori baik. Meskipun beberapa indikator masih belum tercapai, namun secara keseluruhan capaian kinerja mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja KKP tahun 2020 tercermin dari realisasi capaian 17 IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terdapat **10 indikator kinerja yang telah mencapai target** atau bahkan melebihi target dengan rincian sebagai berikut :
  1. IKU 4. Konsumsi ikan target sebesar 56,39 kg/kapita/tahun dan realisasi diperkirakan sebesar 56,39 kg/kapita/tahun (angka sementara) atau tercapai 100%.
  2. IKU 5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman target sebesar  $\leq 64\%$ , realisasi sebesar 56,91% atau mencapai 111,08 % atau 120% dalam aplikasi kinerjajaku.
  3. IKU 6. Luas kawasan konservasi perairan target sebesar 23,4 juta ha, realisasi sebesar 24,11 juta ha atau tercapai 103,03%.
  4. IKU 8. Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan target sebesar 5 hasil riset, realisasi sebesar 5 hasil riset atau tercapai 100%.
  5. IKU 9. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola target sebesar 3 WPP, realisasi sebesar 3 WPP atau tercapai 100%.
  6. IKU 10. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir target sebesar 14 rencana zonasi, realisasi sebesar 14 atau tercapai 100%.



7. IKU 11. Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan target sebesar 94%, realisasi sebesar 94,76% atau tercapai 100,81%.
  8. IKU 14. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing target sebesar 54%, realisasi sebesar 67,8% atau telah mencapai 125,56% atau setara dengan 120% pada aplikasi kinerjajaku.
  9. IKU 16. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP target sebesar 71, realisasi sebesar 85,48 atau tercapai 120,39% atau sebesar 120% pada aplikasi kinerjajaku.
  10. IKU 17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP target sebesar 88, realisasi sebesar 93,95 atau tercapai 106,76%.
- b. Terdapat **7 indikator kinerja yang belum mencapai target** dengan rincian sebagai berikut:
1. IKU 1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan target sebesar 59,16 dengan realisasi sebesar 58,31 atau tercapai 98,56%.
  2. IKU 2. Pertumbuhan PDB Perikanan target sebesar 7,9% dengan realisasi sebesar 0,73% atau tercapai 9,24%.
  3. IKU 3. Nilai Ekspor Hasil Perikanan target sebesar 5,3 USD miliar tercapai sebesar 5,2 USD miliar atau tercapai 98,11%.
  4. IKU 7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri/DUDI target sebesar 60%, realisasi sebesar 54,82% atau tercapai 91,37%.
  5. IKU 12. Produksi Perikanan target sebesar 26,46 juta ton, realisasi sebesar 23,16 juta ton atau tercapai 87,53% (angka sangat sementara)
  6. IKU 13. Produksi garam target sebesar 2 juta ton realisasi sebesar 1,37 juta ton atau tercapai 68,5%.
  7. IKU 15. Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan target sebesar 93%, realisasi sebesar 86,78% atau tercapai 93,31%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 menghadapi tantangan yang luar biasa salah satunya dengan adanya Pandemi COVID-19. Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi telah menimbulkan perubahan fundamental pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi

khususnya yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut turut mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan di tahun 2020. Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, namun seluruh jajaran KKP tetap optimis dan terus berupaya untuk mewujudkan visi dan misi KKP yaitu terwujudnya masyarakat KP yang sejahtera dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Refocusing dan realokasi anggaran terus dilakukan dengan memprioritaskan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2020 KKP mengelola anggaran sebesar Rp. 5.269.641.991.000 dengan realisasi sebesar Rp.4.809.642.208.628 atau mencapai 91,27% yang terbagi dalam 9 (sembilan) program pembangunan kelautan dan perikanan, 51 kegiatan dan tersebar di 421 satuan kerja (Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Selain itu, untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja berbagai upaya telah dilakukan oleh segenap jajaran di lingkungan KKP. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja di tahun 2020 akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota, lembaga terkait lainnya serta stakeholder kelautan dan perikanan akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator kinerja hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh KKP serta dukungan dari stakeholder terkait. Selain itu pemanfaatan teknologi dan informasi mutlak ditingkatkan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan terutama dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru dengan adanya pandemi covid yang diperkirakan masih terus berlangsung di tahun 2021.

Kedepan dalam rangka meningkatkan peran KKP sebagai salah satu kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan serta dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, perlu dibangun komunikasi dengan stakeholder pelaku usaha kelautan dan perikanan serta para pemangku kepentingan sehingga tercipta iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang kondusif. Selain itu KKP beserta jajarannya akan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan bagi para stakeholder kelautan dan perikanan.



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Rencana Strategis KKP merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan dapat direview sesuai aturan yang berlaku. RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian indikator pembangunan dalam RPJPN, dimana ditargetkan pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara- negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020- 2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.



Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik. Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:
8. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
9. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut kedalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara. Pada tahun 2020, KKP telah menetapkan 17 indikator kinerja pembangunan yang terbagi dalam 9 Sasaran Strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan.

## **Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja KKP tahun 2020 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran KKP. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja KKP tahun 2020 adalah untuk menilai dan



mengevaluasi pencapaian kinerja KKP selama tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

### Tugas dan Fungsi KKP

Tugas KKP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP adalah membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
5. pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil



- perikanan, dan keamanan hayati ikan;
6. pelaksanaan pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu;
  7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  8. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP; dan
  10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP.

### Sumber Daya Manusia KKP

Sebagaimana tertuang dalam Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

1. **Sekretariat Jenderal;**  
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP.
2. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;**  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
3. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;**  
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
4. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;**  
Ditjen Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.
5. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;**  
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan

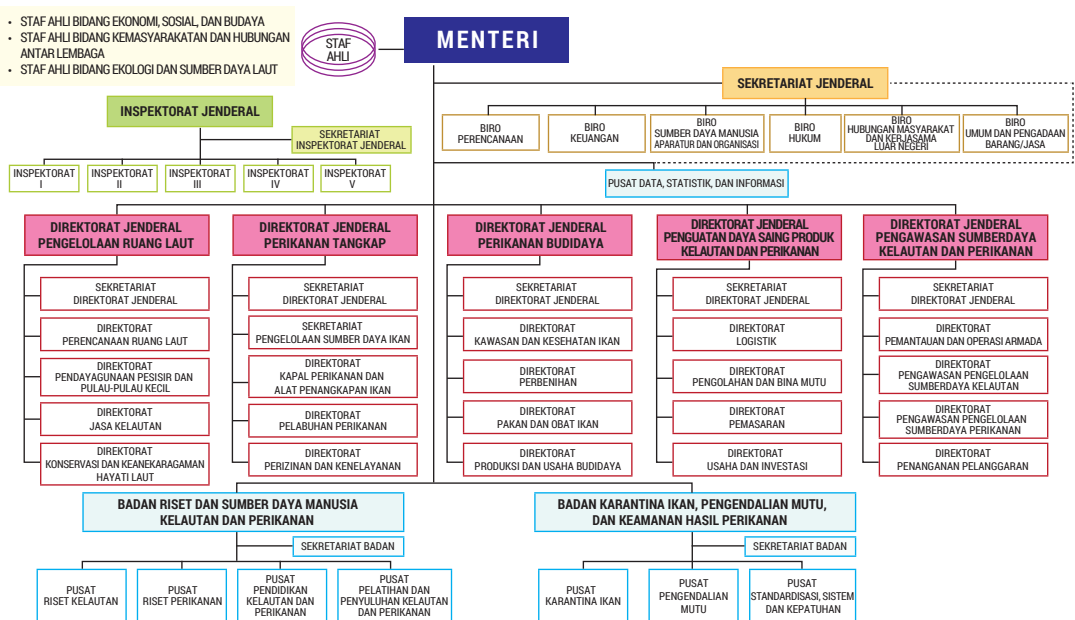
perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

6. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;**  
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
7. **Inspektorat Jenderal;**  
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP.
8. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;**  
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
9. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;**  
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.
10. **Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;**  
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
11. **Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga;**  
Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang masyarakat dan hubungan antarlembaga.
12. **Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.**  
Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekologi dan sumber daya laut.
13. **Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin),** berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh seorang Kepala

Pusat, yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan infrastruktur teknologi informasi, serta layanan perizinan terpadu Kementerian di Bidang Kelautan dan Perikanan.

- 14. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**, melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkungan KKP ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

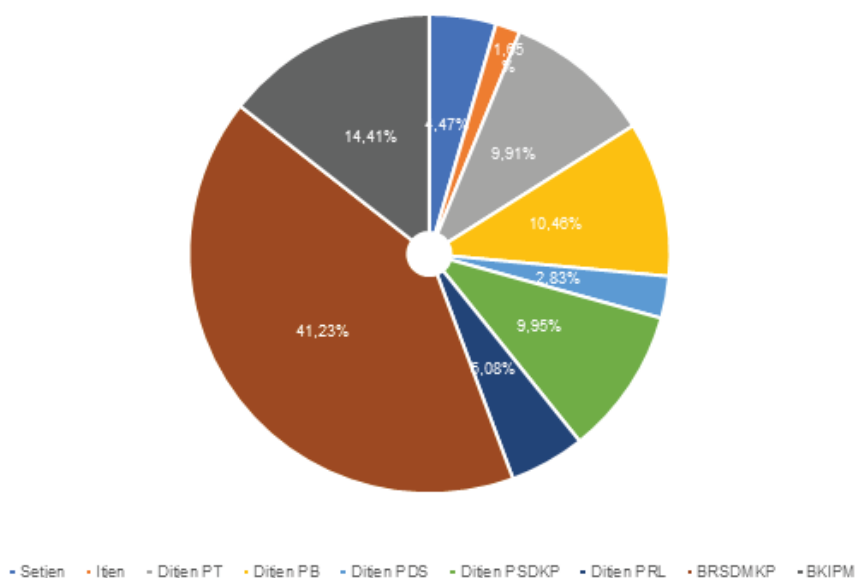
Pada tahun 2020, tepatnya 25 September 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di lingkup KKP menjadi jabatan fungsional, sehingga struktur organisasi menjadi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi

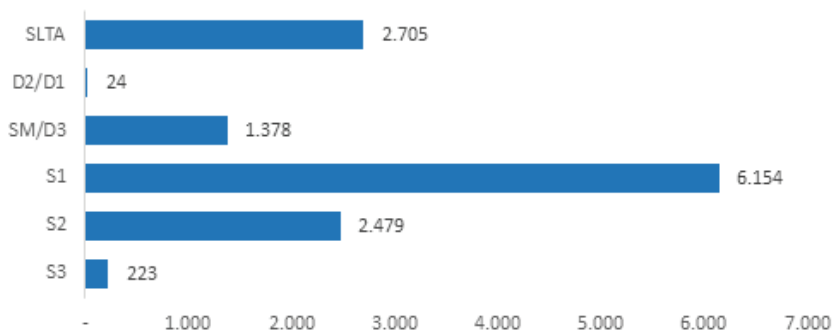
## Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai KKP (Pusat dan UPT) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah 12.963 orang, yang terdiri dari, yang terdiri dari laki-laki 8.726 orang atau 67,31% dan perempuan 4.237 orang atau 32,69%. Pegawai KKP tersebut tersebar pada 9 Unit Kerja Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Setjen 580 orang (4,47%), Itjen 214 orang (1,65%), Ditjen PT 1.284 orang (9,91%), Ditjen PB 1.356 (10,46%), Ditjen PRL 659 orang (5,09%), Ditjen PDS 367 orang (2,83%), Ditjen PSDKP 1.290 orang (9,94%), BRSDM KP 5.345 orang (41,23%), dan BKIPM 1.868 orang (14,41%). Keragaan SDM KKP tahun 2020 berdasarkan jumlah pegawai per unit kerja seperti pada diagram berikut:



**GAMBAR 2. KERAGAAN SDM KKP**

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM KKP adalah sebagai berikut: S-3 sebanyak 223 orang (1,72%); S2 sebanyak 2.479 orang (19,12%); S1/D4 sebanyak 6154 orang (47,47%); SM/D3 sebanyak 1.378 orang (10,63%); D2/D1 sebanyak 24 org (0,19%); di SLTA dan di bawah SLTA sebanyak 2.705 (20,87%) Keragaan SDM KKP menurut pendidikan dan unit kerja Eselon I seperti pada diagram berikut :



GAMBAR 3. KERAGAAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

## Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 pulau, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejumlah 16.671 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km<sup>2</sup>, luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km<sup>2</sup>, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 3,00 juta km<sup>2</sup>. Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km<sup>2</sup>, luas landas kontinen 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan panjang garis pantai 108.000 km (Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018). Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah). Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/

KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 atau baru 69,59% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan perairan darat) adalah 7,53 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan. Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga selalu meningkat sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis ikan seperti kerapu, kakap, dan baronang, budidaya tambak untuk komoditas udang dan bandeng, serta budidaya air tawar seperti ikan mas, nila, lele, dan patin. Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Pemanfaatan potensi lahan perikanan baru mencapai 2,7% yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 316.446 ha. Potensi produksi perikanan budidaya di Indonesia mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai USD 251 miliar (Dahuri, 2019). Kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap total nilai ekspor nonmigas adalah 1,13%, dan 37,71% jika dibandingkan terhadap total nilai ekspor perikanan pada tahun 2018 (BPS, 2019). Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat tergantung kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan. Beberapa bahan tepung pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung impor antara lain adalah tepung maggot (ulat lalat hitam/black soldier), daging kerang hijau, ikan rucah atau ikan sisa olahan, ikan pemakan plankton yang nilai ekonominya rendah di masyarakat, bahan fermentasi berbagai tumbuhan, serta cacing lumbricus. Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta ha (P2O-LIPI, 2018) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km<sup>2</sup> (Spalding et al. 2001) dengan penyumbang terbesar adalah coral triangle yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km<sup>2</sup>) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke et al. 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan lima jenis diantaranya merupakan jenis yang



endemik. Selanjutnya LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1.067 site di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 site (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 site (34,3%), kategori baik sebanyak 245 site (22,96%), dan kategori sangat baik sebesar 70 site (6,56%). Indonesia juga mempunyai wilayah lamun dan mangrove yang luas. Berdasarkan penelitian P2O-LIPI (2018) luasan lamun Indonesia seluas 293.464 ha, sedangkan luas kawasan mangrove berdasarkan data *One Map Mangrove* (2018) seluas 3,5 juta ha. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya nonhayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum dikelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan

### Permasalahan dan Tantangan

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini diantaranya adalah: a. produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional; b. kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi; c. ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan;



d. akses permodalan untuk peningkatan skala usaha; e. daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan; f. sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budidaya ikan, dan lain lain; serta g. degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain : a.pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk optimalisasi kelembagaan WPPNRI; b. harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL); c. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya; d. masih terjadinya praktek IUU *fishing* dan *destructive fishing*; e. penerapan *good aquaculture practices* masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya; dan f. sinergi *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Permasalahan pengembangan perikanan tangkap antara lain: a. belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat eksploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi; b. tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan; c. infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan d. belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan. Permasalahan pengembangan perikanan budidaya adalah terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu, harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien, penyakit, kapasitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan adalah terjadinya asimetrik regulasi yang bersifat intrasektoral dan intersektoral, persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudi daya ikan masih belum *bankable*, dan keterbatasan akses permodalan. Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan



semakin ketat. Perluasan investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi unit pengolahan ikan, penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk menanganani permasalahan permodalan, penurunan hambatan tarif dan non tarif, guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain upaya penguatan sistem karantina ikan serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dihadapkan pada permasalahan dengan belum optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (kapal, tambak, supplier, dan unit pengolah ikan), masih kurangnya sarana dan prasarana inspeksi dan laboratorium pengujian, sarana layanan dan pengawasan di sentra-sentra produksi, serta di pintu-pintu pos lintas batas negara dan di bandara/ pelabuhan baru. Selain itu, masih terjadi praktik-praktik IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) Fishing di WPPNRI, baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Saat ini, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya), peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam skala nasional maupun internasional, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP. Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan SDKP mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat unresolved area dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri. Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri banyak dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pergaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung. Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun laut, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius

terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrem (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia adalah masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kerdil (*stunting*). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.

### Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan, yaitu: 1. aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja; 2. aspek sosial dan politik yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. kerangka kebijakan dan hukum nasional terkait dengan peningkatan keterlibatan *stakeholders* dalam penyusunan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan dan terkait ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan; 4. sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota; 5. perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Informasi terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di satu WPPNRI yang berguna untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi; 6. kapasitas sumber daya manusia terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan; dan 7. sistem pengawasan terutama terkait dengan jaminan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan



mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, *United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995*, *FAO Compliance 1993*, *Port State Measures Agreement 2009*, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dan *International Plan of Action, Sustainable Development Goals (SDGs) kelautan dan perikanan*, dan *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 1994. Terdapat juga organisasi pengelolaan perikanan regional atau *Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs)* yang melingkupi perairan Indonesia seperti *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization (WTO)*, dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, Konvensi dan kerja sama *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, *International Coral Reef Initiative (ICRI)* dan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)*. Sebagai bagian dari entitas pada hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia harus mampu mengoptimalkan keterlibatannya. Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain: 1. sumber daya ikan, habitat, dan produksi; 2. pengelolaan perikanan nasional berbasis WPPNRI; 3. komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan; 4. penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan; 5. ketersediaan bahan baku untuk industri perikanan; 6. permintaan hasil perikanan dalam negeri; dan 7. pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan. Sedangkan yang menjadi kelemahan, antara lain: 1. ekonomi nasional; 2. sosial budaya nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang, antara lain: 1. permintaan hasil perikanan dunia; 2. sumber daya alam dan tingkat produksi perikanan dunia; 3. kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMOs); 4. kependudukan dunia. Sedangkan yang menjadi ancaman, antara lain: 1. globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia; 2. praktik IUU Fishing; 3. ketentuan *World Trade Organisation (WTO)*; dan 4. pengaruh atas dikeluarkannya status Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat.

Pada tahun 2020, pembangunan kelautan dan perikanan mengalami dinamika dengan adanya Pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan tekanan terhadap

ekonomi dan sosial. Terjadinya pandemi global *Corona Virus Disease (COVID-19)* berdampak besar terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Perencanaan pembangunan kedepan perlu diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan pascapandemi COVID-19 akan mendapatkan penekanan.

### Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja KKP Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:



**GAMBAR 4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ) BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 53 TAHUN 2014**



# PERENCANAAN KINERJA

## Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

### Visi dan Misi KKP Tahun 2020-2024



## Tujuan

Dalam rangka menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan :
  - a. Meningkatnya kapasitas dan kompeten SDM Kelautan dan Perikanan dan
  - b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap



Perekonomian Nasional, dengan tujuan :

- a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
  - b. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
  - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
  - d. Meningkatnya system perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dan
  - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut
3. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil
  4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP

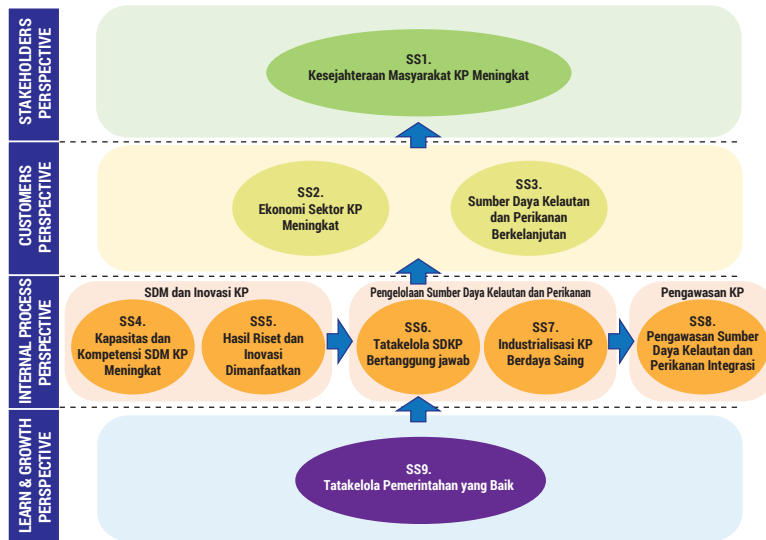
### Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS-2 Ekonomi sektor KP meningkat
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- SS-6 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- SS-7 Industrialisasi KP berdaya saing
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif
- SS-9 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dalam penyusunannya KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders prespective, customer prespective, internal process prespective, dan learning and growth prespective*, sebagai berikut:





GAMBAR 5. PETA STRATEGI

### Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Kesejahteraan Masyarakat KP meningkat”, dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.

### Customer Perspective

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi sektor KP meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 2) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9 % pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024.
- 3) Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024.
- 4) Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/thn pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/thn pada tahun 2024

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:



- 5) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari  $\leq 64\%$  pada tahun 2020 mejadi  $\leq 80\%$  pada tahun 2024.
- 6) Luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024

### **Internal Process Perspective**

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 7) Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024
- 8) Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja:

- 9) Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 hasil riset pada tahun 2024

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata kelola SDKP bertanggung jawab”, dengan Indikator Kinerja:

- 10) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;
- 11) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana zonasi tahun 2020-2024)
- 12) Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi KP berdaya saing”, dengan indikator kinerja:

- 13) Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32.75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024.
- 14) Produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024.
- 15) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024

- 16) Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari 5 kawasan pada tahun 2020 menjadi 50 kawasan pada tahun 2024

Saran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif”, dengan Indikator Kinerja:

- 17) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
- 18) Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024;
- 19) Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024

### **Learning and Growth Perspective (input)**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP melalui Sasaran strategis kesembilan (SS-9) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- 20) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024
- 21) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024

### **Penetapan Kinerja**

Penetapan Kinerja KKP Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran



organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pelaporan kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang dimuat dalam Renstra KKP Tahun 2020-2024 Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020. Indikator Kinerja dan indikasi pendanaan KKP 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Untuk pelaporan tahun 2020, pengukuran dilakukan terhadap 9 SS dan 17 IKU sebagai berikut :

**TABEL 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	indeks	59,16
2.	Pertumbuhan PDB Perikanan	%	7,9
3.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	USD miliar	5,3
4.	Konsumsi ikan	Kg/Kap/Thn	56,39
5.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	≤64
6.	Luas kawasan konservasi perairan	Juta Ha	23,4
7.	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI	%	60
8.	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan	Hasil Riset	5
9.	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	WPP	3
10.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	Rencana Zonasi	14
11.	Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	%	94
12.	Produksi perikanan	Juta ton	26,46
13.	Produksi garam	juta ton	2
14.	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing	%	54
15.	Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	%	93
16.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	Nilai	71
17.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	Nilai	88

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut terangkum dalam 9 program pembangunan kelautan dan perikanan dengan menggunakan alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA Awal KKP yang disahkan tanggal 12 November 2019 sebesar 6,44 triliun dan menjadi sebesar Rp. 5,26 triliun setelah adanya pemotongan anggaran dan penyesuaian Anggaran Biaya Tambahan (ABT),

yang dilaksanakan melalui pelaksanaan 9 program pembangunan kelautan dan perikanan dengan penjelasan sebagai berikut :

### **Program Pengelolaan Ruang Laut**

Tujuan Program adalah mewujudkan tertannya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah perlindungan dan pemnfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, penataan dan pemanfaatan jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pengelolan Ruang Laut.

### **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan pelabuhan perikanan, pengelolaan kapal dan alat pennangkapan ikan, pengelolaan sumber daya ikan, dan dukungan manajemen, pengelolaan perizinan dan kenelayanan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

### **Program Penguatan Daya Saing Produk KP**

Tujuan program adalah meningkatnya produksi olahan hasil perikanan yang bernilai tambah, nilai produk hasil perikanan non konsumsi, rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional, nilai ekspor hasil perikanan, dan nilai investasi bidang pengolaahn dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah logistik hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PSDPKP.

### **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan



sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan perbenihan ikan, pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan, pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan, pengelolaan pakan dan obat ikan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

### **Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Tujuan program adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas IUU Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemantauan dan operasi armada, penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PSDKP.

### **Program Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Tujuan Program adalah menyiapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai basis kebijakan pembangunan KP dengan sasaran termanfaatkannya IPTEK hasil riset oleh para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, pendidikan kelautan dan perikanan, riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan, riset sosail ekonomi kelautan dan perikanan, riset perikanan, riset kelautan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BRSDM KP.

### **Program Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

Tujuan program adalah lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sasaran yaitu meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah karantina ikan, pengendalian mutu, standarisasi sistem dan kepatuhan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKIPM

### **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP**

Tujuan program adalah meningkatkan pengendalian akuntabilitas kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program meningkatnya persentase capaian kinerja pembangunan KP. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP, pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP, pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP, pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP, pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat V dan Pelaksana Pembangunan KP, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KKP.

### **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP**

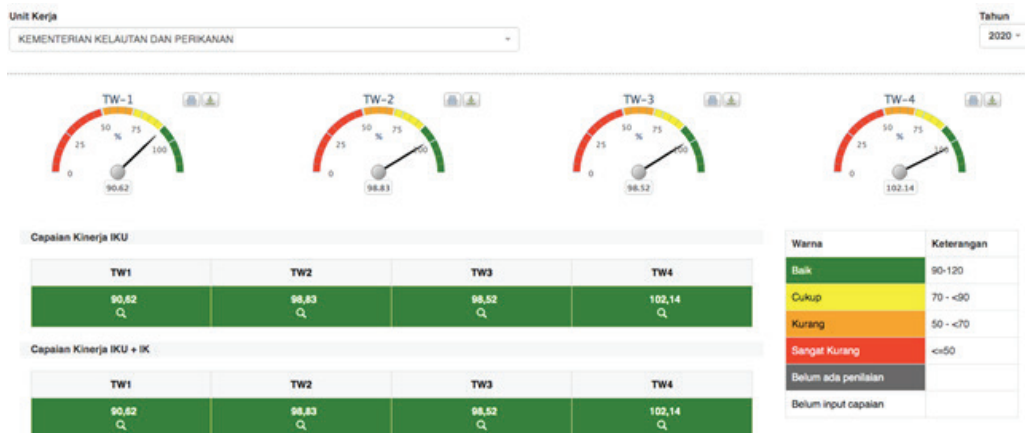
Tujuan Program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah penyiapan produk hukum, penataan organisasi KKP, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan KKP, pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja dan kerja sama antar lembaga, pengelolaan administrasi dan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas KKP, pengelolaan humas dan kerja sama luar negeri, pengelolaan data statistik kelautan dan perikanan dan pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan





# CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam memantau capaian kinerja organisasi, KKP melakukan pengukuran kinerja secara periodic. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja interim triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana Keputusan MKP Nomor 71/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan KKP. Perhitungan dilakukan terhadap capaian indicator kinerja dari setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Unit Kerja di lingkungan KKP. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja tersebut di atas serta seluruh perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Tampilan dashboard capaian KKP Tahun 2020 seperti pada gambar berikut:



GAMBAR 6. TAMPILAN DASHBOARD APLIKASI KINERJAKU

Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau skor kinerja tahun 2020 mencapai 102,14 atau mengalami kenaikan sebesar 6,20%, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 96,18.

**TABEL 2. CAPAIAN IKU KKP TAHUN 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	indeks	59,16	58,31	98,56
2	Pertumbuhan PDB Perikanan	%	7,9	0,73	9,24
3	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	USD miliar	5,3	5,2	98,11
4	Konsumsi ikan	Kg/Kap/Thn	56,39	56,39	100
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	≤64	56,91	120
6	Luas kawasan konservasi perairan	Juta Ha	23,4	24,11	103,03
7	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI	%	60	54,82	91,37
8	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan	Hasil Riset	5	5	100
9	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	WPP	3	3	100
10	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	Rencana Zonasi	14	14	100
11	Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	%	94	94,76	100,81
12	Produksi perikanan	Juta ton	26,46	23,16	87,53
13	Produksi garam	juta ton	2	1,37	68,5
14	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing	%	54	67,8	120
15	Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	%	93	86,78	93,31
16	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	Nilai	71	85,48	120
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	Nilai	88	93,95	106,76

Sumber Aplikasi Kinerjaaku

Analisis capaian kinerja KKP setiap Sasaran Strategis untuk setiap perspective dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan kementerian. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

## STAKEHOLDER PERSPECTIVE

### Sasaran Strategis (SS-1) “ Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkatkan”

Sasaran Strategis-1 “Kesejahteraan Masyarakat KP Meningkatkan”, memiliki satu IKU yakni Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM). Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. KKP berkomitmen untuk senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholder kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya melalui program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh KKP.



#### Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

IKMKP merupakan Indikator Kinerja Utama KKP yang menempati stakeholder perspektif dalam peta strategi untuk level 0 (terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP). IKMKP yang diukur memberikan ilustrasi kecenderungan tingkat kesejahteraan masyarakat KP selama periode

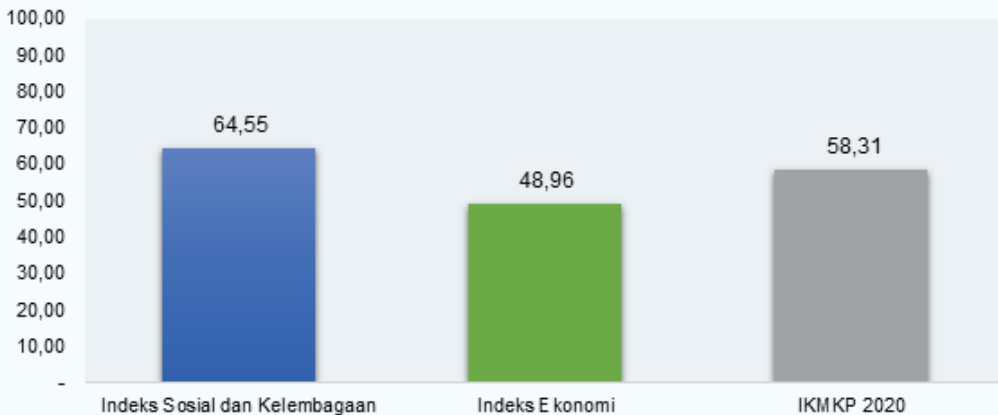
2014-2020 terutama disumbangkan oleh kemampuan para nelayan tradisional, pembudidaya, petambak, pengolah, dan pemasar dalam pemenuhan hak dasarnya. Dari sisi dimensi sosial dan kelembagaan, IKMKP 2020 telah memasukkan indikator penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolah dan pemasaran hasil perikanan serta kelompok masyarakat pengawas dan peningkatan kelas kelompok, namun belum mengakomodir penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha garam rakyat dan kelembagaan usaha yang mendapatkan bantuan dan terfasilitasi permodalannya. Selanjutnya dari sisi dimensi ekonomi, IKMKP 2020 telah memasukkan indikator nilai tukar nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam. Indikator lainnya yang juga digunakan adalah ekspor dan impor produk perikanan, angka konsumsi ikan dan proporsi pengeluaran pangan. Namun indikator ekonomi lainnya seperti pendapatan pelaku usaha dan pengembangan usaha dengan basis jasa kelautan belum masuk dalam proses perhitungan.

**TABEL 3. CAPAIAN IKMKP TAHUN 2020**

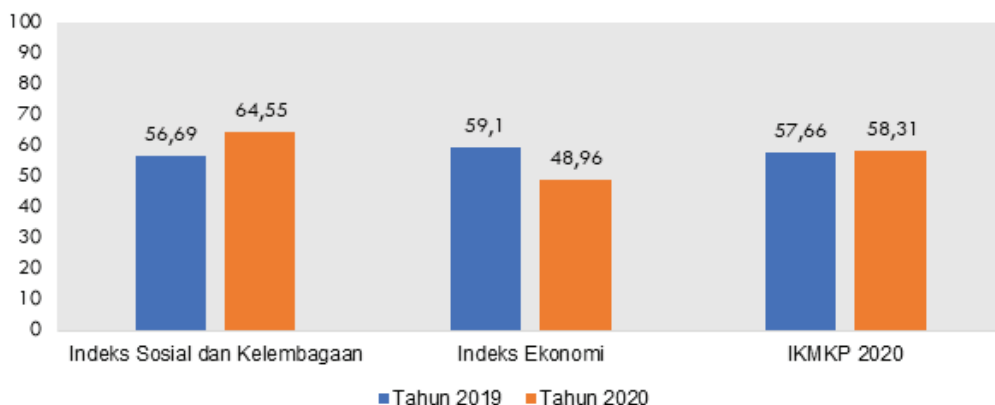
SS-1					Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU-1					Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
49,88	54	55,86	56,94	57,66	59,16	58,31	98,56%	1,13	59,16	98,56%	63,87	91,29%	

Sumber: Balai Riset Sosek KP(2020)

Hasil penghitungan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Perikanan (IKMKP) menunjukkan bahwa capaian IKMKP 2020 sebesar 58,31 atau mencapai 98,56%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, capaian di 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,13% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 yaitu sebesar 63,87, realisasi tersebut telah mencapai 91,29%. Capaian IKMKP sebesar 58,31 terdiri atas capaian dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 64,55 dan capaian dimensi ekonomi sebesar 48,96. Capaian IKMKP 2020 tidak mencapai target sebagaimana yang sudah tercantum dalam Renstra KKP, yaitu sebesar 59,16 pada Tahun 2020. Nilai IKMKP tersebut mencapai 98,57% dari angka yang ditargetkan. Meskipun demikian, dengan nilai IKMKP sebesar 58,31 menunjukkan pelaku utama usaha perikanan dan kelautan berada pada kondisi relatif sejahtera. Dari kedua dimensi dapat dilihat jika dimensi sosial dan kelembagaan memberikan sumbangan lebih besar dibandingkan dimensi ekonomi. Nilai IKMKP sebesar 58.31 ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 0.61 poin dari nilai capaian IKMKP tahun 2019 (57,66). Tidak tercapainya target IKMKP 2020 disebabkan oleh dampak pandemic covid-19 yang menyebabkan pelambatan transportasi, distribusi dan pembatasan berbagai akselerasi kegiatan di masyarakat dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).



**GAMBAR 7. CAPAIAN IKMKP TAHUN 2020**



**GAMBAR 8. CAPAIAN IKMKP TAHUN 2019 DAN 2020**

Hasil penghitungan menunjukkan capaian IKMKP 2020 sebesar 58,31. Capaian dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 64,55 dan capaian dimensi ekonomi adalah sebesar 48,96. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa capaian IKMKP 2020 meningkat 1,13% dari IKMKP 2019. Capaian dimensi sosial dan kelembagaan meningkat sebesar 13,87% sedangkan capaian dimensi ekonomi menurun sebesar 17,16%. Sebagaimana terjadi pada periode satu tahun sebelumnya, penurunan indeks ekonomi ini diduga didorong oleh inflasi atau kenaikan harga barang/jasa untuk keperluan produksi dan konsumsi masyarakat KP dan juga melambatnya pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun global. Selain itu kondisi pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 turut berpengaruh dalam kemampuan daya beli pelaku usaha perikanan. Hal ini terutama disebabkan oleh pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah, sehingga aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan dari rumah. Tentunya hal ini berkontribusi pula pada penurunan permintaan bahan makanan yang dikonsumsi termasuk ikan. Berdasarkan hal tersebut maka serapan produksi nelayan dan pembudidaya ikan mengalami dampak penurunan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, kondisi ini juga mendorong pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan tanpa harus melakukan transaksi tatap muka, telah mendorong pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melakukan berbagai terobosan sehingga memudahkan proses pembelian produk perikanan oleh konsumen. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini KKP harus lebih serius dalam mendorong pembangunan dan penguatan pada dimensi ekonomi dengan berupaya menjaga stabilitas harga, baik harga input produksi maupun harga barang/jasa konsumsi.



Terkait proses penghitungan IKMKP, ke depan diperlukan konsistensi ketersediaan data untuk mengisi indikator yang digunakan dalam perhitungan IKMKP dari eselon 1 terkait. Data yang digunakan dalam perhitungan IKMKP hanya menggunakan satu tahun data, sehingga tidak bisa menggunakan variabel yang bersifat lag. Penggunaan series data yang lebih panjang akan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif dalam proses analisis, karena akan mampu menangkap pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. IKMKP yang dihasilkan menggunakan bobot yang berbeda untuk dimensi sosial kelembagaan dan ekonomi. Dimensi sosial dan kelembagaan diberikan bobot lebih besar dibandingkan bobot dimensi sosial. Ke depan dapat dipertimbangkan untuk menggunakan bobot yang berbeda antar wilayah. Dengan adanya pembedaan pembobotan, dapat ditentukan fokus pembangunan pada masing-masing wilayah. Daerah yang telah maju dari sisi ekonomi, dapat diberikan bobot yang lebih rendah atau sebaliknya. Pembobotan dengan penapisan ini dapat menjadi salah satu saran untuk penghitungan selanjutnya.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain:

- a. menciptakan iklim kondusif agar pelaku utama usaha baik perikanan tangkap, budidaya, pengolah dan pemasar serta masyarakat pengawas mampu untuk menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif;
- b. peningkatan kapasitas penyuluh perikanan dalam teknik fasilitasi, kewirausahaan dan manajemen usaha masyarakat kelautan dan perikanan dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mendorong peningkatan produksi garam nasional; serta
- d. mendorong peningkatan kinerja ekspor dan impor produk perikanan.

Untuk kondisi per propinsi, IMMKP 2020 tertinggi didapat pada Propinsi Jawa Tengah (91,19), Sulawesi Selatan (87,72), dan Jawa Timur (84,93). Sementara itu, IKMKP terendah didapat pada propinsi Lampung (20,68) dan DKI Jakarta (23,86). Dari sisi dimensi sosial dan kelembagaan, nilai Indeks Sosial dan Kelembagaan tertinggi dicapai oleh Propinsi Sulawesi Selatan (100,00), Jawa Timur (97,27), Jawa Tengah (85,32), Sumatera Selatan (85,32), Nusa Tenggara Barat (84,82), Kalimantan Selatan (83,81) dan Gorontalo (81,05). Nilai indeks Sosial dan Kelembagaan terendah dicapai oleh Lampung (0,00) dan DKI Jakarta (8,67). Selanjutnya dari sisi dimensi ekonomi, nilai indeks ekonomi tertinggi dicapai oleh Propinsi Jawa Tengah (100,00) dan Kalimantan Timur (80,50). Nilai Indeks Ekonomi terendah dicapai oleh Propinsi Sumatera Barat (0,00), Sulawesi Barat (15,79), Papua Barat (16,55) dan Riau (18,97). Pada propinsi-propinsi dengan kinerja IKMKP terendah, beberapa hal yang

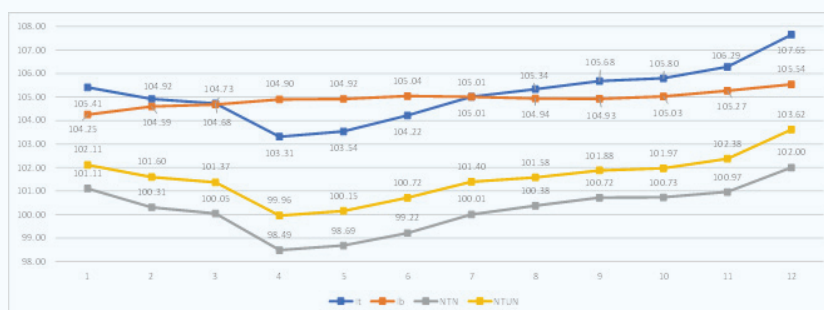
paling perlu mendapatkan perhatian adalah: 1) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 2) Penguatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan; 3) Peningkatan produksi garam; 4) Peningkatan tingkat konsumsi ikan; 5) Peningkatan ekspor produk perikanan; dan 6) Peningkatan pendapatan masyarakat untuk mendorong daya beli masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka opsi rekomendasi kebijakan yang ditawarkan adalah: 1) menciptakan iklim kondusif agar pelaku utama usaha baik perikanan tangkap, budidaya, pengolah dan pemasar serta masyarakat pengawas mampu untuk menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif; 2) meningkatkan kapasitas penyuluh perikanan dalam teknik fasilitasi, kewirausahaan dan manajemen usaha masyarakat kelautan dan perikanan dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) mendorong peningkatan produksi garam nasional; serta 4) mendorong peningkatan kinerja ekspor dan impor produk perikanan.

### Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN merupakan alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka Capaian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diolah KKP. NTN Nasional mengalami penurunan dimulai pada bulan Februari kemudian mulai meningkat kembali pada bulan Mei sampai Desember. NTN tercatat dibawah 100 pada bulan April, Mei, Juni. Hal ini dimungkinkan akibat dari dampak wabah covid-19 yang memaksa menghentikan aktifitas ekonomi diberbagai sektor. Pada tiga bulan kuartal kedua, terasa sekali permintaan produk ikan sangat menurun diberbagai daerah sehingga harga ditingkat produsen jatuh relatif lebih dalam dibandingkan produk lainnya yang dikonsumsi oleh pada pelaku usaha perikanan.

Secara rata-rata NTN tumbuh positif sebesar 0.08 persen per bulan selama tahun 2020, sehingga meningkat dari senilai 101.11 pada Januari menjadi 102.00 pada bulan Desember. Adapun rata-rata NTN yang tercatat adalah senilai 100.22 dengan nilai NTN tertinggi terjadi pada bulan Desember pada angka 102.00, dan nilai NTN paling rendah pada bulan April pada angka 98.49.



GAMBAR 9. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) TAHUN 2020

TABEL 4. CAPAIAN NTN TAHUN 2020

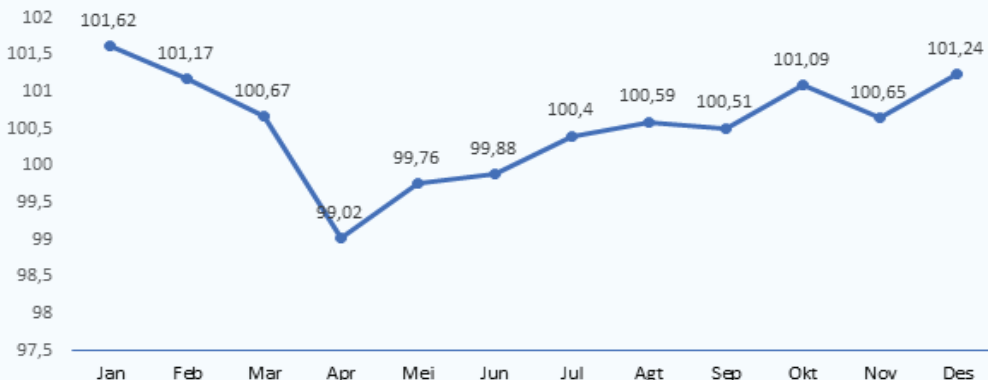
SS-1					Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU-1					Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP								
Indikator Kinerja Pembentuk					Nilai Tukar Nelayan (NTN)								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
106,14	108,24	109,86	113,28	113,74	102	100,22	98,25%	-	102	98,25%	107	93,66%	

- 2015-2019 perhitungan berdasarkan tahun dasar 2012
- 2020 perhitungan berdasarkan tahun dasar 2018

Realisasi NTN sebesar 100,22 apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 102 telah mencapai 98,25%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 107, realisasi tersebut telah mencapai 93,66%. Capaian NTN tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengingat terdapat perbedaan tahun dasar perhitungan.

### Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) adalah salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan kebutuhan sehari-hari dan biaya usaha budidayanya. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) merupakan angka indek antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi.

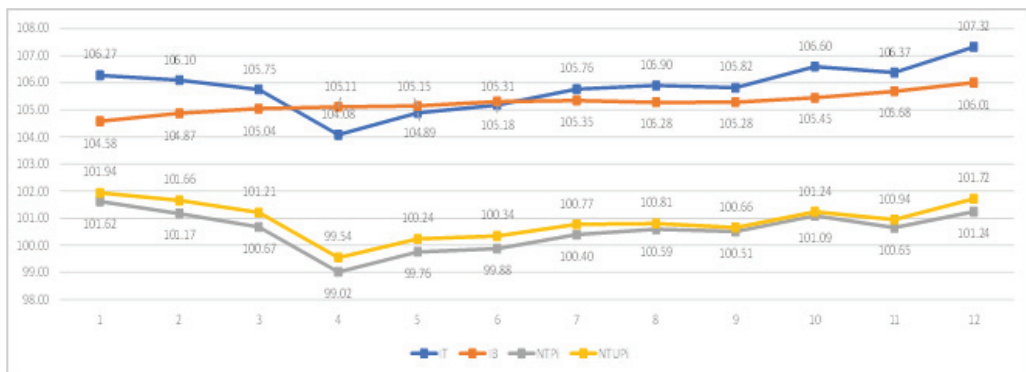


GAMBAR 10. GRAFIK NTPI BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2020



Perkembangan nilai NTPi sepanjang tahun 2020 telah ditampilkan pada Gambar 6. Dari Gambar tersebut dapat diamati bahwa sepanjang periode pengamatan, NTPi Nasional mengalami fluktuasi yang hampir sama dengan NTN, yaitu penurunan dimulai pada bulan Februari kemudian mulai meningkat kembali pada bulan Mei sampai September. Hal ini diduga akibat dari dampak wabah covid-19 yang memaksa menghentikan aktifitas ekonomi diberbagai sektor, termasuk perikanan budidaya. Pada tiga bulan kuartal kedua, terasa sekali permintaan produk ikan sangat menurun diberbagai daerah sehingga harga ditingkat produsen jatuh relatif lebih dalam dibandingkan produk lainnya yang dikonsumsi oleh pada pelaku usaha perikanan budidaya.

Secara rata-rata NTPi tumbuh minus sebesar (-0.03) persen per bulan selama tahun 2020, sehingga melambat dari senilai 101.62 pada Januari menjadi 101.24 pada Desember 2020. Adapun rata-rata NTPi yang tercatat adalah senilai 100.55 dengan nilai NTPi tertinggi terjadi pada bulan Januari pada angka 101.62, dan nilai NTPi paling rendah pada bulan April pada angka 99.02.



Sumber: BPS, diolah (2020)

**GAMBAR 11. GRAFIK NTPi BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2020**

Pada bulan Januari - Desember tahun 2020 secara rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 100,55. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2020 berada di atas 100. Selama tahun 2020, NTPi tertinggi berada pada bulan Januari yaitu sebesar 101,62 dan terendah berada pada bulan April yaitu sebesar 99,02. Dalam kondisi saat ini yang dapat dilakukan guna menjaga indeks NTPi adalah menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus menjaga harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan

biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Bibit/benih dan pakan adalah dua komponen ini yang cukup berpengaruh dan dapat diintervensi pemerintah. Oleh karenanya kebijakan terkait bibit/benih dan pakan dapat dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya. Selain itu, sistem pendistribusian hasil produksi baik benih maupun ikan konsumsi juga mesti diperhatikan saat ini karena saat ini sistem transportasi menjadi kendala dengan kondisi saat ini .

**TABEL 5. CAPAIAN NTPi TAHUN 2020**

SS-1					Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU-1					Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP								
Indikator Kinerja Pembentuk					NTPi								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
99,66	98,96	99,08	100,80	102,09	101	100,55	99,55%	-	101	99,55%	105	95,76%	

Sumber: BPS

Ket. 2015-2019: menggunakan tahun dasar 2012, dan tahun 2020 menggunakan tahun dasar 2018

Pada tahun 2020, target NTPi sebesar 101, dan realisasi sebesar 100,55 atau mencapai 99,55%.Capaian 2020 ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena pada tahun 2020 perhitungan NTPi telah menggunakan tahun dasar 2018, sedangkan untuk tahun 2015-2019 perhitungan masih menggunakan tahun dasar 2012. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra KKP 2020-2024, realisasi tersebut telah mencapai 95,76%.

### Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)

NTPG menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi. NTPG merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = It) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = Ib). Indeks harga yang diterima petambak garam (It) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan Ib adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi. NTPG diperoleh melalui pelaksanaan survei harga

NTPG yang dilaksanakan secara bulanan selama bulan Februari-Desember 2020 bila NTPG=100, berarti masyarakat mengalami impas/break even; NTPG>100, berarti masyarakat mengalami surplus; dan NTPG<100, berarti masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG dapat menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu.

**TABEL 6. CAPAIAN NTPG TAHUN 2020**

SS-1					Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU-1					Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP								
Indikator Kinerja Pembentuk					Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)								
Realisasi					2020*				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
100,42	102,23	115,5	110,14	91,19	100,25	80,68	80,48	-10,51	102,75	78,52	103,75	77,76	

Sumber. BPS (2020)

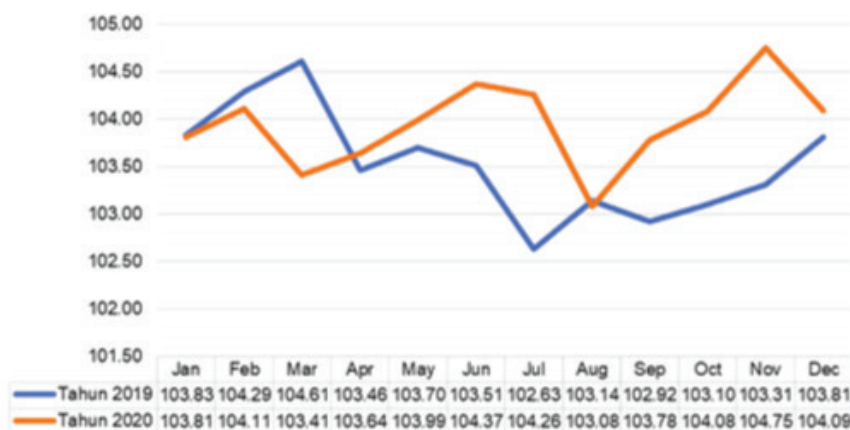
Ketidak capaian NTPG antara lain disebabkan oleh harga garam cenderung turun sehingga menurunkan pendapatan petambak, terdapat beberapa kecamatan yang tidak melakukan transaksi karena rendahnya harga garam, dan tidak dapat melaksanakan supervisi survey biaya dan harga produksi dan input hasil survey dalam aplikasi. Terhadap ketidak capaian target ini, KKP kedepan akan melakukan review hasil survei biaya dan harga produksi sebagai dasar penghitungan NTPG dan memastikan menginput hasil survey dalam aplikasi sesuai pedoman yang telah ditentukan. Selain itu perlu menjaga stabilitas harga garam sehingga petambak bisa menjual garam dan memperoleh keuntungan. Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKU NTPG, antara lain bantuan PUGAR, integrasi pergaraman, perbaikan gudang garam rakyat dan kegiatan lainnya.

### Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

NTPHP Tahun 2020 adalah sebesar 103,95 atau 100,19% dari target tahun 2020 yang ditetapkan 103,75. Capaian ini merupakan nilai rata-rata NTPHP sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 104,75, maka capaian ini setara dengan 99,24%. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata laju pertumbuhan NTPHP adalah sebesar 0,38%.

TABEL 7. CAPAIAN NTPHP TAHUN 2020

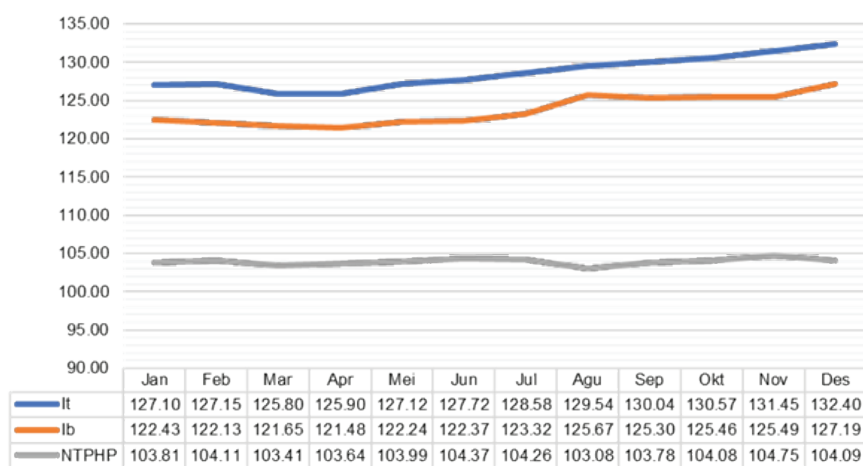
SS-1					Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat							
IKU-1					Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP							
Indikator Kinerja Pembentuk					Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)							
Realisasi					2020*				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	102,38	102,67	103,12	103,53	103,75	103,95	100,19	0,41%	103,75	103,95	104,75	99,24



GAMBAR 12. GRAFIK NTPHP BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2019-2020

Dibandingkan tahun 2019, Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) pada tahun 2020 naik sebesar 0,41% dari 103,53 pada tahun 2019 menjadi 103,95 pada tahun 2020. NTPHP yang meningkat tersebut menunjukkan bahwa kondisi usaha pengolahan ikan yang menjadi responden pada kegiatan penghitungan NTPHP mampu bertahan di tengah pandemi covid-19. Strategi yang dilakukan para pengolah dalam mempertahankan usahanya antara lain : Mengubah model pemasaran dari tatap muka menjadi *online*; Melakukan diversifikasi produk olahan dengan bahan baku yang lebih minim; Melakukan penggantian jenis ikan yang digunakan sebagai bahan baku. Pada triwulan IV nilai Indeks yang diterima (It) mengalami peningkatan yang signifikan dimana bulan Oktober meningkat sebesar 0,53 point dan meningkat terus hingga di bulan Desember mencapai 132,40 atau meningkat sebesar 2,36 dari akhir triwulan III. Hal yang sama terjadi pada nilai Indeks yang dibayarkan (Ib) yang meningkat sebesar 1,89 point dari akhir triwulan III. Nilai Ib pada bulan

Desember 2020 sebesar 127,19. Bila dibandingkan peningkatan nilai Lt yang terjadi pada triwulan IV masih lebih besar dari peningkatan nilai lb, yang artinya jumlah penerimaan para pengolah masih lebih besar daripada pengeluaran kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Namun selisih diantara keduanya tidak besar sehingga berdampak pada pergerakan nilai NTPHP di bulan tersebut.

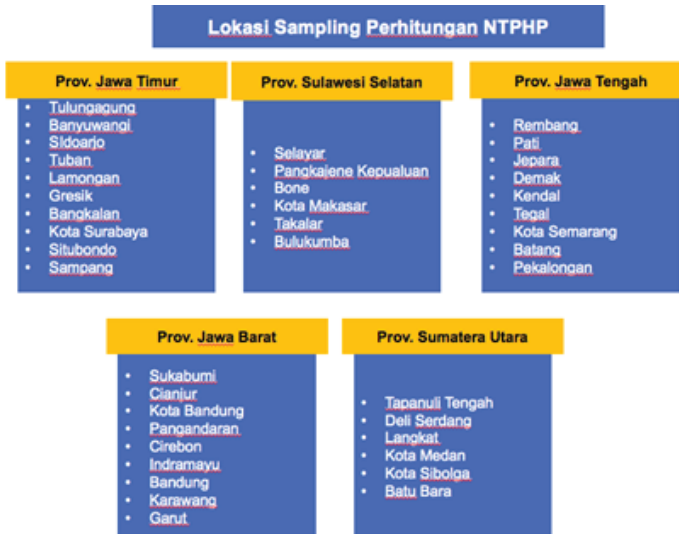


**GAMBAR 13. GRAFIK NILAI LT, LB DAN NTPHP BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2020**

Peningkatan yang terjadi pada nilai Lt dan lb tentunya berdampak pada nilai NTPHP namun tidak berarti nilai NTPHP juga mengalami peningkatan selama triwulan IV. Berdasarkan gambar diatas nilai NTPHP di awal triwulan IV (bulan Oktober) mengalami peningkatan sebesar 0,3 point dan terus meningkat di bulan November sebesar 0,67 point. Namun kondisi sebaliknya terjadi pada bulan Desember dimana nilai NTPHP mengalami penurunan sebesar 0,66 point menjadi 104,09. Kondisi ini disebabkan selisih nilai lb lebih besar dari kenaikan nilai Lt di bulan tersebut. Penyebab terjadinya kondisi tersebut bahwa harga-harga jual kebutuhan bahan pokok atau untuk operasional mengalami peningkatan yang cukup besar.

NTPHP lebih dari 100 menunjukkan bahwa kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan barang modal, artinya pendapatan pengolah hasil perikanan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya gudang penyimpanan berpendingin (*Cold Storage dan Integrated Cold Storage*), kendaraan berpendingin, *Ice Flake Machine* dan sarana lainnya telah berhasil menjadi salah satu stimulan ekonomi menyebabkan terjadinya efektivitas produksi hulu dan hilir lebih kuat, efisiensi biaya produksi dan membantu

mempertahankan kualitas bahan baku dan produk akhir sehingga harga produk akhir menjadi lebih tinggi. NTPHP Tahun 2020 merupakan nilai nasional yang dihitung melalui sampling di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 Provinsi.



**GAMBAR 14. LOKASI SAMPLING PERHITUNGAN NTPHP**

Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 1.500 kelompok yang mendapatkan pendampingan penyuluhan. Indikator kenaikan kelas mengacu pada Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 8. CAPAIAN KINERJA JUMLAH KELOMPOK PELAKU UTAMA/PELAKU USAHA YANG MENINGKAT KELASNYA (KELOMPOK)**

SS-1					Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU-1					Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP								
Indikator Kinerja Pembentuk					Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)								
Realisasi					2020*				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
4690	6321	1000	1522	1903	1500	1597	106,47	- 16,08	1500	106,47%	1500	106,47%	

Pada tahun 2020, capaian jumlah kelompok yang meningkat kelasnya sebanyak 1.597 kelompok yang naik dari pemula ke madya atau sebesar (106,47%) dari target 1.500 kelompok. Sebaran kelompok yang meningkat kelasnya berdasarkan satminkal sebagai berikut:

**TABEL 9. CAPAIAN SATMINKAL PENYULUHAN TELAH BERHASIL MENINGKATKAN KELAS KELOMPOK KP**

No	Saminkal	Dinilai Kelasnya	Meningkat Kelasnya	Persentase
1	BPPP Medan	580	223	38,45
2	BPPP Tegal	337	250	74,18
3	BPPP Banyuwangi	5075	572	11,27
4	BPPP Bitung	220	28	12,73
5	BPPP Ambon	39	26	66,67
6	BRPPUPP Palembang	1032	158	15,31
7	BRPBATPP Bogor	756	45	5,95
8	BRPBAPPP Maros	1299	91	7,01
9	BBRBLPP Gondol	215	204	94,88
	<b>Total</b>	<b>9553</b>	<b>1.597</b>	<b>16,72</b>

Capaian tahun 2020, dari sisi target telah melampaui. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, mengalami penurunan sebanyak 306 kelompok. Kondisi ini disebabkan faktor pandemi Covid-19 yang berimbas pada penurunan nilai produksi dan mempengaruhi pendapatan pelaku utama/ usaha. Keberhasilan pencapaian target antara lain adanya pendampingan yang terprogram oleh Penyuluh Perikanan, baik PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan pendampingan proses administrasi penguatan kelas kelompok.

## Sasaran Strategis (SS-2) Ekonomi sektor KP meningkat

Sasaran Strategis 2 memiliki 3 (tiga) IKU yakni IKU 2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, IKU 3 Nilai Ekspor Perikanan dan IKU 4 Konsumsi Ikan

**IKU**  
**2**

**Pertumbuhan PDB Perikanan (%)**

IKU Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2020 mencapai 0,73 persen atau tercapai 9,24 persen terhadap target sebesar 7,9 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024 dengan target 8,71 persen, capaian 2020 baru mencapai 8,35 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan pada 2020 sangat erat terkait dengan Pandemi Covid 19. Pandemi yang melanda pada akhir Maret 2020 tersebut telah mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi yang menurunkan permintaan terhadap komoditas perikanan. Di sisi lain, pandemic tersebut terjadi berbarengan dengan musim tangkapan, dimana terjadi tangkapan yang melimpah. Melimpahnya ketersediaan yang dibarengi dengan rendahnya permintaan tersebut mengakibatkan melemahnya harga komoditas perikanan. Lemahnya permintaan akibat pandemic tersebut mencapai titik terendah pada pertengahan triwulan kedua, sehingga sektor perikanan mengalami pertumbuhan negatif. Namun seiring dengan menguatnya permintaan dan harga komoditas perikanan, maka sektor perikanan kembali ke jalur pertumbuhan positif seperti dicatatkan pada triwulan 4. Sehingga secara total, sektor perikanan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0.73 % sepanjang tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, pertumbuhan tertinggi dicatatkan pada TW I sebesar 3,52 persen, dan paling rendah pada TW III sebesar -1,03 persen.

**TABEL 10. REALISASI PERTUMBUHAN PDB PERIKANAN**

SS-2					Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU-2					Pertumbuhan Produk Domestik Bruto								
Realisasi					2020*				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
7,89	5,19	5,7	5,19	5,73	7,9	0,73	9,24%	-87,26	7,9	9,24%	8,71	8,38%	



**TABEL 11. PERBANDINGAN PERTUMBUHAN PDB PERIKANAN TAHUN 2020 TERHADAP PDB NASIONAL PDB PERTANIAN, KEUTANAN DAN PERIKANAN**

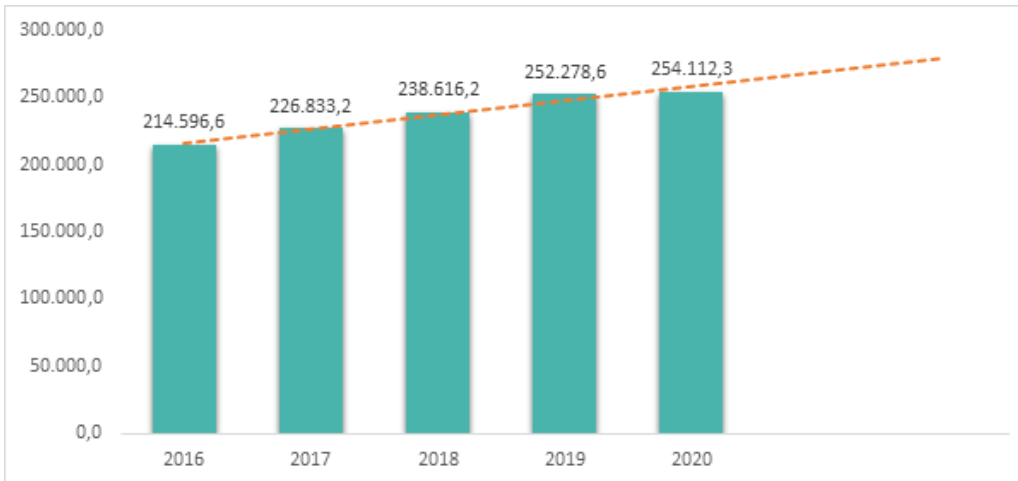
LAPANGAN USAHA	2020**				
	I	II	III	IV	JUMLAH
<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>0,01</b>	<b>2,20</b>	<b>2,16</b>	<b>2,59</b>	<b>1,75</b>
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-1,19	2,80	3,08	3,65	2,11
a. Tanaman Pangan	-10,29	9,24	7,18	10,47	3,54
b. Tanaman Hortikultura	2,61	0,94	5,74	7,85	4,17
c. Tanaman Perkebunan	3,97	0,17	0,67	1,13	1,33
d. Peternakan	2,70	-1,89	-0,22	-1,86	-0,33
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-1,45	2,34	2,44	3,14	1,60
Kehutanan dan Penebangan Kayu	5,31	2,23	-1,62	-5,42	-0,03
Perikanan	3,52	-0,63	-1,03	1,06	0,73
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO NASIONAL</b>	<b>2,97</b>	<b>-5,32</b>	<b>-3,49</b>	<b>-2,19</b>	<b>-2,07</b>

Sumber: BPS (2020)

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB Nasional Tahun 2020 yaitu sebesar -2,07 persen, pertumbuhan PDB Perikanan cenderung masih tumbuh lebih positif. Sedangkan apabila dibandingkan dengan kelompok lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan lainnya PDB Perikanan juga masih cenderung positif mengingat beberapa lapangan usaha lainnya seperti Pertumbuhan PDB Peternakan sebesar -0,33%, dan Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar -0,03%.



**GAMBAR 15. PERTUMBUHAN PDB PERIKANAN 2015-2020 (SUMBER: BPS)**



GAMBAR 16. GRAFIK TREN NILAI PDB PERIKANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) TAHUN 2016-2020

Berdasarkan Nilai, PDB Perikanan Atas Dasar harga Konstan (ADHK) tahun 2020 adalah sebesar Rp 254.112 miliar di tahun 2020. Nilai PDB Perikanan atas Dasar harga Konstan (ADHK) terus tumbuh positif yaitu dari Rp 204.016 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 252.278 miliar pada tahun 2019 dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi sebesar 254.112 miliar.

TABEL 12. NILAI PDB PERIKANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN DAN BERLAKU TAHUN 2020

LAPANGAN USAHA	2019*					2020**				
	I	II	III	IV	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	478.606,8	637.762,2	646.917,0	449.888,0	2.012.742,8	603.603,2	689.767,2	671.688,0	470.237,7	2.116.088,1
1 Perikanan, Peternakan, Perburuan	353.820,7	400.002,8	412.322,2	313.744,0	1.488.985,7	308.308,5	437.213,8	430.433,5	332.931,0	1.574.077,4
a. Tanaman Pangan	120.054,3	130.004,3	118.575,9	71.772,8	440.407,3	115.438,8	153.555,5	128.572,7	70.388,8	473.953,8
b. Tanaman Hortikultura	51.470,4	65.004,2	67.711,8	53.045,1	238.830,5	50.034,1	60.813,4	60.182,0	57.527,7	250.457,8
c. Tanaman Perkebunan	100.074,3	140.411,1	151.544,4	118.578,0	517.507,8	123.138,3	143.910,0	103.480,8	120.003,5	500.202,2
d. Peternakan	62.077,9	65.204,9	60.545,0	62.931,2	250.840,0	65.350,5	64.990,7	67.187,4	62.052,0	260.189,0
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	7.240,8	7.598,3	7.044,5	6.510,9	20.300,5	7.527,8	7.043,0	8.001,0	6.701,0	30.174,0
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	22.480,0	20.302,7	28.275,3	27.003,3	104.121,0	25.487,5	28.336,7	28.006,2	28.130,4	108.030,8
3 Perikanan	102.198,3	102.298,7	108.219,5	108.920,7	419.638,2	108.837,2	104.208,7	108.458,3	111.198,7	431.488,9
PRODUK DOMESTIK BRUTO	3.782.620,8	3.064.101,2	4.087.226,6	4.018.490,8	15.832.535,4	3.922.556,8	3.887.806,7	3.804.617,1	3.020.171,2	15.434.151,8
Persentase PDB perikanan										
Persentase terhadap kelompok	21,30	19,02	19,43	24,22	20,85	21,77	18,20	18,83	23,64	20,40
Persentase terhadap PDB	2,70	2,58	2,61	2,71	2,85	2,80	2,83	2,73	2,83	2,80
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	322.418,1	388.780,6	370.680,8	294.868,9	1.364.986,1	322.460,7	374.813,2	378.673,7	302.293,7	1.378.131,3
1 Perikanan, Peternakan, Perburuan	245.780,1	288.827,7	290.318,0	214.107,5	1.038.902,9	242.867,0	290.715,0	290.256,2	221.084,0	1.000.823,1
a. Tanaman Pangan	80,035,1	88.508,0	78,013,7	45,036,2	202,883,0	71,705,8	90,780,8	84,257,7	50,413,1	303,247,4
b. Tanaman Hortikultura	34,381,8	42.550,7	42.523,4	33,602,9	153,157,8	35,278,2	42,001,2	44,063,0	36,338,0	150,530,3
c. Tanaman Perkebunan	85,315,3	100,322,5	120,706,3	80,803,4	405,147,5	88,700,4	100,511,2	121,520,0	90,820,0	410,553,4
d. Peternakan	41,082,0	42,817,7	43,025,7	40,711,0	167,837,0	42,100,2	42,007,1	42,932,4	30,955,1	167,084,8
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	4,974,3	5,320,8	5,440,5	4,323,1	20,076,7	4,002,4	5,454,7	5,582,2	4,458,0	20,398,2
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	14,328,1	15,002,7	16,018,8	15,978,0	63,217,0	15,089,2	16,340,8	16,044,2	15,112,7	63,195,0
3 Perikanan	62,300,9	62,140,1	63,323,2	64,614,4	262,278,8	64,484,6	61,748,4	62,873,3	66,198,1	264,112,3
PRODUK DOMESTIK BRUTO	2.826.126,7	2.736.403,1	2.818.721,6	2.789.787,6	10.848.037,8	2.703.148,0	2.689.818,1	2.720.478,6	2.708.897,1	10.722.442,7
Perikanan	5,00	0,07	0,06	5,50	5,73	3,52	-0,63	-1,03	1,00	0,73
Kelompok Pertanian	1,78	0,28	0,07	4,26	3,81	0,01	2,20	2,18	2,69	1,76
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,08	6,06	6,01	4,98	6,02	2,87	-6,32	-3,49	-2,19	-2,07



### Nilai Ekspor Hasil Perikanan

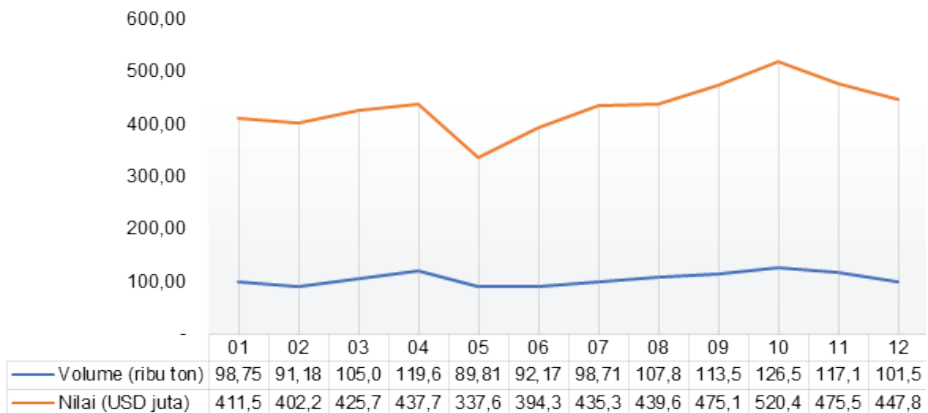
Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode HS (*Harmonized System*) tahun 2017 sebanyak 482 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL 13. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA NILAI EKSPOR HASIL PERIKANAN**

SS-2					Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU-3					Nilai ekspor hasil perikanan								
Realisasi					2020*				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
3,95	4,17	4,52	4,86	4,94	6,17	5,20	84,28%	5,26	6,17	84,28%	8,71	59,70%	

\*angka sementara s.d Bulan Desember 2020  
Sumber Data : BPS (diolah)

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sampai Desember 2020 mencapai USD 5,20 miliar (angka sementara). Capaian tersebut setara dengan 84,28% terhadap target tahun 2020 (USD 6,17 Miliar). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (USD 4,94 Miliar), maka capaian ini meningkat sebesar 5,26%.



Sumber : BPS, Januari 2021 (angka sementara)

**GAMBAR 17. VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN (JANUARI-DESEMBER TAHUN 2020)**

Nilai ekspor hasil perikanan Desember 2020 (angka sementara) mencapai USD 447,80 juta atau turun sebesar 5,84% jika dibanding November 2020. Hal ini disebabkan adanya penurunan volume ekspor hasil perikanan untuk beberapa komoditas utama ekspor seperti Rumput Laut dari 28,92 ribu ton menjadi 19,71 ribu ton, Tuna-Tongkol-Cakalang dari 19,53 ton menjadi 17,62 ribu ton, dan Rajungan-Kepiting dari 2,52 ribu ton menjadi 2,38 ribu ton.

**TABEL 14. VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN BERDASARKAN KOMODITAS TAHUN 2020**

Komoditas	Volume (Kg)	%	Nilai (USD)	%
Cumi-Sotong-Gurita	193.790.380,17	15,36	604.062.604,31	11,61
Rajungan-Kepiting	30.804.620,27	2,44	374.674.726,66	7,20
Rumput Laut	234.178.082,48	18,56	344.322.574,13	6,62
Tuna-Tongkol-Cakalang	236.373.921,54	18,73	903.306.812,70	17,36
Udang	251.373.870,00	19,92	2.064.612.816,04	39,68
Lainnya	315.417.310,39	24,99	912.145.676,35	17,53
<b>Total</b>	<b>1.261.938.184,86</b>		<b>5.203.125.210,19</b>	

Sumber Data : BPS, Januari 2021 (angka sementara)

**TABEL 15. VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN BERDASARKAN NEGARA TUJUAN EKSPOR**

Negara Tujuan Ekspor	Volume (Kg)	%	Nilai (USD)	%
China	422.564.876,29	33,49	817.368.894,78	15,71
Japan	99.716.581,67	7,90	608.949.139,56	11,70
United States	238.406.910,73	18,89	2.096.754.229,97	40,30
Lainnya	501.249.816,18	39,72	1.680.052.945,88	32,29
<b>Total</b>	<b>1.261.938.184,86</b>		<b>5.203.125.210,19</b>	

Sumber Data : BPS, Januari 2021 (angka sementara)

Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 didominasi komoditas udang dengan kontribusi mencapai 39,68% atau sebesar USD 2,06 Miliar. Berdasarkan negara tujuan ekspor, Amerika Serikat (AS) masih menjadi pasar terbesar dengan kontribusi mencapai 40,30% atau USD 2,1 Miliar. Dari nilai tersebut, sebanyak USD 1,45 Miliar dihasilkan dari ekspor komoditas udang ke Amerika Serikat. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan antara lain:

a. *Virtual Exhibition-Trade Expo Indonesia (VE-TEI) Tahun 2020*



**GAMBAR 18. VIRTUAL EXHIBITION-TRADE EXPO INDONESIA (VE-TEI) KE-35 TAHUN 2020**

Selama pameran berlangsung, Paviliun Indonesia Seafood dikunjungi secara virtual oleh sekitar 350 orang dari 27 negara. Selama 6 (enam) hari pameran, potensi transaksi tercatat sebesar USD 732.000 untuk produk *canned sardine* dan *canned tuna*.

- b. Pembahasan Persiapan Perundingan *Fisheries-Subsidies* WTO
- c. Penyusunan Posisi Indonesia pada Perundingan Indonesia-Bangladesh PTA
- d. Penanganan Hambatan Ekspor Terkait Regulasi Pemerintah Amerika Serikat *Marine Mammal Protection Act* (MMPA)
- e. Pembahasan *Essential Goods* of ASEAN
- f. Persiapan Perundingan Indonesia-Turkey CEPA
- g. Penyusunan Posisi Indonesia pada Sidang *Joint Trade Commission* Indonesia-Kuwait
- h. *Virtual Business Matching Event for Indonesian Exporters and Singapore Importers: Fisheries Products*
- i. Pertemuan *1st Joint Technical Committee Meeting on Marine and Fisheries Cooperation RI-Persatuan Emirat Arab* (PEA)
- j. *Focus Group Discussion* dalam rangka *Joint Trade Review* Indonesia-United Kingdom;
- k. *Workshop Remote Assessment in Fisheries Inspection and Certification*;
- l. Submisi ke Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan Investigasi USITC mengenai Dampak IUU-Fishing bagi Domestik AS;
- m. Finalisasi Posisi Indonesia pada *Joint Working Group on Trade, Investment, Handicraft and Shipping* (JWG-TIHS) Filipina-Indonesia ke-8;
- n. Penanganan Isu *Non-Tariff Measures* (NTMs) dalam kerangka Indonesia - EU *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA);
- o. *Indonesia-Singapore Agrobusiness Working Group* (ISAWG) Ke-16;

- p. Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia dalam Kerjasama Indonesia-Tunisia PTA;
- q. Persiapan dan Pelaksanaan *Regional Workshop on Assessing the Needs of AMS in Implementing the FAO Small Scale Fisheries Guidelines to Support Access to Markets*;
- r. Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting melalui sertifikasi kelayakan UPI antara lain dengan telah diterbitkannya sebanyak Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 3.044 SKP s.d Desember 2020 dengan sebaran sebagaimana peta sebagai berikut :



**GAMBAR 19. SEBARAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) MENURUT PROVINSI**

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Belum optimalnya pengawalan dan koordinasi dengan stakeholder dalam pemenuhan berbagai regulasi impor SHTI dan kekerangan untuk pasar Uni Eropa
2. Beberapa produk perikanan Indonesia dinilai belum memenuhi standar kualitas pasar Jepang.
3. Amerika Serikat semakin memperketat kriteria dan kualitas produk impornya, seperti jaminan keamanan produk perikanan dan non-IUU, *sustainability* dan *traceability*.
4. Potensi diversifikasi tujuan pasar non-tradisional (Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin) masih mengalami hambatan, mengingat Indonesia belum mempunyai *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* sehingga akses pasar ke kawasan tersebut belum terbuka secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan, antara lain :

1. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri termasuk dengan KBRI, Atase perdagangan dalam penyiapan posisi runding Indonesia untuk sektor KP di berbagai forum perundingan dan Kementerian Perdagangan terkait dukungan penyebarluasan informasi direktori peserta pameran kepada buyers dan mitra dagang potensial di negara mitra dagang;
2. Mendorong penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan dan *supplier*, serta penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik;
3. Peningkatan jejaring internasional melalui promosi dagang seperti partisipasi dalam pameran internasional.
4. Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, rajungan dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor;
5. Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk ekspor yang didukung dengan hasil riset dan *market intelligence*;
6. Percepatan penyelesaian hambatan ekspor dan perluasan pasar ekspor;
7. Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan Indonesia melalui forum perundingan perdagangan, baik secara bilateral, regional maupun multilateral;
8. Memanfaatkan peluang pasar ekspor di Timur Tengah, Afrika dan Rusia; dan memperbaiki distribusi pasokan bahan baku.



### Konsumsi Ikan

IKU Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan negara permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Target konsumsi ikan per kapita nasional tahun 2020 adalah sebesar 56,39 kg/kapita dan telah tercapai 100%.





Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020 dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan antara lain :

- 1) Bazar produk perikanan pada tanggal 2-3 Januari 2020, 13-14 Februari 2020, dan 5-6 Maret 2020. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan bazar produk perikanan tidak dapat dilaksanakan selama bulan April s.d Desember 2020.



**GAMBAR 21. BAZAR PRODUK PERIKANAN SELAMA TAHUN 2020**

- 2) Kampanye Gemarikan di 107 lokasi dari total target 55 lokasi. Rangkaian kegiatan kampanye gemarikan yang dilaksanakan meliputi Edukasi manfaat makan ikan, games dan kuis gemarikan, Penyampaian paket gemarikan berisi 3 olahan ikan, Makan siang bersama dengan menu ikan, snack dan kudapan, Pembagian materi promosi berupa flyer manfaat ikan, flyer kandungan gizi ikan, tumbler gemarikan, tas lipat, tempat pensil ikan dan Demo masak di Mobil AT1 dengan materi pembuatan produk olahan ikan, dengan harapan makin banyak masyarakat yang tertarik untuk menyediakan menu makanan berbahan baku ikan di rumah, sekolah, katering, dan sebagainya.



**GAMBAR 22. KAMPANYE GEMARIKAN SELAMA TAHUN 2020**



Meskipun telah mencapai target yang telah ditetapkan, upaya peningkatan konsumsi ikan mengalami beberapa kendala diantaranya :

- a. Di beberapa wilayah tertentu kebiasaan masyarakat untuk makan ikan sangat rendah, bahkan ada suku tertentu yang pantang makan ikan;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan;
- c. Rendahnya suplai ikan di beberapa wilayah;
- d. Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas; dan
- e. Diversifikasi produk hasil perikanan yang belum bisa memenuhi tuntutan konsumen.

Guna mendukung peningkatan konsumsi ikan, KKP menginisiasi berbagai program/kegiatan pembangunan yang dititikberatkan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan produk hasil perikanan dengan kualitas baik (*supply*) melalui Pembangunan *Cold Storage*, pengadaan perlengkapan pedagang ikan, pembinaan mutu pada UMKM kelautan dan perikanan, melakukan layanan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun baik di sentra produksi maupun di sentra konsumen/industri dengan mutu baik dan harga stabil.
- b. Mendukung kemudahan masyarakat dalam menjangkau hasil perikanan (*accessibility*) melalui Pembangunan pasar ikan di daerah potensial dan Pengadaan kendaraan roda dua dan roda tiga.
- c. meningkatkan ragam produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen.

### **Sasaran Strategis (SS-3) Sumber daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan**

Sasaran Strategis 3 memiliki 2 (dua) IKU yakni IKU 5 Proporsi Tangkapan jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman dan IKU 6 yaitu Luas Kawasan Konservasi Perairan.



### Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

IKU Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman merupakan indikator baru di tahun 2020 untuk mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu. Adapun perhitungan IKU ini adalah dari jumlah volume produksi pada saat tahun berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan (Kepmen KP NOMOR 50/KEPMEN-KP/2017). Sebagai data pembanding, perhitungan indikator Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman didukung oleh 2 kegiatan yaitu, logbook penangkapan ikan (LBPI) dan Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer).

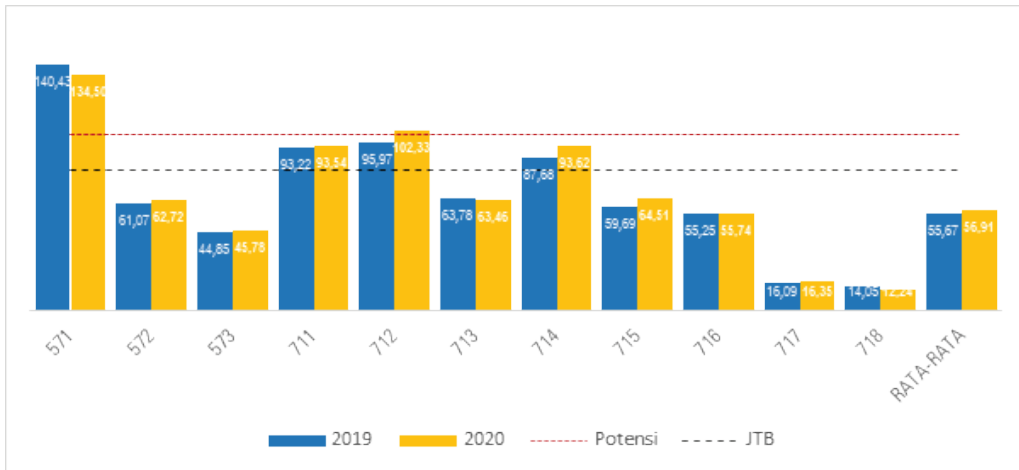
Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana terkait tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penangangan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

**TABEL 17. CAPAIAN IKU “PROPORSI TANGKAPAN JENIS IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN” TAHUN 2020**

SS-3					Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan								
IKU-5					Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman								
Realisasi					2020*				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	-	≤64	56,91	111,08	-	≤64	111,08	80	128,86	

Realisasi Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah sebesar 56,91 atau telah mencapai 111,08% atau sebesar 120% dalam aplikasi kinerjaku. Capaian ini masih berada dalam batas biologis yang aman, namun tidak menurunkan kondisi ekonomi pelaku usaha di bidang perikanan

tangkap. Hal ini menandakan bahwa potensi sumber daya ikan belum dioptimalkan karena penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional masih di sekitar teluk dan pantai serta tingkat pemanfaatan sumber daya ikan masih dibawah nilai MSY. Tingkat pemanfaatan masih dalam status lestari sehingga perlu diupayakan pengelolaan perikanan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.



**GAMBAR 23. GRAFIK PROPORSI TANGKAPAN JENIS IKAN TAHUN 2019-2020 TERHADAP POTENSI DAN JTB**

Pada gambar di atas menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah melampaui potensi yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan data potensi yang diterbitkan hanya menggunakan 9 (sembilan) kelompok jenis ikan, yaitu Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan dan Cumi-cumi.

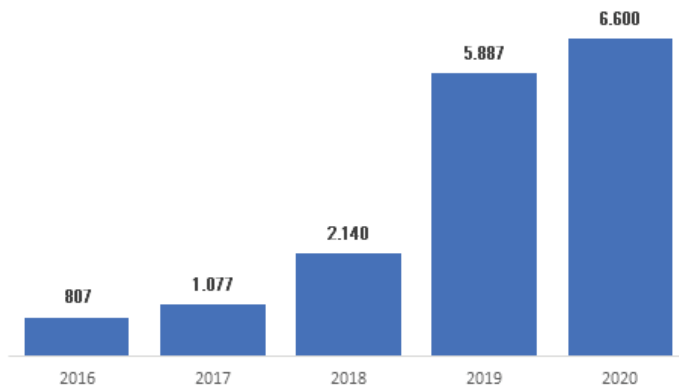
Sedangkan data volume produksi yang digunakan adalah total jenis ikan termasuk spesies Tuna, Cakalang, Ubur-ubur, Penyu, Binatang berkulit keras, Kekerangan, Sotong, Gurita, Teripang dan Rumpun Laut. Namun, secara keseluruhan tingkat pemanfaatan perikanan laut di Indonesia masih dibawah jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) atau masih dikatakan belum optimum. Hal ini diperkirakan disebabkan karena terdapat lebih dari 90 persen armada kapal ikan Indonesia terkonsentrasi di perairan pesisir dan laut dangkal seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Bali, dan pesisir selatan Sulawesi.

Wilayah-wilayah tersebut sebagian besar telah mengalami kelebihan tangkap. Jika laju penangkapan ikan seperti sekarang berlanjut, tangkapan per kapal akan menurun, nelayan semakin miskin, dan sumber daya ikan pun punah seperti ikan

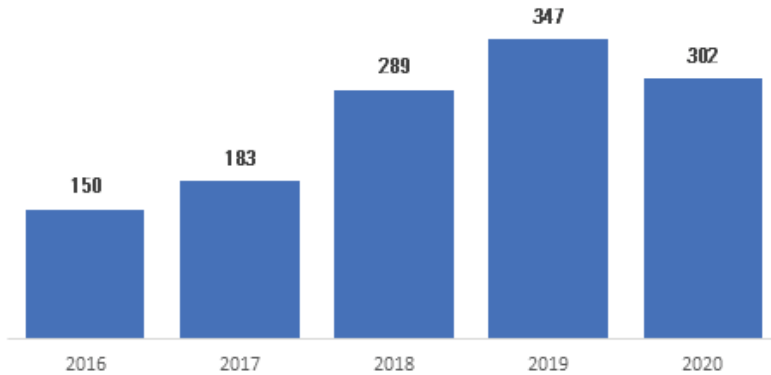
terubuk di Selat Malaka dan ikan terbang di pesisir selatan Sulawesi. Sebaliknya, jumlah kapal ikan Indonesia yang beroperasi di laut lepas, laut dalam, dan wilayah perbatasan seperti Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Seram, Laut Banda, Samudra Pasifik, Laut Arafura, dan Samudra Hindia hanya terbatas.

Oleh karenanya laju penangkapan ikan di perairan yang telah kelebihan tangkap harus dikurangi dan secara bersamaan memperbanyak armada kapal ikan modern untuk beroperasi di wilayah perairan yang masih *underfishing* atau yang selama ini dijajah nelayan asing. Semua ini akan membantu pengembangan ekonomi daerah berbasis perikanan tangkap. Indikator ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-14 Ekonomi Kelautan. Dalam mendukung indikator ini, KKP telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kegiatan pendataan, yaitu penambahan kegiatan pendataan yang bukan lagi berbasis pada data hasil tangkapan melainkan pada data yang berbasis daerah penangkapan. Selain untuk penguatan pendataan, kegiatan ini juga bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan agar penangkapan dan pengangkutan ikan dapat berlangsung secara terus menerus, berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan *log book* penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penanganan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.



**GAMBAR 24. GRAFIK PERKEMBANGAN KEGIATAN LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN TAHUN 2016-2020**



**GAMBAR 25. GRAFIK PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN TAHUN 2016-2020**

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian IKU tersebut tahun 2020, antara lain:

- Pelaksanaan dan pembahasan Analisis Data LBPI Semester I Tahun 2020;
- Peningkatan validasi data log book penangkapan ikan;
- Rapat koordinasi penempatan *observer* diatas kapal *long line*;
- Rapat Koordinasi Pengembangan e-Borang;
- Seleksi Berkas Pelamar *Observer on Board*;
- Evaluasi pelaksanaan Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020;
- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon *Observer* TA 2020;
- Persiapan Pemasangan *e Monitoring* di Atas Kapal Perikanan;
- Penyampaian surat hasil verifikasi dan validasi data *log book* penangkapan ikan kepada pelaku usaha dan pelabuhan perikanan.
- Sosialisasi Kepdirjen Perikanan Tangkap tentang Kuota Sumber Daya Ikan dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI;

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari permasalahan/kendala, antara lain:

- Masih terdapat ketidaksinkronan antara data dan tampilan dalam aplikasi;
- Kurang optimalnya proses analisis;
- Belum semua nakhoda menggunakan *e-log book*;
- Keterbatasan anggaran untuk pemantauan jumlah hari layar yang lebih lama;
- Aplikasi pendataan elektronik belum bisa digunakan secara optimal;
- Masih banyak pihak daerah yang belum memahami terkait dengan pemanfaatan dan implementasi kuota yang telah ditetapkan;

7. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha;
8. Belum semua daerah memahami pendataan secara elektronik.

Menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut akan dilaksanakan beberapa upaya, yaitu:

1. Meningkatkan penerapan LBPI di pelabuhan, melalui kontinuitas penyampaian penilaian pelabuhan;
2. Meningkatkan kualitas data LBPI melalui perbaikan standar verifikasi, validasi;
3. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui rekomendasi perpanjangan izin;
4. Pelaksanaan pengolahan dan analisis LBPI;
5. Percepatan penempatan Observer dengan memperhatikan kondisi Indonesia yang sedang darurat COVID-19;
6. Meningkatkan kerjasama dengan Asosiasi/Pemilik kapal untuk penempatan Observer;
7. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka implementasi dan evaluasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan;
8. Sosialisasi Kepdirjen Perikanan Tangkap tentang Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan;
9. Sosialisasi dan Evaluasi mekanisme pelaksanaan pengelolaan Benih Benur Lobster (BBL).



### Luas Kawasan Konservasi perairan

Jumlah Luas Kawasan Konservasi merupakan luas kawasan konservasi yang dikelola dan dimanfaatkan selama tahun 2020. IKU Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan adalah jumlah penambahan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan melalui Surat Keputusan Kepala

Daerah atau Surat Keputusan Menteri yang diatur melalui beberapa tahapan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Target indikator kinerja penambahan luas kawasan konservasi perairan baru yang telah dicadangkan melalui SK Kepala Daerah pada tahun 2020 seluas 700.000 ha. Pembentukan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengelola sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Luas kawasan konservasi adalah luas kumulatif kawasan konservasi perairan nasional (KKPN dan Kawasan Konservasi Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) dan daerah (KKPD) yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau dicadangkan oleh Kepala Daerah.

Sampai dengan tahun 2020, realisasi luas kawasan konservasi adalah 24.111.040,57 hektar atau 103,03% dari target luas kawasan konservasi tahun 2020, yaitu 23,4 juta hektar. Dengan capaian 24,11 juta hektar, maka luasan ini telah tercapai 89,63% dari target Renstra yaitu 26,9 juta hektar.

**TABEL 18. CAPAIAN IKU LUAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020**

SS-3					Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan								
IKU-6					Luas kawasan konservasi perairan								
Realisasi					2020*				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
17,3	17,9	19,1	20,87	23,14	23,4	24,11	103,03%	419%	23,4	103,03%	26,9	89,63%	

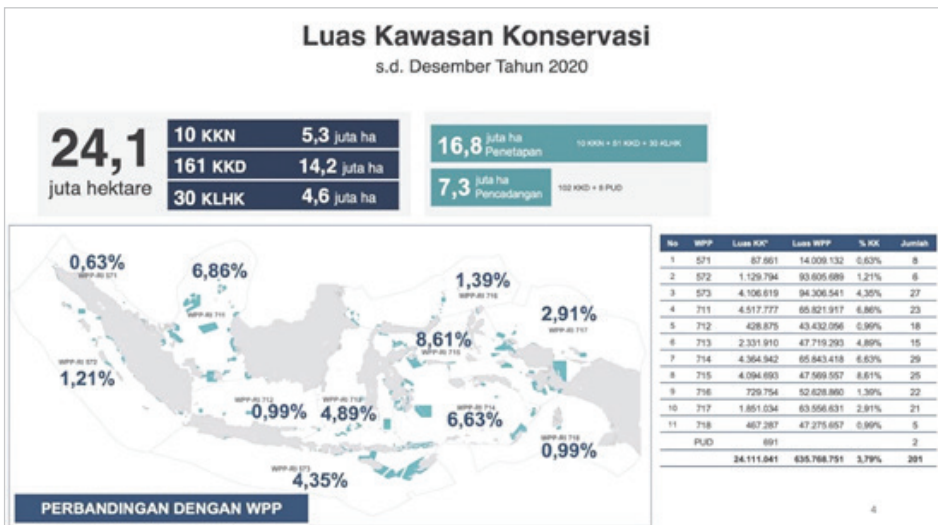
Penambahan luasan kawasan konservasi sebesar 964.665,76 Hektar di tahun 2020 berasal dari:

- penambahan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) baru seluas 833.046,74 hektar, yaitu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), yaitu Seram Utara Barat Maluku dan KKPD Pulau Kur, Tayando, Tam Maluku 213.212 ha, KKPD Maskegara 135.300 ha, KKPD Pulau Buano 25.064,74 ha dan KPD Pulau Kolepom 353.387 ha.
- penyesuaian luasan karena pencadangan ulang oleh Gubernur sehingga terjadi pengurangan luasan dari luasan sebelumnya seluas (-50.288,38 hektar), yaitu KKPD Tanjung Cantik dan Pulau Sinelak, KKPD Kepulauan Tanimbar/Yamdena, KKPD Nias Utara, Selat Pantar, KKPD Sikka, dan KKPD Bontang. Selain penyesuaian luasan KKPD, terdapat pula penyesuaian luasan di kawasan konservasi yang dikelola oleh KLHK sebesar -70.566 hektar.
- penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan hingga akhir Desember 2020 seluas 256.473,40 hektar.



TABEL 19. RINCIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020

No	Kawasan Konservasi	Jumlah	Luas (ha)
<b>A</b>	<b>Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan</b>	<b>10</b>	<b>5.342.023,02</b>
1	Taman Nasional Perairan	1	3.355.352,82
2	Suaka Alam Perairan	3	445.630,00
3	Taman Wisata Perairan	6	1.541.040,20
<b>B</b>	<b>Dikelola Pemerintah Provinsi</b>	<b>161</b>	<b>13.950.370,68</b>
4	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	153	13.949.677,46
5	Perairan Umum Daerah	8	693,22
<b>C</b>	<b>Dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	<b>30</b>	<b>4.632.009,30</b>
6	Taman Nasional Laut	7	3.968.975,30
7	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
8	Suaka Margasatwa Laut	4	5.400,00
9	Cagar Alam Laut	5	91.820,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>201</b>	<b>24.111.040,57</b>



GAMBAR 26. LUAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020

Pencapaian luasan ini juga sangat berkontribusi besar pada Aichi target 10% luas perairan yang menjadi kawasan konservasi. Tercapainya luasan ini merupakan keberhasilan KKP dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi, kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara KKP dengan pemerintah provinsi, kementerian/lembaga



terkait, dan mitra terbukti sangat meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini. Selain itu juga, KKP juga terus-menerus melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra potensial sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian luasan kawasan konservasi diantaranya pencapaian masih menghitung antara luas berdasarkan penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan dan pencadangan oleh Kepala Daerah, yang berdampak pada perubahan/penyesuaian luasan konservasi yang sudah dicadangkan oleh Gubernur dan luas penetapan kawasan konservasi. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya percepatan penetapan KKPD dan melakukan percepatan penyelesaian kegiatan pendukung operasionalisasi kawasan konservasi dilakukan secara dalam jaringan (*online*).

Perubahan yang positif (terkait usulan penetapan dari pencadangan Gubernur yang mengarah pada pencapaian target luas kawasan lebih cepat dari tahun berjalan) akan didorong untuk percepatan proses penetapan sehingga dapat dilakukan operasionalisasi kawasan konservasi, sedangkan perubahan negative (terkait hasil evaluasi yang belum memenuhi kriteria penetapan) akan difasilitasi dengan percepatan penetapan kawasan konservasi perairan prioritas di tahun berjalan. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya percepatan penetapan kawasan konservasi prioritas dan melakukan penyesuaian kegiatan sekaligus penyelesaian kegiatan pendukung operasionalisasi kawasan konservasi dilakukan secara dalam jaringan (*online*).

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKU selama tahun 2020 diantaranya :

1. Fasilitasi penetapan kawasan konservasi dengan adanya penambahan kawasan baru melalui Pencadangan oleh Gubernur
2. Pendampingan penetapan kawasan konservasi di kawasan target untuk pemenuhan target penambahan luas kawasan konservasi.
3. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
4. Percepatan penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat penetapan kawasan konservasi

Pembentukan kawasan konservasi ini juga didukung kemitraan dengan LSM yang memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses

penetapan kawasan konservasi, antara lain penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ).

## INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

### Sasaran Strategis (SS-4) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat

Sasaran Strategis 4 memiliki 1 (satu) IKU yakni IKU 7 Persentase Lulusan Pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia Usaha dan dunia industri/DUDI



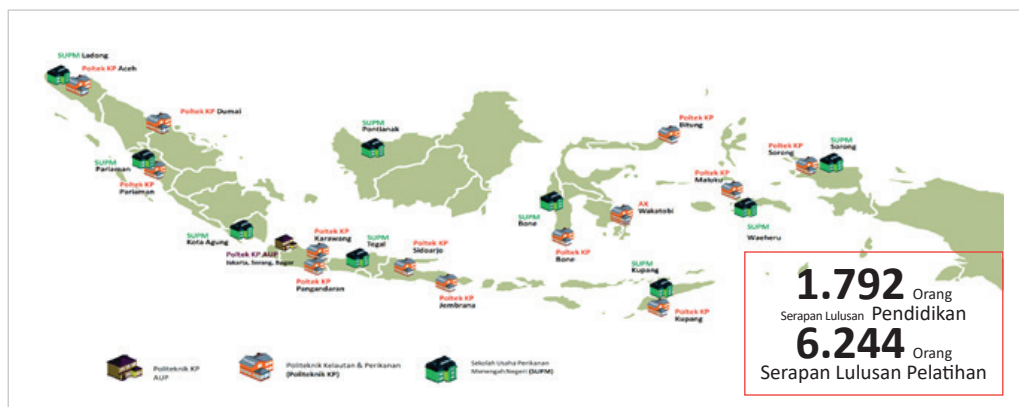
#### Persentase Lulusan Pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia usaha dan dunia industri/DUDI

IKU Persentase Lulusan Pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia usaha dan dunia industri/DUDI menggambarkan persentase lulusan pendidikan yang terserap dunia usaha dan dunia industri/DUDI serta jumlah lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di DUDI. Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 60%. Capaian IKU Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai berikut:

**TABEL 20. PERSENTASE LULUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG TERSERAP DI DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI (DUDI) (%)**

SS-4					Kapasitas dan Kompetensi SDM KP Meningkat								
IKU-7					Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri / DUDI (Persen)								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capain thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	-	60%	54,82%	91,37%	-	60	91,37%	75%	73,09%	

Realisasi persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di dunia usaha dan dunia industri pada tahun 2020 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 54,82% atau mencapai 91,73%. Realisasi tersebut diperoleh dari 1.792 orang lulusan pendidikan dan 6.244 orang lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang terserap di dunia usaha dan dunia industri. Apabila dibandingkan dengan target 2024 yaitu sebesar 75%, realisasi ini masih mencapai 73,09%. Indikator ini merupakan IKU baru di tahun 2020, sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



**GAMBAR 27. SEBARAN LOKASI UPT YANG MENUNJANG LULUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG TERSERAP DI DUDI**

Distribusi serapan lulusan pada satuan pendidikan KP Tahun 2020 sebagai berikut:

**TABEL 21. SEBARAN SERAPAN LULUSAN SATUAN PENDIDIKAN KP TAHUN 2020**

No	Satuan Kerja	Lulusan Pendidikan Tahun 2020	Lulusan Terserap	Persentase
1	Politeknik AUP Jakarta	448	289	64,51
2	Politeknik KP Sidoarjo	150	114	76,00
3	Politeknik KP Bitung	140	111	79,29
4	Politeknik KP Sorong	88	69	78,41
5	Politeknik KP Karawang	71	54	76,06
6	Politeknik KP Bone	88	70	79,55
7	Politeknik KP Kupang	70	54	77,14
8	Politeknik KP Dumai	70	53	75,71
9	Politeknik KP Pangandaran	75	57	76,00
10	Politeknik KP Jemberana	74	31	41,89
11	AK Wakatobi	49	38	77,55
12	SUPM Ladong	113	85	75,22

No	Satuan Kerja	Lulusan Pendidikan Tahun 2020	Lulusan Tersetap	Persentase
13	SUPM Pariaman	154	121	78,57
14	SUPM Kotaagung	128	96	75,00
15	SUPM Tegal	176	114	64,77
16	SUPM Pontianak	138	92	66,67
17	SUPM Bone	142	62	43,66
18	SUPM Waiheru	167	134	80,24
19	SUPM Sorong	120	90	75,00
20	SUPM Kupang	77	58	75,32
<b>Total</b>		<b>2.538</b>	<b>1.792</b>	<b>70,61</b>

Capaian jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di DUDI dihasilkan oleh 5 (lima) BPPP, dengan rincian target dan realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**TABEL 22. SEBARAN JUMLAH LULUSAN PELATIHAN YANG MASYARAKAT KP YANG TERSERAP DUDI**

No	Satuan Kerja	Lulusan Pelatihan Masyarakat KP	Tersetap Dudi	Persentase
1	BPPP Medan	2.224	1.245	55,98
2	BPPP Tegal	3.045	1.788	58,72
3	BPPP Banyuwangi	3.329	1.570	47,16
4	BPPP Bitung	2.357	923	39,16
5	BPPP Ambon	1.165	718	61,63
<b>Total</b>		<b>12.120</b>	<b>6.244</b>	<b>51,52</b>

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain oleh :

1. Penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan pada awal tahun, yang bertujuan untuk menyiapkan SDM calon maupun penerima program bantuan KKP dan untuk mendukung program-program prioritas KKP.
2. Adanya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk lulusan pelatihan penangkapan ikan (BST, Ankapin, Atkapin,dll) dan perusahaan olahan hasil perikanan.
3. Adanya pendampingan bagi lulusan pelatihan oleh penyuluh di Kab/kota sehingga hambatan dalam usaha kelautan dan perikanan dapat diatasi.
4. Sistem pendataan alumni yang mulai berjalan dan terorganisir di satuan pendidikan KP.
5. Kerja sama yang baik yang dilakukan antara Pusat Pendidikan, Satuan Pendidikan KP, dan Pelaku Dunia Usaha/Dunia Industri.
6. Sinkronisasi kompetensi yang sesuai antara lulusan SUPM dengan kebutuhan di dunia usaha/dunia industri.



**GAMBAR 28. TESTIMONI PESERTA PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain adalah :

1. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan berkontribusi dalam menghasilkan capaian pelaku utama/usaha yang kompeten dan inovatif karena penyelenggaraan pelatihan yang tepat sasaran dan mampu memberikan solusi nyata terhadap kebutuhan pelaku utama/usaha untuk meningkatkan kompetensi sehingga menerapkan hasil pelatihannya.
2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan dengan menggunakan *trendline analysis* sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan dan penyuluhan KP.
3. Ketersediaan instrumen pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja yang telah disosialisasikan.
4. Pelaksanaan Gelar Kompetensi Kewirausahaan di tahun 2019, yang melibatkan peserta didik di Satuan Pendidikan KP, pengusaha, dan sektor industri kelautan dan perikanan sehingga melalui kegiatan tersebut membuka peluang bagi sektor dunia usaha/dunia industri untuk menyerap lulusan di Satuan Pendidikan KP dan berlanjut sampai tahun 2020.
5. Kerjasama antara Satuan Pendidikan KP dan perusahaan sektor kelautan dan perikanan untuk menerima peserta didik untuk melakukan magang di perusahaannya, dan memprioritaskan kepada lulusan Satuan Pendidikan KP untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan

## Sasaran Strategis (SS-5) Hasil Riset dan Inovasi Termanfaatkan

Sasaran Strategis 5 memiliki 1 (satu) IKU yakni IKU 8 Hasil Riset Kelautan dan Perikanan yang diadopsi/diterapkan.



### Hasil Riset Kelautan dan Perikanan yang diadopsi/diterapkan

IKU Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan mencakup: diseminasi teknologi dan atau kebijakan inovatif hasil riset kepada stakeholder terkait baik Pemerintah daerah maupun industri; data hasil riset, termasuk informasi perikanan antara lain peta fishing ground, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung lahan budidaya, yang dimanfaatkan stakeholder terkait (Pemda, pihak swasta), serta rekomendasi kebijakan perikanan antara lain kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan, kebijakan pemanfaatan tata ruang perikanan, pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah produk, yang digunakan internal KKP dan/ atau stakeholder lainnya. Pada tahun 2020, ditargetkan sebanyak 5 hasil riset yang terdiri dari: 1 desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP; 1 data, informasi dan peta hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan, 1 hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri dan 2 rekomendasi hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 23. HASIL RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIADOPSI/DITERAPKAN**

SS-5					Hasil Riset dan Inovasi Termanfaatkan								
IKU-8					Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (Hasil Riset)								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	-	5	5	100,00	-	5	100,00	15	33,33%	

Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan telah mencapai target tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan target 5 dan realisasi sebesar 5 atau telah mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024, realisasi tahun 2020 masih mencapai 33,33% terhadap target tahun 2024 yaitu sebanyak 15 hasil riset. IKU ini merupakan indikator baru di tahun 2020 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian ini diperoleh dari 2 hasil riset rekomendasi kebijakan, 1 hasil riset desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP, 1 hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri dan 1 hasil riset data, informasi dan peta hasil riset KP yang

digunakan dalam penyusunan kebijakan. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru pada tahun 2020. Rincian hasil riset tersebut mencakup :

**TABEL 24. RINCIAN HASIL RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIADOPSI/DITERAPKAN**

No	Hasil Riset KP	Pengguna
1	<i>Policy Brief</i> : Strategi Penanggulangan Pandemi Covid -19 Terhadap Relasi Sosial Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Direktorat Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP
2	<i>Policy Brief</i> : Metodologi Perhitungan Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster ( <i>Puerulus</i> ) di Tingkat Nelayan	Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP
3	Desa mitra yang menerapkan teknologi pembuatan pupuk hayati	Batu Licin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
4	Vaksin Kombinasi <i>Aeromonas Hydrophila</i> - <i>Streptococcus Agalactiae</i> untuk Ikan Nila ( <i>Oreochromis Niloticus</i> ) dan Proses Pembuatannya	PT. Caprifarmindo Laboratories
5	Pemetaan Potensi Ikan, Pengawasan Sumberdaya, Kondisi Ekosistem Pesisir dan Validasi Laut Nusantara Menggunakan Data Satelit, Observasi dan Pemodelan	Ditjen Perikanan Tangkap, KKP

Kinerja hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan ini merupakan kinerja pemanfaatan hasil riset yang ditunjukkan dengan tercapainya sejumlah kerjasama lisensi dengan perusahaan, pemerintah daerah dan direktorat teknis lingkup KKP.

## Sasaran Strategis (SS-6) Tata Kelola SDKP bertanggung Jawab

Sasaran Strategis 6 memiliki 3 (tiga) IKU yakni IKU 9 WPP yang menjadi Model Percontohan penguatan tata kelola, IKU 10 Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir dan IKU 11 Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan.

**IKU**

**9**

### WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan



pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Salah satu strategi arah kebijakan dari peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir.



**GAMBAR 29. PETA WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP-NRI)**

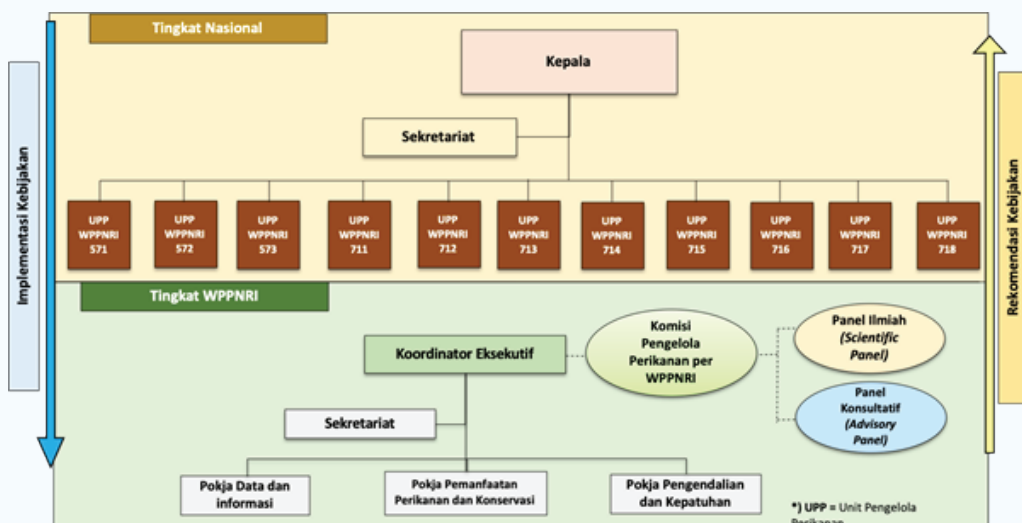
Dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan di WPPNRI diperlukan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagai wadah untuk penguatan peran koordinasi dan sinergi pengelolaan perikanan di setiap WPPNRI. Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI memiliki tugas dan fungsi utama sebagai pengelola sumber daya perikanan di masing-masing WPPNRI, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut sesuai dengan amanah yang tercantum pada Permen KP Nomor 33/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Peraturan tersebut sekaligus sebagai dasar hukum untuk mengoperasionalkan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Tiga WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, yaitu:

1. WPP 711, mencakup Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan, dengan ditetapkannya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) melalui KepmenKP Nomor 78/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 711.
2. WPP 715, mencakup Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau, dengan ditetapkannya RPP melalui KepmenKP Nomor 82/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715.
3. WPP 718, mencakup Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Tomini Bagian Timur, dengan ditetapkannya RPP melalui KepmenKP Nomor 54/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 718.

TABEL 25. IKU WPP YANG MENJADI MODEL PERCONTOHAN PENGUATAN TATA KELOLA

SS-6					Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bertanggung Jawab								
IKU-9					WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	-	3	3	100,00	-	3	100,00	11	27,27%	

Realisasi IKU-9 adalah sebesar 3 atau mencapai 100% dan apabila dibandingkan dengan target Renstra KKP 2020-2024 telah mencapai 27,27% dari target 2024 sebesar 11 WPP. IKU-9. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola merupakan IKU baru di tahun 2020, sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Seluruh WPPNRI telah melakukan pengelolaan sumber daya ikannya sesuai dengan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah ditetapkan. Sejak ditetapkannya, RPP telah menjadi acuan dalam pengelolaan WPPNRI dengan prinsip utama bahwa pengelolaan SDI berbasis WPPNRI adalah pengelolaan hulu-hilir secara terintegrasi dan berbasis kewilayahan (spasial) yang melibatkan *multistakeholders* dan multisektor untuk mewujudkan keseluruhan aspek dari pembangunan perikanan dengan akselerasi yang lebih cepat. Bentuk penguatan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI adalah melalui penerbitan Permen KP No. 33/2019 tentang LPP yang merupakan unit organisasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dipimpin Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP sebagai Kepala LPP WPPNRI.



GAMBAR 30. STRUKTUR ORGANISASI LPP DI WPPNRI

Penguatan LPP WPPNRI dimulai dengan menguatkan tata kelola dan struktur organisasi yang ada di dalamnya, yaitu unsur LPP WPPNRI di tingkat nasional/pusat, Unit Pengelola Perikanan (UPP) di tingkat WPPNRI, serta Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif. Selama ini, mekanisme koordinasi yang telah disusun di level WPPNRI belum dilaksanakan secara optimal, sehingga menjadi salah satu titik fokus yang harus diperbaiki untuk optimalisasi operasionalisasi LPP WPPNRI di masa yang akan datang. Mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan baik secara luring maupun daring (*video converence*). Terdapat beberapa pertemuan berkala yang dilaksanakan oleh LPP WPPNRI, yaitu:

- Rapat Komisi Pengelola Perikanan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.
- Rapat Koordinasi Komisi Pengelola perikanan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.
- Rapat Koordinasi Pokja yang dilaksanakan empat kali dalam satu tahun sebelum pelaksanaan Rapat Komisi dan Rapat Koordinasi Komisi. Optimalisasi kelompok kerja (Pokja) LPP WPPNRI memegang peranan penting sebagai wakil instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan.

IKU

10

### Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Kejelasan tata ruang laut dan pesisir tidak hanya menjamin kepastian usaha bidang kelautan akan tetapi juga dalam rangka mengawal pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, ketiadaan aturan tata ruang mempercepat laju kerusakan laut dan pesisir dan menimbulkan konflik pemanfaatan ruang yang berdampak pada hancurnya perekonomian kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, KKP melakukan serangkaian upaya dalam menata ruang laut dan zona pesisir, melalui penyusunan perencanaan ruang laut dan pesisir yang mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 43 Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi perencanaan tata ruang Laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan Laut.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut yang berfungsi untuk memberikan landasan spasial dalam penyelenggaraan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan, keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut, pertahanan Kawasan perbatasan NKRI, arah kebijakan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah, perencanaan zonasi di Kawasan laut; dan arahan pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan. Dalam menjamin pembangunan

kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, dilakukan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3-K), sedangkan perencanaan zonasi kawasan laut meliputi Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT). Perhitungan capaian ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Provinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3-K) dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan.
2. Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZKAW).
3. Jumlah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN).
4. Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT) dan
5. Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana aksi.

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada tahun 2020 adalah 14 rencana zonasi atau tercapai 100% dari target 14. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2019, yaitu 38 rencana zonasi atau mengalami penurunan sebesar 24%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024, realisasi tahun 2020 baru mencapai 13,73% secara kumulatif. Penurunan realisasi 2020 dibandingkan dengan 2019 disebabkan adanya penyesuaian target sebagai akibat adanya pemotongan anggaran sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.

**TABEL 26. CAPAIAN PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR**

SS-6					Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bertanggung Jawab								
IKU-10					Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
95	16	9	39	38	14	14	100	-24	14	100	12 atau 102 (kumulatif)	116,67 atau 13,73 (kumulatif)	

**TABEL 27. RINCIAN CAPAIAN PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR**

No	Rencana Zonasi	Kawasan	Keterangan
1	RZ-WP3-K	1. Provinsi Bangka Belitung 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Banten 4. Provinsi Riau	Target adalah dokumen final rencana zonasi, namun demikian pada tahun 2020, RZ-WP3-K Babel telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020
2	RZ KAW	5. Laut Banda	Dokumen final
3	RZ KSN	6. Kawasan Pancang Sanak (Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan) 7. Teluk Bintuni	Dokumen final
4	RZ KSNT	8. Pulau Nusa Penida 9. Pulau Guhakolak 10. Pulau Deli 11. Pulau Karangpabayang 12. Pulau Letti 13. Pulau Kisar	Rencana zonasi Pulau Guhakolak, Pulau Deli, dan Pulau Karangpabayang disusun dalam satu dokumen final rencana zonasi
5	Rencana Aksi	14. Pulau Senua	Dokumen Rencana Aksi

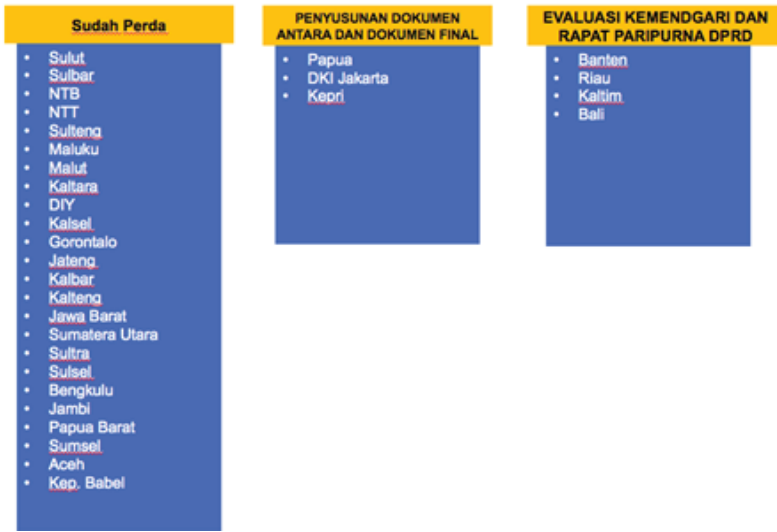
Keberhasilan capaian ini didukung dengan adanya komitmen berbagai pihak dalam menyusun rencana zonasi yang menjadi dasar pemanfaatan ruang sehingga sumber daya tetap terjaga. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala antara lain: konsultasi dan survey tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena pandemi sehingga memperlambat penyelesaian dokumen final, proses pengumpulan data sekunder yang belum memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas di beberapa lokasi. Solusi yang telah dilakukan adalah konsultasi publik dilakukan secara virtual, mengikutsertakan akademisi dalam upaya kelengkapan data serta melakukan koordinasi dengan kementerian lain terkait ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan RZ. Dalam hal penyelesaian dokumen RZ telah dilakukan upaya dalam meningkatkan efektifitas sumberdaya, dimana SDM yang digunakan dalam proses asistensi teknis sepenuhnya merupakan SDM dari KKP baik pusat maupun UPT lingkup KKP. Percepatan penyelesaian dokumen final juga difasilitasi atau bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU antara lain:

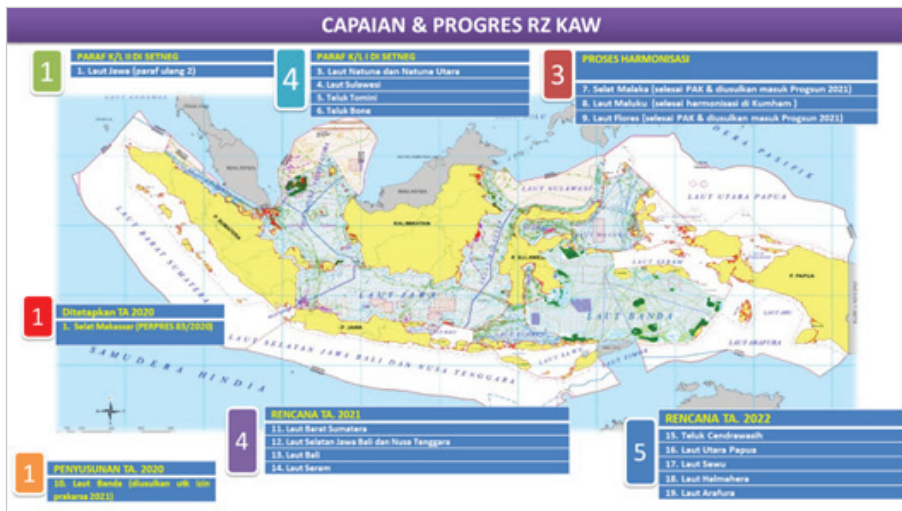
1. Penerbitan Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut.
2. Pendampingan penyusunan dokumen RZWP-3-K dan penyusunan dokumen final RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan Rencana Aksi Pulau Senua.
3. Pada tahun 2020, KKP melakukan pembahasan atau koordinasi dengan instansi

terkait perihal tindak lanjut dokumen RZ yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya untuk ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

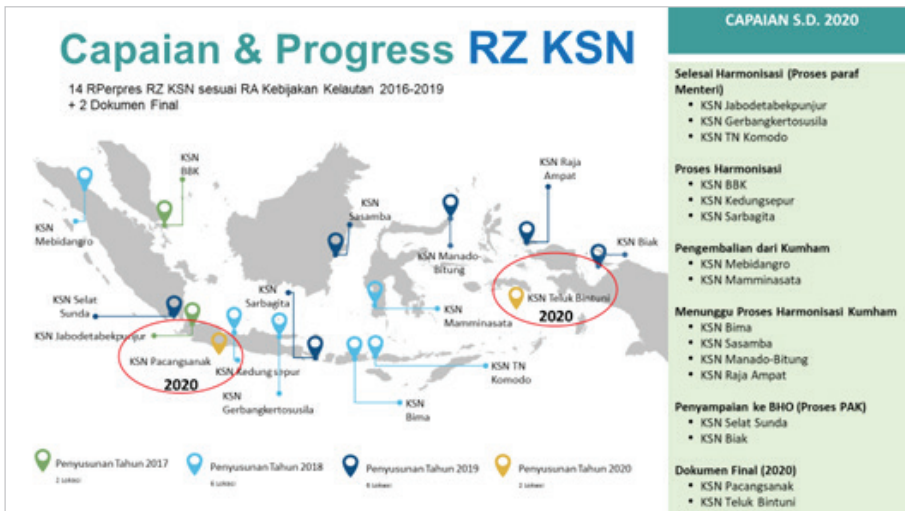
4. Sampai dengan tahun 2020, telah terbit 27 Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K, 1 RZ KAW (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Selat Makassar), dan 6 Permen KP RZ KSNT untuk 12 pulau. Status capaian RZWP-3-K, RZKAW, RZ KSNT dan RZ KSNT disajikan pada gambar dibawah sebagai berikut



GAMBAR 31. STATUS CAPAIAN DAN PROGRES RZWP3K



GAMBAR 32. STATUS CAPAIAN DAN PROGRES RZ KAWAN ANTAR WILAYAH (KAW)



GAMBAR 33. STATUS CAPAIAN DAN PROGRES RZ KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) 2017-2020



GAMBAR 34. STATUS CAPAIAN DAN PROGRES RZ KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT) 2017-2020



### Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Kepatuhan [compliance] pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan

perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

IKU ini terealisasi sebesar 94,76% melebihi target 2020 sebesar 94%. Keberhasilan pencapaian kinerja diperoleh dari rata-rata kepatuhan pelaku usaha kelautan. Hasil pengukuran Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja, sebagaimana pada tabel berikut:

**TABEL 28. CAPAIAN PERSENTASE KEPATUHAN (COMPLIANCE) PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	94%	96,87%	103,05%
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan	94%	92,65%	98,56%

Nilai capaian kinerja tahun 2020 secara umum menunjukkan tingginya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal tersebut sebagai implikasi dari kegiatan pengawasan yang dilakukan dan sosialisasi secara terus menerus sepanjang tahun 2020. Apabila dibandingkan capaian kinerja 2019 serta target akhir renstra 2024 sebagai berikut :

**TABEL 29. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN IKU “PERSENTASE KEPATUHAN (COMPLIANCE) PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN”**

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2024
	R	T	R	T
Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan	93,57%	94%	94,76%	98%
	1,19%		100,81%	96,69%

Ket: T=Target, R=Realisasi

Capaian kinerja 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,19% dari tahun 2019 yang dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Perbaikan formula penghitungan yaitu komponen pembentuk kepatuhan pelaku usaha tahun 2020 adalah pelaku usaha perikanan dan kelautan, sedangkan pada tahun 2019 komponennya berupa kepatuhan pelaku usaha dilaut melalui pemeriksaan kapal perikanan oleh kapal pengawas dan pemantauan melalui VMS;
- Terdapat dua komponen yang tidak dimasukkan dalam perhitungan aspek kepatuhan tahun 2020, berkontribusi pada IKU lain yaitu indeks kinerja armada pengawasan SDKP;
- Inovasi yang dilakukan antara lain, optimalisasi penggunaan Simwaskan,



aplikasi pelayanan publik dan pelayanan penerbitan SLO.

Proyeksi kepatuhan pada akhir periode renstra tahun 2024 optimis tercapai apabila KKP dapat konsisten melaksanakan pengawasan SDKP dan selalu berinovasi dalam melaksanakan pengawasan SDKP. Hal tersebut mempertimbangkan berbagai hal baik secara internal maupun eksternal. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja bidang kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan diantaranya melalui:

- a. Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan dengan adaptasi terhadap kondisi lapangan;
- b. Menindak tegas pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kegiatan utama dalam upaya pencapaian kinerja ini adalah pengawasan pelaku usaha perikanan dan kelautan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan

Pelaku usaha perikanan yang dilakukan pengawasan antara lain: 1) Pelaku usaha Penangkapan Ikan; 2) Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan; 3) Pelaku Usaha Distribusi hasil perikanan; dan 4) Pelaku usaha budidaya ikan. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan mencapai 96,87% dari target 94%. Penghitungan dilakukan terhadap verifikasi pelaku usaha hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas perikanan di 14 (empat belas) UPT Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Hasil pengukuran 4 komponen kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:

**TABEL 30. CAPAIAN KINERJA KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN**

No	Indikator Kinerja	Pelaku Usaha yang Diverifikasi	Pelaku Usaha yang Patuh	% Capaian
1	Pelaku usaha Penangkapan Ikan	1.200	1.140	95,00
2	Pelaku usaha budidaya perikanan	487	465	95,48
3	Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	432	419	96,98
4	Pelaku usaha distribusi ikan	390	390	100,00

- 1) Pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan  
Kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu Pengawasan ketaatan kapal perikanan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan yang dituangkan pada hasil pemeriksaan kapal saat keberangkatan dan kedatangan dipelabuhan perikanan. Kapal yang sudah memenuhi ketentuan akan diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) oleh pengawas perikanan di 14 UPT Pengawasan SDKP. Sedangkan yang belum memenuhi ketentuan tidak diterbitkan SLO dan direkomendasikan untuk melengkapi dokumen yang ditetapkan.  
Sepanjang tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 25.060 kapal perikanan, dari sejumlah tersebut diterbitkan SLO sejumlah 23.874 kapal. Kapal yang tidak patuh didominasi kapal yang perizinannya diterbitkan oleh daerah yaitu sekitar 6,12% dari jumlah kapal sebanyak 16.333 unit, sedangkan yang perijinan diterbitkan oleh pusat sebesar 2,32% dari jumlah kapal sebanyak 7.541 unit. Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal tersebut, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap pelaku usaha yaitu perusahaan/ perorangan yang memiliki kapal tersebut. Pelaku usaha yang berhasil diverifikasi dari hasil pemeriksaan kapal tersebut sejumlah 1.200 pelaku usaha, dan 1.140 pelaku usaha telah sesuai ketentuan.
  
- 2) Pengawasan Pelaku Usaha Budidaya Perikanan.  
Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian dokumen perizinan yang diterbitkan dengan aktivitas yang dilaksanakan. Disamping itu, dilakukan pengecekan kesesuaian pakan dan obat ikan yang digunakan dengan yang terdaftar.  
Pada tahun 2020 telah dilakukan verifikasi berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 487 pelaku usaha yang terdiri dari 112 pelaku usaha budidaya laut, 177 pelaku usaha air payau dan 198 pelaku usaha budidaya air tawar. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi sebanyak 465 pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekapitulasi hasil pengawasan disajikan pada table dibawah ini.

**TABEL 31. CAPAIAN HASIL PENGAWASAN USAHA BUDIDAYA IKAN**

No	UPT	Taat			Tidak			Total Taat	Total Tidak
		Laut	Payau	Tawar	Laut	Payau	Tawar		
1	Pangkalan PSDKP Batam		4	4		1	5	8	6
2	Pangkalan PSDKP Benoa	18	21	7	0	0	0	46	0
3	Pangkalan PSDKP Bitung	6	31	6	0	0	0	43	0
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	23	26	12	0	0	1	61	1

No	UPT	Taat			Tidak			Total Taat	Total Tidak
		Laut	Payau	Tawar	Laut	Payau	Tawar		
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	1	17	5	0	1	0	23	1
6	Pangkalan PSDKP Tual	16		1	1		0	17	1
7	Stasiun PSDKP Ambon	8		8	1		1	16	2
8	Stasiun PSDKP Belawan		29	29		0	1	58	1
9	Stasiun PSDKP Biak	5	4	36	0	0	5	45	5
10	Stasiun PSDKP Cilacap	10	13	17	1	0	0	40	1
11	Stasiun PSDKP Kupang	6		7	0		1	13	1
12	Stasiun PSDKP Pontianak		3	23		0	0	26	0
13	Stasiun PSDKP Tahuna	10		1	0		0	11	0
14	Stasiun PSDKP Tarakan	6	26	26	0	1	2	58	3
<b>Jumlah</b>		<b>109</b>	<b>174</b>	<b>182</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>465</b>	<b>22</b>

3) Pengawasan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan *Sertifikat Hazard Analysis & Critical Control Point* (HACCP) serta *Sertifikat Kesehatan/Health Certificate* (HC) bagi usaha pengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB). Sepanjang tahun 2020, telah dilakukan verifikasi terhadap 432 unit usaha yang terdiri dari 350 UPI skala besar dan 82 UPI skala kecil dengan jumlah pelaku usaha yang patuh sebanyak 419 unit usaha/pelaku usaha terdiri dari 338 skala besar dan 81 skala kecil.

4) Pengawasan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun domestik. Pengawasan ini untuk memastikan bahwa ikan yang didistribusikan bukan hasil *illegal fishing*, dokumennya lengkap dan sesuai, bukan jenis ikan yang dilarang keluar masuk wilayah RI serta memastikan alur pemasaran jenis ikan tertentu tidak bocor ke pasar tradisional.

Sepanjang tahun 2020, pelaku usaha yang diverifikasi sejumlah 390 orang dan/atau perusahaan dan seluruhnya telah memenuhi ketentuan dalam

melaksanakan kegiatannya. Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha distribusi impor dan ekspor serta di supermarket dan pelabuhan pendaratan ikan.

### b. Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

Pelaku usaha kelautan yang dilakukan pengawasan adalah yang memanfaatkan sumber daya kelautan antara lain: 1) pemanfaatan ruang laut; 2) pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil; 3) pemanfaatan produk dan jasa kelautan; dan 4) pemanfaatan Kawasan konservasi. Dari kegiatan tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) pelaku usaha yang menjadi fokus pengawasan pada tahun 2020. Kepatuhan pelaku usaha kelautan tahun 2020 tercapai sebesar 92,65% dari target 94%, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

**TABEL 32. CAPAIAN HASIL PENGAWASAN PELAKU USAHA KELAUTAN**

No	Pelaku Usaha	2020		
		Verifikasi	Taat	% Capaian
1	Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan	65	60	92,31%
2	Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi	65	61	93,85%
3	Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan	71	67	94,37%
4	Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	52	47	90,38%
5	Pelaku usaha pengelolaan ruang laut	12	11	91,67%
6	Pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	95	90	94,74%
7	Pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>Destructive fishing</i>	342	312	91,23%

Pencapaian kinerja tersebut belum optimal sesuai target yang ditetapkan, dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha belum memiliki perizinan ketika dilakukan pengawasan;
- 2) Ketidaktahuan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk mengurus perijinan;

Sebagai upaya perbaikan kedepan, perlu dilakukan langkah-langkah inovatif sebagai berikut:

- 1) Pembinaan pelaku usaha yang tidak patuh secara intensif melalui penyadartahuan dan kampanye penanggulangan destructive fishing melibatkan lintas sektor (pemda/pemrov);
- 2) Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha terkait dengan kepatuhan perijinan.

Uraian kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja adalah pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pengawasan kawasan konservasi perairan dilakukan untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan ketentuan yang telah ditetapkan (PERMEN/PERDA) di dalam kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya). Kegiatan yang dilakukan antara lain patroli pengawasan secara mandiri maupun secara terpadu dengan pengelola kawasan konservasi dan instansi terkait lainnya.

Selama periode tahun 2020 Pengawasan dilakukan di 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) meliputi a)KKPN TWP Pulau Pieh; b) KKPN TWP Kapoposang; c)KKPN TNP Laut Sawu; d)KKPN SAP Waigeo; e) KKPN TWP Gili Matra; f)KKPN TWP Laut Banda; g)KKPN SAP Raja Ampat; h) KKPN TWP Anambas; i)KKPN TWP Padaido; j)KKPN SAP Aru Tenggara.

Pengawasan juga dilakukan di 11 (sebelas) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) meliputi: a)KKPD Pulau Mursala, Sumatera Utara; b)KKPD Selat Dampier, Papua Barat; c)KKPD Belitung Timur, Bangka Belitung; d)KKPD Selat Pantar, Alor, Nusa Tenggara Timur; e)Kawasan Konservasi Maritim (KKM) HMAS Perth, Banten; f)KKPD Perairan Sawo, Sumatera Utara; g)KKPD Pulau Panjang, Jepara, Jawa Tengah; h)KKPD Majene, Sulawesi Barat; i)KKPD Polewali Mandar, Sulawesi Barat; j)KKPD Minahasa Utara, Sulawesi Utara; k)KKPD Angsana, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil pengawasan, dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap 65 pelaku usaha, 60 diantaranya telah memenuhi ketentuan sedangkan 5 pelaku usaha lainnya diberikan pembinaan agar tidak melakukan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan. Berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi selama periode 2020, antara lain:

- a) Penggunaan bom dan obat bius ikan di TWP Kep. Kapoposang
- b) Tugboat yang beroperasi di Perairan KKPD Angsana
- c) Penambangan pasir di pesisir TWP Laut Banda
- d) Pemasangan rumpon tanpa izin di TWP Pieh dan TWP Laut Banda
- e) Penangkapan Teripang dan Udang Lobster menggunakan kompresor
- f) Penangkapan ikan di zona inti di SAP Raja Ampat, KKPN Pulau Panjang, KKPN Anambas dan KKPN TWP Gili Matra
- g) Mendirikan bangunan permanen tanpa izin di TWP Gili Matra dan KKPD Majene



- 2) Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi  
Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan beberapa jenis ikan dilindungi beserta produk turuannya seperti penyu, pari manta, hiu paus, kima, dan bambu laut. Pengawasan bertujuan untuk memastikan kesesuaian implementasi pemanfaatan serta menjaga kelestraian jenis ikan yang dilindungi. Jenis ikan dilindungi yang berhasil ditemukan antara lain Ikan Napoleon, ikan Hiu Paus, ikan Pari, Bambu Laut, Karang Hias, Kima, dan Penyu.  
Pada tahun 2020, KKP telah berhasil memeriksa 65 pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi dan 61 pelaku usaha diantaranya telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 4 pelaku yang terindikasi melakukan pelanggaran terdapat di wilayah kerja pangkalan Bitung, Stasiun PSDKP Cilacap dan Kupang. Terhadap keempat pelaku usaha tersebut dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dilakukan berita acara pemeriksaan dan membuat pernyataan untuk tidak melakukannya kembali. Barang bukti dilakukan penyitaan dan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- 3) Pengawasan pengelolaan produk dan jasa kelautan
  - a) Pengawasan wisata bahari dilaksanakan terhadap 53 pelaku usaha yang terdiri dari pemilik/pengelola penginapan/hotel/resort/homestay/wahana wisata. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, sebanyak 2 (dua) pelaku usaha yang diberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan agar melengkapi dokumen perijinan yang ditetapkan. Kedua pelaku usaha tersebut merupakan kelompok masyarakat yang mengelola wisata pesisir di Cirebon dan Karawang.
  - b) Pengawasan penambangan pasir laut dilakukan terhadap 18 (delapan belas) pelaku usaha di 8 (delapan) lokasi. 2 (dua) pelaku usaha didapati melanggar ketentuan yaitu 1 (satu) pelaku usaha di Bengkalis, Riau ditindaklanjuti dengan penghentian aktivitas dan penahanan terhadap pelaku oleh kepolisian republik indonesia. Sedangkan 1 (satu) pelaku usaha terdapat di kab. Kep Talaud yang melakukan penambangan pasir secara tradisional namun tidak memiliki izin, sehingga direkomendasikan untuk menghentikan aktivitas penambangan.
- 4) Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  - a) Pengawasan pemanfaatan pesisir dilaksanakan di 9 (sembilan) lokasi terhadap 13 (tiga belas) pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut memanfaatkan wilayah pesisir untuk kegiatan wisata bahari/penginapan/resort. Berdasarkan hasil pengawasan dan verifikasi,

sebanyak 12 (dua belas) pelaku usaha tersebut telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan, sedangkan 1 (satu) pelaku usaha di Batam tidak patuh karena belum memiliki izin. Surat pemanggilan/klarifikasi pertama telah diberikan kepada pelaku usaha namun sampai dengan saat ini pihak perusahaan belum hadir

- b) Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan terhadap 39 (tiga puluh sembilan) pelaku usaha yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) UPT Pengawasan Sumber Daya KP. Sebagian besar pelaku usaha memanfaatkan pulau-pulau kecil sebagai wisata. Dari hasil pengawasan dan verifikasi diperoleh 4 pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan yaitu 2 pelaku usaha di Bali, dan 2 pelaku usaha di Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keempat pelaku usaha tersebut belum memiliki dokumen perijinan yang telah ditetapkan.
- 5) Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut
- Pengawasan pemanfaatan ruang laut meliputi pengawasan pemanfaatan zonasi ruang laut dan pengawasan pencemaran laut. Pengawasan dilaksanakan dalam rangka menjaga pemanfaatan ruang laut sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk kegiatan pelabuhan, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, dan industri.
- a) Pengawasan zonasi ruang laut difokuskan pada kesesuaian antara zonasi ruang laut yang sudah ditetapkan dengan kegiatan pemanfaatan yang ada. Kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut dilihat dari kesesuaian dokumen perijinan dengan aktivitas yang dilaksanakan serta dampak yang terjadi terhadap lingkungan laut. Selama periode tahun 2020, pengawasan pengelolaan ruang laut dilakukan di NTT, Lampung, Sulawesi Utara dan Papua Barat. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis sekaligus pendampingan pengawasan di lapangan. Pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 12 (dua belas) pelaku usaha, dengan 11 (sebelas) pelaku usaha telah sesuai ketentuan. Pelaku usaha yang diperiksa adalah yang memanfaatkan zonasi di bidang wisata bahari, kecuali di Lampung yaitu budidaya ikan laut.
  - b) Pengawasan terhadap aktivitas yang menimbulkan pencemaran laut berhasil memeriksa sebanyak 95 (sembilan puluh lima) pelaku usaha yang terdiri dari unit pengolah ikan, penyewaan *cold storage* dan budidaya ikan (tambak, *hatcery*). Berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 90 (sembilan) pelaku usaha tersebut, telah memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang merupakan salah satu persyaratan utama dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga tidak

menyebabkan pencemaran perairan. Sedangkan 5 (lima) lima pelaku usaha lainnya belum memiliki IPAL dan berlokasi di Raja Ampat, kep. Tidore, Indramayu, Halmahera Selatan dan Ternate.

- 6) Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang tidak Merusak Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (*non destructive fishing*).

KKP telah melaksanakan pengawasan dan penanggulangan kegiatan *destructive fishing* secara menyeluruh dimulai dari pendekatan pre-emptif melalui penyadartahuan masyarakat seperti pembuatan media sosialisasi, kampanye dan edukasi. Pendekatan preventif seperti gelar operasi pengawasan dan pemeriksaan muatan kapal perikanan dan pendekatan represif yaitu tindakan terakhir yang diambil melalui penegakkan hukum. Pada tahun 2020 KKP berhasil memeriksa 342 pelaku usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sebanyak 312 pelaku usaha terbukti tidak melakukan pelanggaran. Pelaku usaha yang diperiksa adalah yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal ikan <10 GT, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 33. PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK MERUSAK**

No	UPT PSDKP/Dekonsentrasi	Pelaku usaha	
		Terverifikasi	Patuh
1	Pangkalan Lampulo	15	14
2	Pangkalan Batam	11	11
3	Pangkalan Jakarta	18	18
4	Pangkalan Benoa	7	3
5	Pangkalan Bitung	53	41
6	Pangkalan Tual	39	39
7	Stasiun Cilacap	4	1
8	Stasiun Pontianak	5	5
9	Stasiun Tarakan	25	22
10	Stasiun Tahuna	3	3
11	Stasiun Ambon	23	23
12	Stasiun Biak	64	64
13	Stasiun Kupang	15	15
14	Provinsi Kalimantan Timur	10	10
15	DKP Sulawesi Selatan	17	15
16	DKP NAD	10	10
17	DKP Sulawesi Barat	10	10
18	DKP NTB	5	-
19	DKP Sumatera Barat	8	8



Berdasarkan tabel diatas, tingkat kepatuhan paling tinggi yaitu 100% terdapat di 8 wilayah kerja UPT Pengawasan SDKP dan 3 (tiga) provinsi. Sedangkan tingkat kepatuhan paling rendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperoleh dari hasil pengawasan terhadap 5 (lima) pelaku usaha, seluruhnya tidak patuh. Terhadap pelaku usaha yang tidak patuh diberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan dan penyitaan alat tangkap. Sedangkan beberapa pelaku juga dilakukan proses hukum yaitu di Tojo Una-una dan di Bolaang Mongondow Timur.

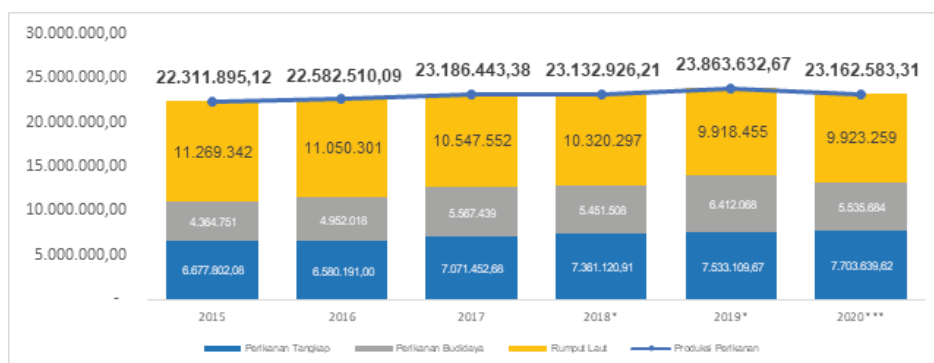
## Sasaran Strategis (SS-7) Industrialisasi KP Berdaya Saing

Sasaran Strategis 7 memiliki 2 (dua) IKU yakni IKU 12 Produksi Perikanan dan IKU 13 Produksi Garam



### Produksi Perikanan

IKU jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut (termasuk rumput laut), sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.



Sumber: Pusdatin, KKP

\*angka sementara

\*\* 2020 angka sangat sementara

\*\*\* angka estimasi hingga 2020

GAMBAR 35. PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2015-2020

Produksi perikanan perikanan tahun 2020 ditargetkan 26,46 juta ton dan realisasinya sebesar 23,16 juta ton atau mencapai 87,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 diperkirakan terjadi penurunan sebesar 2,93%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024 yaitu sebesar 32,75 juta ton atau baru mencapai 70,72%. Realisasi produksi perikanan 2020 bersumber dari perikanan tangkap sebesar 7,7 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 15,45 juta ton. Penurunan produksi perikanan sebesar 0,7 juta ton bersumber dari ikan yang berasal dari perikanan budidaya. Sementara untuk perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 2,26%, sedangkan untuk perikanan budidaya mengalami 5,33%. Penurunan produksi perikanan budidaya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketersediaan benih di beberapa lokasi yang masih kurang dengan adanya perubahan cuaca yang ekstrem, terbatasnya sentra produksi benih di beberapa lokasi, Adanya kebijakan rasionalisasi jumlah KJA baik di sungai atau danau yang mempengaruhi produksi ikan, merebaknya penyakit yang mengakibatkan banyak kematian baik pada induk maupun benih untuk beberapa jenis ikan dan Adanya kebijakan PSBB di masa pandemic covid di beberapa lokasi sehingga menghambat distribusi benih.

**TABEL 34. PRODUKSI PERIKANAN**

SS-7					Indusrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing								
IKU-12					Produksi Perikanan (juta ton)								
Realisasi					2020***				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018*	2019**	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019- 2020	Target 2020	% Capain thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
22,31	22,58	23,18	23,13	23,86	26,46	23,16	87,53%	-2,93	26,46	87,53%	32,75	70,72%	

\*) Angka Sementara, \*\*) Angka Sangat Sementara, \*\*\*) Angka estimasi hingga Triwulan IV-2020 (Sumber. Pusdatin, KKP)

### Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tankap sebesar 7,70 juta ton atau tercapai sebesar 96,06% terhadap target 2020 sebesar 8,02 juta ton. Meskipun belum mencapai target, namun capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,26%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP yaitu sebesar 10,10 juta ton realisasi tersebut baru mencapai 76,27%, diperlukan kerja keras untuk dapat mencapainya sampai periode akhir Renstra. Kenaikan produksi perikanan tangkap disumbang oleh meningkatnya produksi perikanan laut sebesar 2,23% dan perairan umum daratan sebesar 2,71%. Adapun capaian tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini.

**TABEL 35. PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP**

SS-7					Indusrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing								
IKU-12					Produksi Perikanan (juta ton)								
Indikator Pembentuk					Produksi Perikanan tangkap (juta ton)								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019- 2020	Target 2020	% Capain thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
6,68	6,58	7,07	7,36	7,53	8,02	7,70	96,06%	2,26	8,02	96,06%	10,10	76,27%	

\*) : Angka Sementara, \*\*) : Angka Sangat Sementara, \*\*\*) : Angka estimasi hingga Triwulan IV-2020 (Sumber: Pusdatin, KKP)

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan KKP dalam meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut:

Pengembangan pelabuhan perikanan

Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang dilakukan oleh KKP pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**TABEL 36. LOKASI KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN ATAU PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN TAHUN 2020**

No	Lokasi	Bentuk Kegiatan
1	PPS Nizam Zachman	Konsultan Perencanaan Sarana Bantu Navigasi Pelayanan (Rambu Suar)
2	PPS Belawan	Konsultan Layout Pengembangan Fasilitas di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
3	PPS Kendari	Konsultan Layout Pengembangan Fasilitas di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
4	PPS Bitung	Konsultan Layout Pengembangan Fasilitas di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
5	PPS Cilacap	Konsultan Perencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan Cilacap
6	PP Merauke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultan Perencana Masterplan dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke</li> <li>Pengadaan <i>Cold Storage</i></li> <li>Pembersihan Lahan untuk rencana jalan Kawasan</li> <li>Pengembangan dan pembangunan fasilitas PP Merauke (levelling lahan industri)</li> </ul>
7	PP Cikidang	Perencanaan <i>Masterplan</i> , <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Jalan Kawasan dan <i>Drainase</i> Lingkungan Pelabuhan Perikanan Cikidang
8	PPN Karangantu	Bolder dan Fender, Instalasi Pabrik Es, Pemeliharaan Kompresor, <i>Cold Storage</i> dan ABF, Bengkel, SWRO, Pagar Keliling, Rehab Turap, Urugan dan Pematangan Tanah.
9	PPN Tanjungpandan	Pemeliharaan Pabrik Es (ICE PAQ), Pemeliharaan Gedung Administrasi, Pemeliharaan Balai Pertemuan Nelayan
10	PPN Sibolga	Pembangunan jalan akses menuju IPAL

11	PPN Sungailiat	Pekerjaan interior ruang pelayanan terpadu, rehab rumah dinas, pekerjaan pemeliharaan pagar Kawasan
No	Lokasi	Bentuk Kegiatan
12	PPN Kejawanan	Rehab jaringan listrik, pembuatan plat duiker dan perkerasan halaman mess operator, pemasangan <i>paving block</i> halaman gudang perbaikan jaring, pembuatan saluran <i>drainase</i> bagian barat, pemasangan <i>paving blok</i> gedung pelayanan, rehabilitasi tempat pembuangan sampah, perkerasan jalan area pengembangan bagian timur, perkerasan jalan area pengembangan bagian barat, rehab trotoar jalan masuk utama dan landscaping, rehab pagar mess operator, perkerasan jalan wisata bahari, rehab jaringan air bersih, rehab jalan komplek, pembangunan ruang arsip
13	PPN Palabuhanratu	Pengadaan pompa portable pemadam kebakaran, pemasangan portal otomatis
14	PPN Brondong	Parkir beratap roda 2, rehab lampu suar/rambu suar, rehabilitasi jaringan listrik, pembangunan lampu penerangan kolam Pelabuhan, rehabilitasi sarana cctv Pelabuhan, perencanaan pembangunan kios PKL, perencanaan penambahan pintu akses TPI Higienis, Perencanaan pengerukan kolam Pelabuhan tahap I, perencanaan jalan akses outlet pengepakan ikan, perencanaan akses pejalan kaki dan pembatas jalan, perencanaan mess operator, pengadaan sumber air asin, sarana pemantauan operasional Pelabuhan, inovasi pelayanan cepat
15	PPN Prigi	Instansi pengolahan limbah cair <i>Cold Storage</i> , perencanaan instalasi pengolahan limbah cair <i>Cold Storage</i> , pengawasan sumur bor dan instalasi, perencanaan rehab tempat keranjang ikan, perencanaan taman dan Kawasan kantor Pelabuhan, perencanaan rehab mushola, perencanaan rehab <i>breakwater</i> barat
16	PPN Pekalongan	Rehab talud batu Kawasan wisata bahari, peninggian <i>revetment</i> beton Kawasan wisata bahari, pembongkaran paving dan peninggian Kawasan wisata bahari, dan pemasangan paving Kawasan wisata bahari.
17	PPN Pemangkat	Dermaga jetty (rehab dermaga kayu)
18	PPN Ternate	Pembangunan pos pas masuk dan <i>landscape</i>
19	PPN Ambon	Rehab Gedung pabrik es, pembuatan kanopi portal/membran, pembuatan gazebo (rumah bengong), pelebaran jalan masuk dan keluar trotoar pejalan kaki, dan pembuatan atm center
20	PPN Tual	Pembangunan Gedung mushola, pembangunan Gedung pelayanan publik, dan rehabilitasi Gedung kantor administrasi pelabuhan
21	PPN Pangambengan	Penataan jaringan listrik dan lampu dermaga, perbaikan Gedung TPI, peningkatan kualitas drainase, trotoar, gapura dan pos masuk, pembuatan jalan beton dalam lahan industri ( <i>cold storage</i> ), pembangunan lampu navigasi penanda pintu masuk kolam labuh, dan rehab dermaga korosif ( <i>grouting</i> ) tahap I
22	PPN Kwandang	Penyusunan dokumen lingkungan, rehab Gedung penyimpanan alat berat dan jalan akses areal industri

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan, KKP di tahun 2020 juga memberikan bantuan alat penangkapan ikan. Bantuan tersebut merupakan salah satu kegiatan prioritas KKP untuk mempertahankan keberlangsungan usaha nelayan kecil, khususnya nelayan kecil pada masa pandemi ini. Sasaran dari program bantuan ini adalah koperasi nelayan dan KUB. Adapun jenis bantuan API ini terdiri dari jaring insang, bubu rajungan, pancing ulur, dan rawai dasar yang dialokasikan untuk mendukung usaha penangkapan ikan menggunakan kapal berukuran < 5GT dan kapal berukuran > 5GT sampai dengan 10 GT. Sampai dengan Desember 2020

telah tersalurkan 17.545 paket API terhadap 338 KUB/Koperasi penerima di 33 Kab/ Kota pada 8 Provinsi.

### Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 mencapai 15,46 juta ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2020 yakni sebesar 18,44 juta ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 83,88 persen. Produksi perikanan budidaya tahun 2020 turun jika dibandingkan dengan produksi tahun 2019 sebesar 16,33 juta ton.

TABEL 37. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2020

SS-7					Indusrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing								
IKU-12					Produksi Perikanan (juta ton)								
Indikator Pembentuk					Produksi Perikanan budidaya (juta ton)								
Realisasi					2020*				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019*	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019- 2020	Target 2020	% Capain thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
15,63	16,00	16,11	15,77	16,33	18,44	15,46	83,83%	-5,34	18,44	83,83%	22,65	68,25%	

\*) : Angka Sementara, \*\*) : Angka Sangat Sementara, \*\*\*) : Angka estimasi hingga Triwulan IV-2020 (Sumber. Pusdatin, KKP)

Apabila dilihat selama periode 2016 – 2020, volume produksi perikanan budidaya mengalami penurunan dengan rata-rata per tahunnya turun sebesar 0,83 persen.

TABEL 38. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2020

Komoditas Utama	Volume (Ton)					Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018 *	2019 **	2020***	
Udang	692.568	919.988	911.857	1.053.206	911.216	8,49
Kerapu	11.504	70.294	16.414	18.490	16.461	109,02
Nila	1.114.156	1.280.126	1.171.681	1.474.742	1.235.514	4,02
Ikan Mas	497.208	316.649	534.076	584.497	514.643	7,46
Bandeng	747.445	701.427	875.594	810.867	695.801	(0,73)
Kakap	7.890	8.432	9.835	7.686	7.250	(1,01)
Patin	392.918	319.967	373.263	476.209	426.475	3,81
Lele	764.797	1.125.526	1.027.195	1.224.360	1.017.313	10,18
Gurame	132.334	234.084	173.345	227.468	212.139	18,86
Rumput Laut	11.050.301	10.547.552	10.320.297	9.918.455	9.923.259	(2,64)
Lainnya	591.197	590.945	358.249	534.543	496.036	0,65
Total	16.002.319	16.114.991	15.771.805	16.330.523	15.456.108	(0,81)

\*) : Angka Sementara, \*\*) : Angka Sangat Sementara, \*\*\*) : Angka sangat sementara hingga 2020 (Sumber. Pusdatin, KKP)



Pencapaian volume produksi perikanan budidaya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

1. Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya
2. Pengembangan sistem perbenihan melalui penguatan *broodstock center* :
  - i) Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya, yaitu telah dilakukan pelepasan sebanyak 10 varietas induk unggul (Udang vaname “Global Gen”, Ikan Batak “Tor Soro”, Nila Nirwana II, Nila Sultana, Nila Srikandi, Kerapu Cantang, Nila Anjani, Nila Merah Nilasa, Nila Jantan Pandu dan Nila Betina Kunti, Lele Sangkuriang dua, Udang Windu Domestikasi);
  - ii) Gerakan Penggunaan Induk Ikan Unggul (GAUL);
  - iii) Penyusunan regulasi dan perbanyak protokol induk ikan unggul; serta
  - iv) Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan.
3. Pengembangan sistem produksi melalui
  - (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan;
  - (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
  - (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan;
  - (iv) Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda.
4. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan melalui kegiatan terobosan utama:
  - (i) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD Provinsi;
  - (ii) Normalisasi saluran irigasi tambak bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum;
  - (iv) Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Gerakan Revitalisasi Tambak;
  - (v) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP)
  - (vi) Pengembangan kawasan dan penguatan operasional industrialisasi perikanan budidaya; dan
  - (vii) Pemberian bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekskavator dan mesin pellet
5. Pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan
6. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan, dengan terobosan utama adalah
  - (i) Pembangunan Posikandu (Pos Pelayanan Ikan Terpadu);
  - (ii) Pengembangan *National Residu Monitoring Plan* (NRMP) yang merupakan suatu panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat kimia dan bahan biologis lainnya; dan
  - (iii) Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit ikan.
7. Pengawasan dan Penerapan Teknologi Adaptif Perikanan Budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT Perikanan Budidaya.



### Produksi Garam

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di 64 Kabupaten/Kota dan PT Garam. Target tahun 2020 lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini didasarkan pada realita bahwa produksi garam nasional dalam 1 musim produksi berkisar antara 2,5 - 2,8 juta ton. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan pengguna garam yang mengurangi kapasitas produksinya karena lesunya pasar bahkan beberapa pabrik pengolah garam menutup usahanya. Suplai garam bahan baku masih tetap terjaga meskipun produksinya menurun. Fakta di lapangan bahwa masih banyak stok garam di gudang baik Gudang Garam Nasional maupun Gudang Garam Rakyat sisa produksi tahun sebelumnya yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan garam tahun ini. Tahun 2020, capaian produksi garam adalah 1,37 juta ton atau mencapai 68,50 % dari target 2 juta ton (target semula 3 juta ton dan terdapat penyesuaian target sebagaimana yang telah ditetapkan pada 27 Desember 2020 dalam Perjanjian Kinerja). Penyesuaian target disebabkan implementasi kegiatan integrasi lahan garam yang semula ditargetkan seluas 600 ha menjadi hanya 150 ha karena adanya penyesuaian anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga berpotensi mempengaruhi produksi garam yang bersumber dari lahan integrasi. Selain itu merujuk data BMG tentang perbandingan curah hujan tiga bulanan yaitu Juli-Agustus-September dan Agustus-September-Oktober Tahun 2020 disebagian besar wilayah sentra garam lebih basah dibandingkan priode tahun 2018 dan 2019. Hal ini mengakibatkan berkurangnya waktu optimal untuk memproduksi garam. Capaian produksi garam ini bersumber dari garam rakyat sebesar 1.146.253.366 ton dan PT Garam 219.458.000 ton. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024, realisasi tahun 2020 baru mencapai 40,29%. Capaian IKU Produksi Garam disajikan sebagai berikut :

**TABEL 39. PRODUKSI GARAM NASIONAL TAHUN 2020 (JUTA TON)**

SS-7					Indusrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing								
IKU-13					Produksi garam (juta ton)								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capain thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
2,91	0,118	1,11	2,7	2,85	2	1,37	68,50%	-51,93	3	45,67%	3,4	40,29%	

**TABEL 40. RINCIAN PRODUKSI GARAM NASIONAL TAHUN 2020**

Provinsi	Kabupaten	Total Produksi (kg)
Aceh	1 Aceh Selatan	42.957
	2 Aceh Timur	306.085
	3 Aceh Besar	8.616.497
	4 Pidie	4.800.482
	5 Bireuen	393.800
	6 Aceh Utara	1.523.449
	7 Aceh Barat Daya	34.817
	8 Pidie Jaya	796.950
Banten	9 Serang	328.209
Jawa Barat	10 Karawang	1.968.370
	11 Cirebon	13.472.906
	12 Indramayu	102.633.044
	13 Pangandaran	28.749
Jawa Tengah	14 Brebes	6.001.990
	15 Demak	20.071.502
	16 Jepara	21.615.888
	17 Pati	191.283.986
	18 Rembang	109.492.572
	19 Cilacap	29.574
	20 Kebumen	14.585
	21 Purworejo	7.918
DI Yogyakarta	22 Kulonprogo	-
	23 Gunungkidul	405
Jawa Timur	24 Tuban	17.130.960
	25 Lamongan	6.406.838
	26 Gresik	1.329.320
	27 Bangkalan	6.560.610
	28 Sampang	119.008.981
	29 Pamekasan	60.673.207
	30 Sumenep	176.711.201
	31 Probolinggo	9.328.425
	32 Pasuruan	8.345.089
	33 Sidoarjo	11.722.327
	34 Kota Surabaya	49.791.879
	35 Kota Pasuruan	4.362.016
	Bali	36 Klungkung
37 Karangasem		318.817
38 Buleleng		6.291.255



Provinsi	Kabupaten	Total Produksi (kg)
NTB	39 Lombok Barat	230.872
	40 Lombok Tengah	287.762
	41 Lombok Timur	10.641.057
	42 Sumbawa	4.138.218
	43 Bima	97.209.710
	44 Kota Bima	139.559
NTT	45 Sumba Timur	1.148.680
	46 Kupang	7.500.152
	47 Timor Tengah Selatan	5.839
	48 Timor Tengah Utara	3.467.227
	49 Belu	6.722
	50 Alor	337.286
	51 Lembata	112.868
	52 Flores Timur	107.672
	53 Ende	466.459
	54 Manggarai	924.470
	55 Rote Ndao	884.582
	56 Nagekeo	4.460.267
	57 Sabu Raijua	2.365.754
Sulawesi Tengah	58 Palu	808.758
Sulawesi Selatan	59 Kepulauan Selayar	80.986
	60 Jeneponto	31.623.892
	61 Takalar	388.6270
	62 Maros	4.035
	63 Pangkajene dan Kepulauan	13.810.623
Gorontalo	64 Pohuwato	136.375
Total Produksi Garam Rakyat (kg)		1.146.253.366
Produksi PT. Garam (kg)		219.458.000
<b>Total produksi garam rakyat + PT. Garam (kg)</b>		<b>1.365.711.366</b>

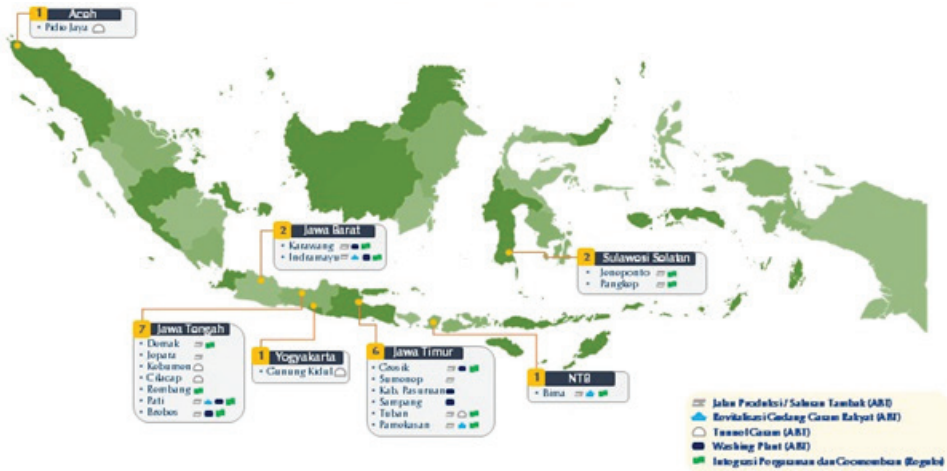
Tidak tercapainya capaian produksi garam disebabkan antara lain:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan terlambat akibat adanya permasalahan sosial di masyarakat sehingga penataan lahan menjadi terhambat yang pada akhirnya menghambat proses produksi garam;
- 2) Pandemi covid-19 menyebabkan keterlambatan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- 3) Rendahnya harga garam menyebabkan banyak petambak enggan untuk memproduksi karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan

yang diperoleh bahkan cenderung merugi;

- 4) Pengaruh cuaca, dimana terjadi La Nina yang diperkirakan bertahan sampai dengan awal tahun 2021 dan *Indian Ocean Dipole neutral* dan ada kecenderungan menjadi negative dimana kondisi tersebut tidak lagi ideal untuk memproduksi garam, terlebih lagi pada sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk wilayah sentra garam di Jawa memasuki musim hujan. Berdasarkan hasil analisis BMKG bahwa 2020 lebih basah dibanding 2018 dan 2019, sedangkan berdasarkan hasil analisis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP bahwa perbandingan estimasi produksi bulanan terus menurun karena mempertimbangkan cuaca yang berlaku di Indonesia tahun 2020

Upaya untuk meningkatkan produksi garam kedepan adalah (a) pelaksanaan kegiatan penataan lahan garam dilaksanakan lebih awal sehingga produksi garam dapat lebih optimal; (b) peningkatan kapasitas SDM di bidang produksi garam dan marketing; dan (c) pengusulan garam sebagai bahan pokok garam sebagai barang kebutuhan pokok /penting, agar kemudian ditetapkan Harga Pokok Penjualan Garam.



**GAMBAR 36. SEBARAN LOKASI PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT**

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi garam adalah sebagai berikut:

1. KKP menyampaikan usulan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.324/DJPRL/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Usulan Memasukkan

Garam sebagai Barang Kebutuhan Pokok / Penting, agar kemudian ditetapkan Harga Pokok Penjualan Garam.

2. KKP bersama dengan Kemenperin, Kemendag, BPS, dan K/L terkait menyusun Rperpres tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, serta bersinergi dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya.
3. Integrasi pergaraman seluas 275,20 hektar di 12 lokasi, yaitu (1) Karawang; (2) Indramayu; (3) Brebes; (4) Demak; (5) Pati; (6) Rembang; (7) Tuban; (8) Gresik; (9) Pamekasan; (10) Bima; (11) Pangkajene dan Kepulauan; dan (12) Jeneponto.

**TABEL 41. LUAS LAHAN INTEGRASI GARAM TAHUN 2020**

No	Kabupaten	Luas lahan integrasi (Ha)
1	Karawang	15,69
2	Indramayu	47,02
3	Brebes	15,15
4	Demak	58,10
5	Pati	15,35
6	Rembang	15,70
7	Tuban	15,45
8	Gresik	17,03
9	Pamekasan	22,01
10	Bima	17,00
11	Pangkajene dan Kepulauan	19,00
12	Jeneponto	17,70
	<b>TOTAL</b>	<b>275,2</b>

4. Perbaikan jalan produksi dan/atau saluran tambak garam.  
Perbaikan jalan produksi dengan mekanisme padat karya yang melibatkan petambak garam dan masyarakat sekitar. Sebanyak 37 lokasi jalan produksi telah diperbaiki dengan panjang total 16.906,2 meter yang terbagi pada 12 kabupaten, dengan rincian: (1) Karawang 1 paket, (2) Indramayu 5 paket, (3) Brebes 2 paket, (4) Demak 5 paket, (5) Pati 12 paket, (6) Jepara 1 paket, (7) Tuban 1 paket, (8) Gresik 1 paket, (9) Pamekasan 2 paket, (10) Pangkep 2 paket, (11) Jeneponto 2 paket, (12) Bima 4 paket. Perbaikan saluran tambak garam dengan mekanisme padat karya yang melibatkan petambak garam dan masyarakat sekitar. Sebanyak 24 saluran tambak garam telah diperbaiki dengan panjang total 29.935,1 meter yang terbagi pada 9 kabupaten, dengan rincian: (1) Karawang 1 unit, (2) Indramayu 5 unit, (3) Brebes 2 unit, (4) Demak 5 unit, (5) Jepara 1 unit, (6) Pamekasan 1 unit, (7) Sumenep 3 unit, (8) Pangkep 2 unit, dan (9) Jeneponto 2 unit. Pelaksanaan pembangunan jalan produksi dan/



atau saluran tambak garam melibatkan orang, dengan Pelaksanaan kegiatan perbaikan saluran produksi dan/atau tambak garam mengalami kendala di Kabupaten Rembang karena waktu yang tidak mencukupi pelaksanaan kegiatan sebagaimana Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rembang Nomor 523/587/2020 tanggal 30 November 2020).

5. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (GGR) sebanyak 16 unit dilakukan untuk memperbaiki GGR yang sebelumnya tidak layak menjadi layak di 4 lokasi dan diserahkan kepada 9 Koperasi/BUMDes/Kelompok. Gudang Garam Rakyat merupakan tempat penyimpanan garam rakyat dengan kapasitas dibawah 1.000 ton mengacu pada SNI 8446:2017 tipe C. Revitalisasi GGR dilaksanakan di (1) Indramayu (5 unit, 4 penerima), (2) Pati (2 unit, 1 penerima), (3) Pamekasan (5 unit, 1 penerima), dan (4) NTB: Bima (4 unit, 3 penerima).
6. Pembangunan tunnel garam di 5 lokasi sebanyak 23 unit yang diserahkan kepada 7 Koperasi/BUMDes/Kelompok, yaitu Cilacap (40 unit, 1 penerima), Kebumen (40 unit, 1 penerima), Gunung Kidul (40 unit, 1 penerima), Tuban (30 unit, 1 penerima), dan Aceh: Pidie Jaya (3 penerima: Bandar Baru - 30 unit, Pante Raja - 38, dan Meureudu - 12 unit). Rumah *tunnel* garam adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi garam berbentuk setengah lingkaran, menggunakan penutup berbahan poly ethylene tahan terhadap ultra violet, beralaskan geomembran, termasuk instalasi saluran air.
7. Pengadaan *Washing Plant* di 7 lokasi (Karawang, Indramayu, Brebes, Pati, Gresik, Pasuruan, dan Sampang) dan diserahkan kepada 7 Koperasi/BUMDes/Kelompok. *Washing plant* atau mesin pencucian dan pemurnian garam adalah rangkaian mesin berikut tempat dan peralatannya untuk mencuci dan memurnikan garam, dengan komponen sekurangngnya terdiri atas alat penggilingan, alat pencucian, tempat penirisan, alat pengeringan/pembakaran, alat iodisasi, dan alat pengepakan (*packaging*), menggunakan bahan baku garam dengan SNI 4435:2017 dan output garam minimum sesuai SNI 3556:2016. Disamping pengadaan *washing plant*, KKP memfasilitasi bimbingan teknis dan perizinan usaha *washing plant*.
8. Kegiatan pendukung lainnya adalah Pemutakhiran Informasi Geospasial (IG) Lahan Garam, Pembahasan *feasibility study* pembangunan *washing plant* Pembahasan Draft Naskah Akademik Revisi SNI Garam Konsumsi, dan Review Nasional Pugar.



Jalan Produksi Karawang



Saluran Tambak Pangkep



Gudang Garam Rakyat (GGR)  
Indramayu



Gudang Garam Rakyat (GGR)  
Pati

### Sasaran Strategis (SS-8) Pengawasan Sumberdaya KP yang Integratif

Sasaran Strategis 8 memiliki 2 (dua) IKU yakni IKU 14 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* dan IKU 15 Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

**IKU**  
**14**

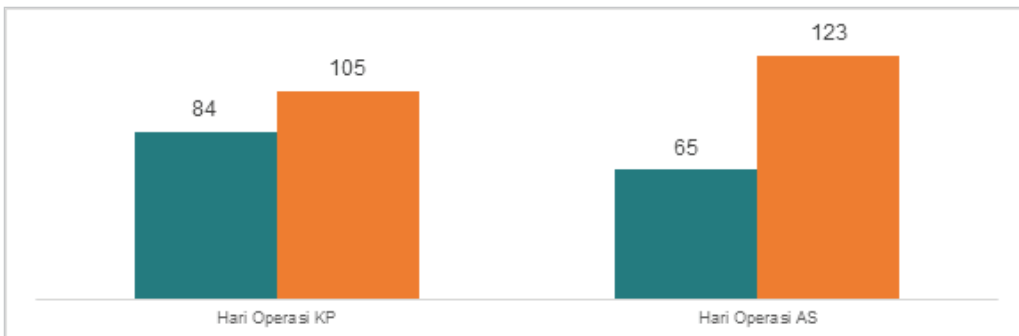
**Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing**

Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing tercapai sebesar 67,80% dari target tahun 2020 sebesar 54%, atau telah mencapai 125,56% atau sebesar 120% dalam aplikasi kinerja.

Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* seluas 1.307.475 nm<sup>2</sup> diperoleh dari rata-rata capaian 2 (dua) cakupan yakni: (1) Cakupan pengawasan dilaut dengan menggunakan Kapal Pengawas dan Speedboat sebesar 62,43% atau seluas 1.204.054 nm<sup>2</sup>; dan (2) Cakupan pengawasan udara dengan menggunakan pesawat sebesar 73,16% atau seluas 1.410.895 nm<sup>2</sup>. Secara umum, capaian kinerja meningkat sebesar 15,65 poin atau tumbuh mencapai 30,01% dari capaian tahun 2019 yang dipengaruhi oleh penambahan hari operasi Kapal pengawas dan pengawasan menggunakan pesawat. Perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2020 serta target tahun 2024, sebagaimana berikut:

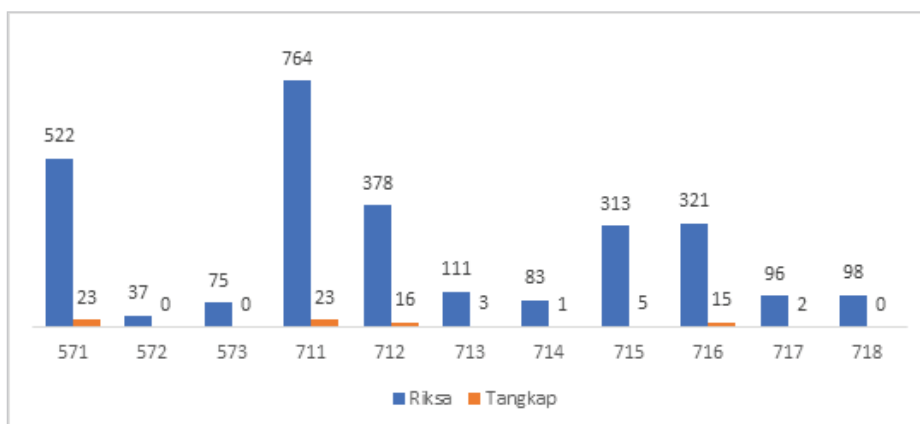
**TABEL 42. CAPAIAN IKU PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU DARI KEGIATAN ILLEGAL FISHING**

SS-8					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Integratif								
IKU-14					Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
24,31	28,5	71,05	67,63	52,15	54	67,8	125,56	30,01	54	125,56%	75	90,40%	



**GAMBAR 37. HARI OPERASI KAPAL PENGAWAS DAN PESAWAT PATROL TAHUN 2019-2020**

Cakupan wilayah laut yang mampu diawasi oleh 28 unit kapal pengawas sampai dengan tahun 2020 seluas 1.151.616 nm<sup>2</sup>, sedangkan cakupan wilayah laut yang mampu diawasi oleh 120 unit speedboat pengawasan (termasuk *rigit inflatable boat*, *rubberboat*, *sea rider*) seluas 52.438 nm<sup>2</sup>). Luasan tersebut diperoleh dari rata-rata cakupan kapal pengawas/speedboat yang masing-masing dipengaruhi oleh hari operasi, lamanya jam operasi, kecepatan kapal pengawas saat beroperasi, jangkauan radar serta wilayah operasi. Peningkatan cakupan yang mampu diawasi oleh kapal pengawas dipengaruhi oleh penambahan hari operasi Kapal pengawas yang awalnya sebanyak 89 hari operasi menjadi 105 hari operasi dampak dari penurunan harga BBM pada tahun 2020. Kondisi tersebut, secara langsung berimbas pada semakin seringnya Kapal Pengawas Perikanan melakukan operasi di WPP-NRI dalam rangka pemberantasan illegal fishing. Selama periode operasi tahun 2020, Kapal Pengawas berhasil melakukan pemeriksaan sejumlah 2.765 kapal yang terdiri dari 2.705 KII dan 60 KIA, dan dari sejumlah tersebut dilakukan penangkapan sebanyak 88 kapal (35 KII, 53 KIA) karena diduga melakukan pelanggaran yang selanjutnya dikawal ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP terdekat untuk dilakukan proses lebih lanjut. Rekapitulasi hasil operasi Kapal Pengawas disajikan pada grafik berikut:



**GAMBAR 38. HASIL OPERASI KAPAL PENGAWAS TAHUN 2020 DI WPPNRI**

*Speedboat/RIB/RB* pengawasan yang dioperasionalkan oleh UPT Pengawasan SDKP dan satker Dekonsentrasi sebanyak 120 unit dengan rata-rata 20 hari operasi. Selama periode operasi telah berhasil memeriksa 4.907 unit kapal, 87 kapal diantaranya dilakukan pembinaan dan 6 kapal diproses hukum karena terindikasi melakukan pelanggaran. Cakupan pengawasan melalui udara sepanjang tahun 2020 tercapai seluas 1.410.895,9 nm<sup>2</sup> atau sebesar 73,16% dari luasan total WPP-

NRI, meningkat sebesar signifikan sebesar 31,50% dari tahun 2019. Peningkatan tersebut dipacu oleh bertambahnya capaian hari operasi sebanyak 58 hari operasi menjadi 123 hari pada tahun 2020. Hasil pemantauan dilakukan sebanyak 12 (dua belas) periode dengan menggunakan pesawat di 15 (lima belas) pangkalan serta berhasil memantau 2.928 unit kapal (221 KIA, 2.707 KII), 16 KIA diantaranya dilakukan penangkapan oleh kapal pengawas karena terindikasi melakukan pelanggaran. Dari hasil pemantauan terhadap 297 unit rumpon, 33 unit rumpon diantaranya yang diduga *ilegal* dilakukan pemotongan/penenggelaman/pengangkatan serta pengawasan di 7 kawasan konservasi perairan.



**Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan**

Capaian IKU “Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan” tahun 2020 sebesar 86,78% dari target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 93%. Perbandingan capaian kinerja dengan target di tahun 2020 serta target tahun 2024, sebagaimana berikut :

**TABEL 43. CAPAIAN IKU “PERSENTASE PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN”**

SS-8					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Integratif								
IKU-15					Persentase penanganan pelanggaran bidang KP								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
24,31	28,5	71,05	67,63	52,15	54	67,8	125,56	30,01	54	125,56%	75	90,40%	

Berdasarkan tabel diatas capaian tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan, dikarenakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap capaian kinerja yaitu penanganan barang bukti dan awak kapal tidak tercapai. Pencapaian indikator kinerja di atas tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 capaian diperoleh dari rata-rata 2 (dua) indikator kinerja pembentuk yaitu 1) Persentase Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP); dan 2) Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal. Sedangkan pada tahun 2019, capaian kinerja diperoleh hanya berdasarkan satu komponen utama yaitu penyelesaian kasus TPKP yang terjadi. Capaian diperoleh dari rata-rata 2 (dua) indikator kinerja pembentuk yaitu 1) Persentase Penanganan



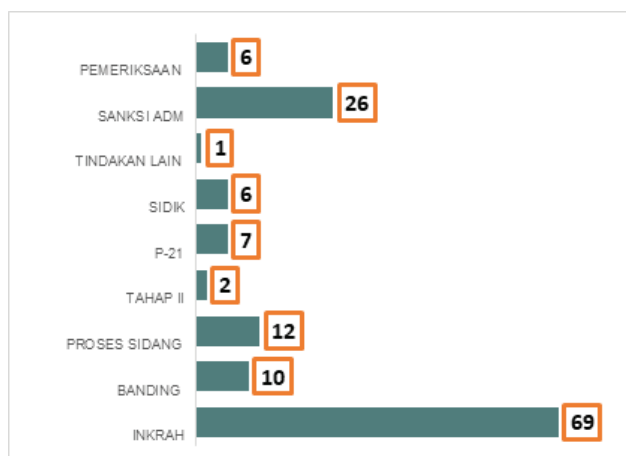
Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP); dan 2) Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal, sebagai berikut:

**TABEL 44. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK PEMBENTUK PERSENTASE PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Indikator Kinerja Pembentuk	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP	93%	94,05%	101,13%
Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	93%	79,52%	85,50%

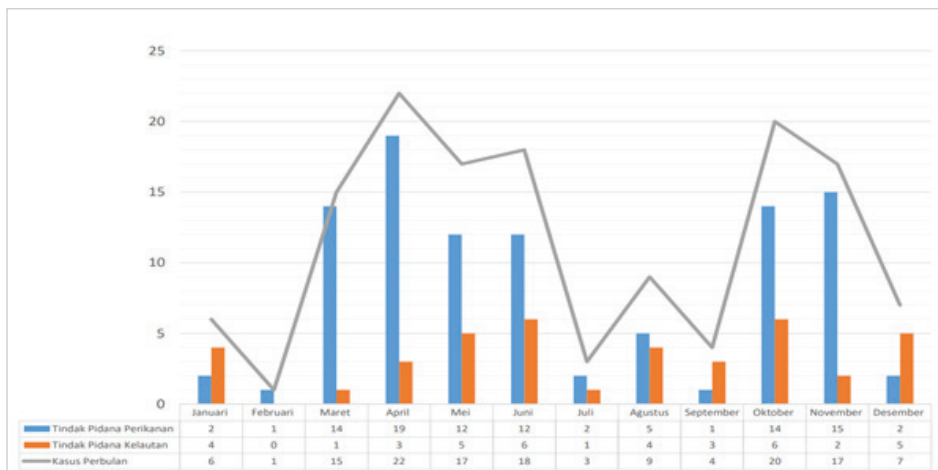
#### a. Penyelesaian Penyidikan TPKP

Jumlah kasus yang dihitung adalah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh PPNS Perikanan dan masuk dalam proses hukum yang ada di UPT/Satker Pengawasan SDKP maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi kasus pelanggaran dalam bidang penangkapan ikan dan bidang kelautan. Pada tahun 2020, penyelesaian administrasi penyidikan kasus TPKP sebanyak 106 (seratus enam) kasus yang didominasi oleh Tindak Pidana Perikanan (TPP) sejumlah 68 kasus, sisanya sebanyak 38 kasus merupakan Tindak Pidana Kelautan (TPK). Berdasarkan pemantauan tahun 2020, terdapat 139 data penanganan pelanggaran yang terdiri dari 6 (enam) kasus dalam proses pemeriksaan pendahuluan, 26 kasus diberikan sanksi administrasi, 1 (satu) kasus dalam tindakan lain, serta 106 (seratus enam) kasus TPKP diproses hukum. Keseratus enam kasus yang telah proses hukum terdiri dari kasus yang masih dalam proses penyidikan sebanyak 6 (enam) kasus, 7 kasus telah P21, 2 kasus penyerahan tahap II, 12 proses sidang, 10 kasus banding, dan 69 kasus sudah inkrah pengadilan.



**GAMBAR 39. PENANGANAN PELANGGARAN TAHUN 2020**

Berdasarkan perkembangan penanganan kasus TPKP sepanjang tahun 2020, didapati penambahan kasus bulanan tertinggi terjadi pada bulan April 2020 sebanyak 22 kasus yang terdiri dari 19 kasus tindak pidana perikanan dan 3 kasus tindak pidana kelautan. Periode triwulan II 2020 (April-Juni) penambahan kasus TPKP menjadi periode penanganan kasus TPKP tertinggi yaitu sebanyak 57 kasus atau 60%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh jumlah kapal perikanan yang ditangkap oleh kapal pengawas. Sementara itu, pada periode triwulan III, penambahan kasus yang ditangani sebanyak 16 (enam belas) kasus, hal tersebut juga dipengaruhi oleh tangkapan hasil operasi kapal pengawas sebanyak 13 (tiga belas) kapal, sisanya merupakan kasus *destructive fishing*. Perkembangan penanganan TPKP tahun 2020 disajikan pada grafik dibawah.



**GAMBAR 40. GRAFIK PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN (TPKP) TAHUN 2020**

Namun terjadi penurunan kasus secara tahunan (*year-on-year*) dimana pada Desember 2019 terdapat 151 kasus yang ditangani sedangkan pada Desember 2020 terdapat 139 kasus yang ditangani. Penurunan kasus tersebut akibat dampak adanya pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi tersendat karena adanya protokol kesehatan yang harus ditaati.

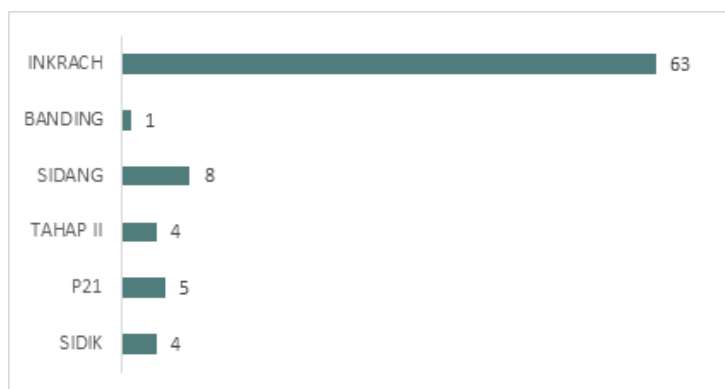
Berdasarkan lokasi penanganan TPKP, sebanyak 36 kasus ditangani oleh PPNS Perikanan di Pangkalan PSDKP Batam. Seluruh kasus yang ditangani merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) pelaku *illegal fishing* hasil operasi kapal pengawas di Perairan Natuna dan perairan Malaka sebanyak yaitu 25 KIA Vietnam, 5 KIA Myanmar, dan 6 KII. Secara keseluruhan KIA yang paling banyak ditangkap

dan diproses hukum karena melakukan pelanggaran *illegal fishing* adalah KIA Vietnam sebanyak 23 kapal disusul KIA Malaysia sebanyak 17 kapal, Filipina 12 kapal, dan Taiwan 1 kapal. Diperlukan upaya yang lebih tinggi lagi dari seluruh segenap komponen dalam menjaga kedaulatan WPPNRI dari praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing.

## b. Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal

### 1) Penyelesaian Penanganan Barang Bukti

Sampai dengan tahun 2020 penanganan barang bukti hasil tangkapan kapal pengawas terhadap 80 (delapan puluh) kapal dari total barang bukti 89 (delapan puluh sembilan) kapal. KKP melakukan upaya penanganan berupa penjagaan dan perawatan barang bukti TPKP sampai pada proses hukum P-21 Tahap II. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sebanyak 45 (empat puluh lima) kapal dalam kondisi Baik, 6 (enam) kapal kondisi rusak, 2 (dua) kapal rusak berat dan 36 (tiga puluh enam) kapal tidak ada informasi yang merupakan kapal *inkrahct*. Barang bukti yang ditangani didominasi oleh KIA asal Vietnam sebanyak 30 (tiga puluh) kapal dan Malaysia sebanyak 20 (dua puluh) kapal. Rekapitulasi penanganan barang bukti tahun 2020 sebagai berikut:



GAMBAR 41. PENANGANAN BARANG BUKTI TPKP 2020

### 2) Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

Pada tahun 2020, dilakukan penanganan awak kapal pelaku *illegal fishing* sebanyak orang 564 awak kapal yang ditangkap yang terdiri dari 105 berstatus tersangka sedangkan sisanya sebanyak 458 orang bukan tersangka. Awak kapal yang selesai ditangani merupakan awak kapal yang sudah dipulangkan dan ditindaklanjuti ke proses hukum sejumlah 405 orang yang terdiri dari 60 orang tersangka, 236 orang sudah diserahkan ke imigrasi, dan 45 orang dipulangkan langsung.

## Learning and Growth Perspective

### Sasaran Strategis (SS-9) Tatakelola pemerintahan yang baik

Sasaran Strategis 9 memiliki 2 (dua) IKU yakni IKU 16 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dan IKU 17 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP

**IKU****16**

#### Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: kelembagaan atau organisasi; ketatalaksanaan atau *business process*; dan sumber daya manusia aparatur, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup KKP untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur KKP mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program pembangunan bidang KP. Evaluasi RB pada setiap K/L dilaksanakan tahunan oleh Kementerian PAN dan RB.

Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KKP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan KKP.

Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan

2. Penataan peraturan perundang-undangan yang mencakup regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
3. Penataan dan penguatan organisasi yang mencakup penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
4. Penataan tata laksana yang mencakup sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
5. Penataan sistem Manajemen SDM yang mencakup SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
6. Penguatan akuntabilitas yang mencakup meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Penguatan pengawasan yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

**TABEL 45. CAPAIAN NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI KKP TAHUN 2020**

SS-9					Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
IKU-16					Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi*	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capain thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
BB (70,51)	BB (78,74)	BB (78,95)	BB (78,60)	BB (79,38)	71	85,48	120,39	7,68	71	120,39%	75	113,97%	

\*hasil penilaian mandiri tahun 2020

Pada tabel di atas realisasi sebesar 85,48 masih termasuk kategori A (>80), atau telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu BB (71) atau telah mencapai 120,39% atau sebesar 120% dalam aplikasi kinerjaku. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 untuk penilaian RB tahun 2019 (79,38) realisasi nilai kinerja RB KKP tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,68%. sampai dengan saat pelaporan nilai RB KKP belum diterbitkan Kementerian PAN dan RB, sehingga capaian 2020 masih menggunakan capaian hasil penilaian mandiri dan hasil reuiu terhadap kertas kerja PMPRB KKP tahun 2019 s.d. Juni 2020, dan telah dilakukan pembahasan dengan

para asesor dan penanggung jawab program RB terhadap seluruh area perubahan sebagaimana berita acara hasil konsensus penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) KKP tahun 2019 - 2020 Nomor BAHK.PMPRB-01/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, sehingga diperoleh kesepakatan nilai PMRB KKP, sebagai berikut:

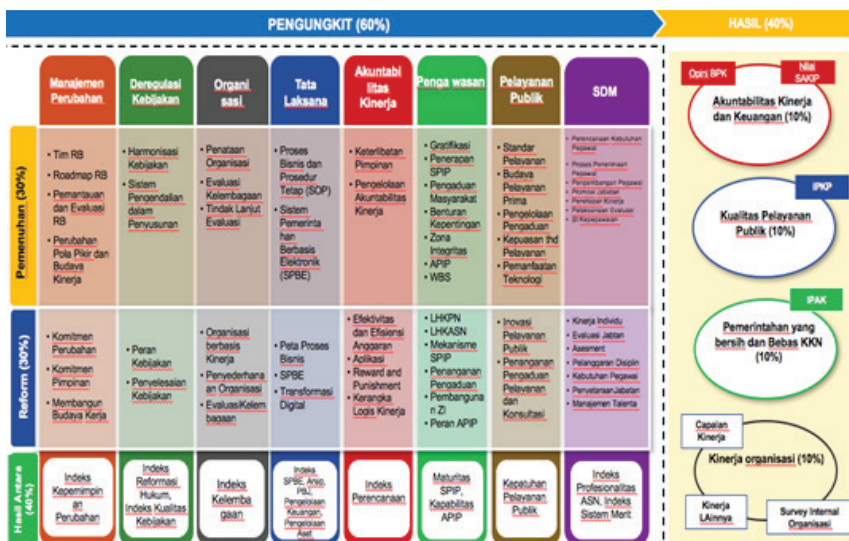
**TABEL 46. CAPAIAN PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI KKP TAHUN 2020**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Pusat	Unit	KKP
<b>A</b>	<b>PENGUNGKIT</b>				
1	Manajemen Perubahan	2	1,96	1,84	1,90
2	Deregulasi Kebijakan	2	1,75	0,83	1,79
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3	2,84	1,71	2,77
4	Penataan Tata Laksana	2,5	2,48	0,91	2,44
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3	3,0	1,33	2,96
6	Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,39	2,44	2,42
7	Penguatan Pengawasan	2,5	2,36	2,04	2,33
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	2,44	2,24	2,34
	<b>Total Pemenuhan</b>	<b>20</b>	<b>19,21</b>	<b>13,34</b>	<b>18,97</b>
<b>B</b>	<b>HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN</b>	<b>10</b>			
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	1	0,93		0,93
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1	0,70		0,70
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan*	1	0,0		0,0
4	Kualitas Pengelolaan Aset*	1	0,0		0,0
5	Merit Sistem	1	0,90		0,90
6	ASN Profesional	1	0,72		0,72
7	Kualitas Perencanaan*	1	0,0		0,0
8	Maturitas SPIP	1	0,70		0,70
9	Kapabilitas APIP	1	0,60		0,60
10	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	1	0,91		0,91
	<b>Total Hasil Antara Area Perubahan</b>				
<b>C</b>	<b>REFORM (30)</b>				
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,09	2,32	2,21
2	Deregulasi Kebijakan	3,00	2,06	1,83	2,07
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,01	0,75	3,88
4	Penataan Tata Laksana	3,75	3,59	1,89	3,56
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	4,13	1,28	3,92
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,15	2,65	2,90
7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,15	1,89	3,56
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,47	3,98	3,22
	<b>Total Reform</b>	<b>30,00</b>	<b>26,08</b>	<b>17,20</b>	<b>25,30</b>
	<b>Total Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>50,76</b>	<b>30,55</b>	<b>49,74</b>

No	Komponen Penilaian	Bobot	Pusat	Unit	KKP
<b>D</b>	<b>HASIL (Bobot 40)</b>				
<b>I.</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10)</b>				
	Opini BPK	3,00	3,00		3,00
	Nilai SAKIP	7,00	5,74		5,74
	Total Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,74		8,74
<b>II.</b>	<b>Kualitas Pelayanan Publik (10)</b>				
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00	8,80		8,80
<b>III.</b>	<b>Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN</b>				
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10,00	9,35		9,35
<b>IV.</b>	<b>Capaian Kinerja Organisasi (10)</b>				
	Kinerja Lainnya	2,00	1,50		1,50
	Survei Internal Organisasi	3,00	2,54		2,54
	<b>Total Nilai Kinerja Organisasi</b>	<b>10,00</b>	<b>8,85</b>		<b>8,85</b>
	<b>Total Hasil</b>	<b>40</b>	<b>35,74</b>		<b>35,74</b>
	<b>Indeks RB KKP (Pengungkit dan Hasil)</b>	<b>100,00</b>	<b>86,50</b>	<b>30,55</b>	<b>85,48</b>

Keterangan\* : Belum ada penilaian dari instansi terkait

Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Nilai Pengungkit PMRB Setjen merupakan ukuran perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi di KKP berdasarkan hasil penilaian Tim Inspektorat Jenderal. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: (i) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (ii) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (iii) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); (iv) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (v) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (vi) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (vii) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (viii) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

KKP terus meningkatkan kinerja reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan yang mencakup manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang antara lain melalui :

1. Penyempurnaan *road map* RB KKP 2020-2024 yang terintegrasi antar area/program dan Renstra 2020-2024
2. Revisi Kepmen KP 333 Tahun 2017 tentang Agen Perubahan
3. Melakukan analisis terhadap seluruh per-UU yang masih berlaku sebanyak 468
4. Penetapan Permen KP tentang perubahan Organisasi Tata Kerja KKP
5. Penetapan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Jabatan Fungsional dalam Permen KP
6. Menyusun proses bisnis yang sesuai dengan transformasi dan Renstra KKP 2020-2024 dalam Kepmen KP
7. Mengoptimalkan *One Single Submission System* yang terintegrasi dengan INSW untuk mendukung aksi integrasi dan sinkronisasi data impor pangan dalam Stranas Pencegahan Korupsi.
8. Pembangunan zona integritas yang masif dan intensif keseluruh unit kerja



pelayanan terutama pada unit kerja pelayanan teknis yang ada pada kawasan strategis.

9. Penerapan manajemen kinerja sampai level unit kerja terendah
10. Integrasi antar aplikasi pengendalian pengawasan anggaran dan kinerja (Kinerjaku, Edalwas, dan eSKP)
11. Melakukan kegiatan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja KKP melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah memiliki pelatihan *online* yang dapat diikuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan KKP dalam rangka memenuhi Indeks Profesionalitas ASN sejumlah 20 Jam Pelajaran, diantaranya pelatihan budaya kerja KKP, Pelayanan Publik dan Kewirausahaan pada laman Pelatihan *Online* Aparatur KKP di E- Milea, dan akan dilakukan terus menerus untuk penyempurnaan baik aplikasi dan konten pelatihannya Diklat peningkatan kompetensi bidang teknis dari eselon I lain.
12. Penyusunan beberapa Surat Edaran Sekretaris Jenderal yang berkaitan dengan Pandemi Covid-19 diantaranya Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Perkantoran, Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Selain itu dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KKP, telah ditetapkan beberapa Keputusan Menteri, antara lain:

1. Keputusan Menteri Nomor 12/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
2. Keputusan Menteri Nomor 13/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020; dan
3. Keputusan Menteri Nomor 9/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Subtim Program Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.
4. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/KEPMEN-KP/2020 tentang kamus kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan Tahun 2020 pada tanggal 17 Januari 2020.
5. Telah ditetapkan Rencana Strategis KKP 2020-2024 melalui Pemen KP Nomor 57/2020.

Selain itu, sepanjang tahun 2020 KKP telah menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan birokrasi berkelas dunia yang mencakup aspek keterbukaan informasi publik, pengelolaan informasi geospasial, inovasi pelayanan public, ASN berprestasi serta prestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

**IKU**  
**17**

**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat dijadikan alat managerial untuk mendukung ketercapaian output (*output delivery*) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran.

IKPA terdiri dari 13 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Pagu Minus, (4) Data Kontrak, (5) Pengelolaan UP dan TUP, (6) LPJ Bendahara, (7) Dispensasi SPM, (8) Penyerapan Anggaran, (9) Penyelesaian Tagihan, (10) Konfirmasi Capaian Output, (11) Retur SP2D, (12) Renkas, dan (13) Kesalahan SPM.

Indikator ini disampaikan setiap bulannya melalui aplikasi Monev Pelaksanaan Anggaran dalam menu OMSPAN Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi (1) Kesesuaian terhadap perencanaan, (2) Efektifitas pelaksanaan anggaran, (3) Efisiensi pelaksanaan anggaran, (4) Kepatuhan terhadap regulasi. Target IKPA KKP Tahun 2020 sebesar 88,00 yang merupakan nilai akhir (nilai total/konversi bobot). Nilai target IKPA tersebut berlaku sama untuk lingkup KKP (Unit Kerja Eselon I, Unit Eselon II dan Dekonsentrasi). Berdasarkan pemantauan pada aplikasi OM SPAN, Kementerian Keuangan per tanggal 15 Januari 2021, realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP pada Tahun 2020 sebesar 93,95 sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 88,00 dengan nilai per indikator IKPA KKP sebagai berikut:

**TABEL 47. CAPAIAN IKU-17. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) KKP**

SS-9					Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
IKU-17					Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP								
Realisasi					2020				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP No. 57/2020)				
2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi*	% Capaian	% Kenaikan 2019-2020	Target 2020	% Capaian thd Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	94,62	88	93,95	106,76%	-	88	106,76%	90	104,39%	

Pada tabel dapat dilihat nilai capaian terhadap nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP Tahun 2020 sebesar 93,95 atau 106,76% dari target sebesar Tahun 2020 sebesar 88,00, selanjutnya capaian IKPA terhadap target tahun 2020 sebesar 106,76%, sedangkan apabila dibandingkan target akhir Renstra yaitu sebesar 90 capaian tahun 2020 telah mencapai 104,39%. Capaian IKPA tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019, mengingat pada tahun 2019 perhitungan IKPA masih berdasarkan perhitungan 12 indikator pembentuk penilaian IKPA sedangkan pada tahun 2020 telah disempurnakan menjadi 13 indikator pembentuk penilaian IKPA yaitu adanya tambahan indikator konfirmasi capaian output pada aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan. Nilai IKPA ini masih mengalami pergerakan terus dan koreksi masih dimungkinkan sampai Kementerian Keuangan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Unaudited* setelah periode rekonsiliasi selesai.

Capaian Nilai IKPA KKP tersebut terbagi dalam 4 aspek kelompok penilaian yaitu 1). aspek kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan dengan perolehan nilai sebesar 99,91, 2). aspek kepatuhan terhadap regulasi dengan perolehan sebesar 93,20, 3). aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan perolehan nilai sebesar 96,13 dan 4). aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan nilai sebesar 90,44. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 4 aspek tersebut nilai terendah yang perlu dilakukan perbaikan kedepan yaitu aspek aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan yang mencakup 2 indikator yaitu Perencanaan Kas dan Kesalahan SPM. Sedangkan nilai perolehan tertinggi yang perlu dipertahankan kedepan yaitu aspek kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan dengan perolehan nilai sebesar 99,91 yang mencakup 3 indikator yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA dan terjadinya pagu minus.

Berdasarkan hasil monitoring capaian IKPA per unit kerja eselon I, Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mendapat nilai tertinggi yaitu sebesar 97,11 dan terendah yaitu Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP dengan nilai sebesar 89,9. Apabila dilihat secara keseluruhan terdapat unit kerja yang nilai IKPA diatas KKP yaitu : Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP (94,7), Badan Riset SDM KP (95,5) dan Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (97,1).

Secara keseluruhan nilai capaian IKPA KKP Tahun 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 88,00, akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian dan dapat dimaksimalkan kembali capaiannya pada tahun mendatang agar nilai IKPA KKP dapat optimal, salah satu indikator yang perlu dioptimalkan antara lain 1). Indikator data kontrak, 2). penyerapan anggaran, 3). pengelolaan UP, 4). konfirmasi capaian output, 5). kesalahan SPM dan 6). Halaman III DIPA.

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN TINGKAT K/L (REAKTIVASI)**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode K/L	Nama K/L	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (Smart DUA)							
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Pagu Minus	Data Kontrol	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispersasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Ratur SP2D	Revisi	Kesalahan SPM	Capaian Sasaran Strategis				Rata-rata realisasi	Nilai EKA						
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100,00	82,86	99,91	91,25	88,59	97,97	95,00	93,20	98,16	93,48	99,89	95,88	85,00	94,55	90%	93,96	83,13	88,48	88,88						
			Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	5													
			Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	13,89	7,09	4,90	4,75	13,98	11,79	9,35	4,96	4,79	4,25												
			Nilai Aspek	99,91				93,20				96,13			90,44													

*Diselenggarakan*

1) Nilai indikator pada modul ini menyanggah data transaksi untuk penilaian kembali IKPA sebagaimana dalam [R.61APB.0338](#)

2) Untuk mendukung akreditasi belanja Tahun 2020, indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman II DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA.

GAMBAR 42. CAPAIAN IKU IKPA KKP TAHUN 2020



GAMBAR 43. PEMBOBOTAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TAHUN 2020

**TABEL 48. CAPAIAN IKU-17. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PER UNIT KERJA ESELON I**

No	Unit Kerja	Indikator Pelaksanaan Anggaran												Nilai Akhir	
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		-13
1	Setjen	100	80.5	99.6	77.0	78.0	97.1	100	99.4	97.0	92.5	99.9	100	90.0	92.1
2	Itjen	100	76.2	99.8	80.0	86.0	100	100	100	100	83.3	100	100	90.0	93.0
3	Ditjen PT	100	85.8	99.9	88.0	89.0	98.6	100	87.4	98.2	92.8	99.8	100	90.0	93.2
4	Ditjen PB	100	75.2	99.8	96.0	92.0	97.5	100	73.5	96.3	90.3	98.9	92.3	80.0	90.9
5	Ditjen PSDKP	100	85.7	99.9	93.0	88.0	97.4	100	95.3	99.4	92.3	99.8	94.7	85.0	94.7
6	Ditjen PDSPKP	100	75.7	100	82.0	65.0	98.7	100	92.2	98.4	86.4	99.9	100	85.0	89.9
7	Ditjen PRL	100	76.5	99.9	96.0	82.0	97.7	95.0	76.2	98.3	92.7	99.5	100	85.0	91.4
8	BRSDM KP	100	88.9	99.9	89.0	94.0	96.9	100	100	99.3	94.5	99.5	93.5	85.0	95.5
9	BKIPM KHP	100	88.2	99.8	93.0	96.0	99.3	100	100	100	99.8	99.8	0	85.0	97.1
<b>Total KKP</b>		<b>100</b>	<b>82.9</b>	<b>99.9</b>	<b>91.2</b>	<b>88.5</b>	<b>97.9</b>	<b>95.0</b>	<b>93.2</b>	<b>98.1</b>	<b>93.4</b>	<b>99.6</b>	<b>95.8</b>	<b>85.0</b>	<b>93.9</b>

Kedepan untuk meningkatkan capaian nilai IKPA khususnya dengan adanya kebijakan penerapan satu DIPA di masing-masing unit kerja eselon I setiap satker perlu melakukan langkah-langkah strategis terhadap 13 indikator komponen pembentuk Nilai IKPA yang mencakup:

1. Pengelolaan UP  
Setiap Satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/ GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat;
2. Data kontrak  
Setiap Satker agar selalu meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya oleh KPPN;
3. Pengembalian/kesalahan SPM  
Setiap Satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OMSPAN maupun data identitas *supplier* yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN;
4. Retur SP2D  
Teliti dalam memproses dokumen pembayaran, terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening penerima. Jika terdapat Retur SP2D, berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya dengan jangka waktu maksimal 7 hari kerja;



5. Halaman III DIPA  
Seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan, dan satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker;
6. Revisi DIPA  
Selektif dalam revisi DIPA kategori Pagu Tetap, Batasan frekuensi revisi 1x setiap triwulan;
7. Penyelesaian Tagihan  
Disiplin menyelesaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, dan teliti dalam mengisi uraian SPM (terutama informasi tanggal BAST/BAPP);
8. LPJ Bendahara  
Disiplin menyampaikan LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan Memastikan data LPJ telah di-approve KPPN pada aplikasi SPRINT;
9. Perencanaan Kas (Renkas)  
Disiplin dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) sebelum mengajukan pencairan dana kategori besar;
10. Penyerapan anggaran  
Setiap Satker agar selalu memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif, dan Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
11. Pagu minus  
Satker yang memiliki pagu minus agar dapat segera menyelesaikan pagu minus dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut;
12. Dispensasi SPM  
Selektif dalam pemberian dispensasi SPM yang terlambat;
13. Konfirmasi capaian output  
Konfirmasi capaian output dihitung untuk semua ouput yang dikelola satker, dengan melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan Sakti secara disiplin setiap bulan.

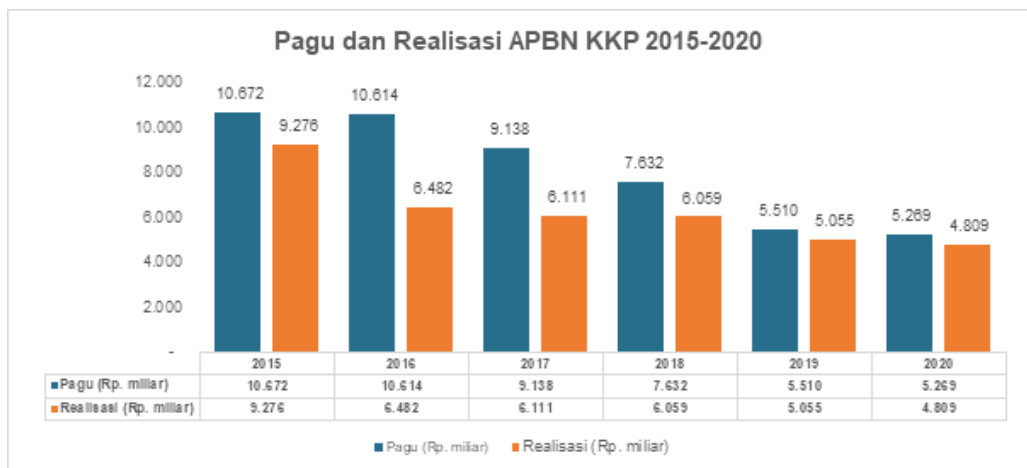
Untuk meningkatkan capaian nilai IKPA, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya baik di level Satker dan level Unit Kerja Eselon I terhadap capaian nilai IKPA masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Ke depan, diharapkan nilai capaian IKPA KKP Tahun 2021 dapat lebih baik lagi dari nilai capaian IKPA KKP Tahun 2020.





## KINERJA ANGGARAN

**A**PBN KKP Tahun 2020 sebesar Rp. 5.269.641.991.000 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap eselon I lingkup KKP baik yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat, Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis), Dinas KP Provinsi (dekonsentrasi) maupun Dinas KP Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan). Alokasi anggaran tahun 2020 digunakan untuk membiayai belanja rutin (belanja pegawai dan operasional perkantoran), kegiatan pendukung, belanja untuk stakeholder KP secara langsung melalui penyaluran bantuan pemerintah dan stakeholder KP secara tidak langsung. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran KKP selama tahun 2015-2020 sebagaimana tabel berikut :



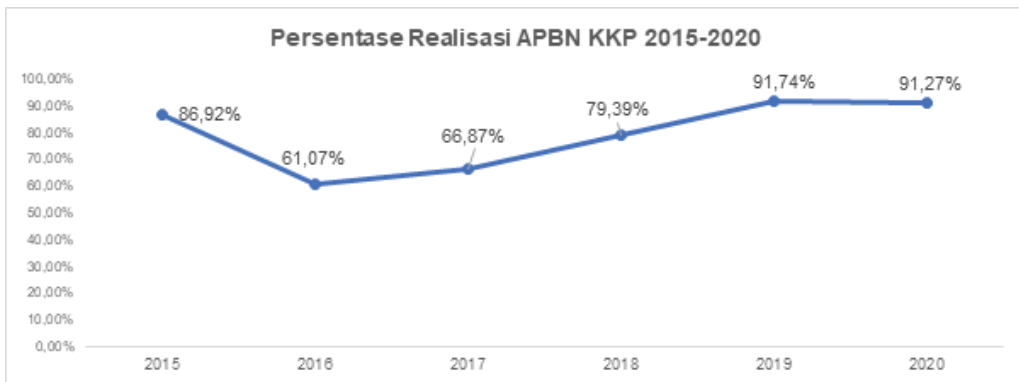
**GAMBAR 44. PAGU DAN REALISASI APBN KKP 2015-2020**

Pagu Awal KKP sebagaimana DIPA Awal KKP Nomor SP. DIPA-032/2020 tanggal 12 November 2019 adalah sebesar Rp6.448.661.749.000, namun terdapat penyesuaian dan perubahan anggaran (penghematan adanya pandemi covid dan Anggaran Biaya Tambahan) sehingga anggaran akhir KKP menjadi sebesar Rp. 5.269.641.991.000. Penyesuaian dan perubahan anggaran tersebut antara lain bersumber dari :

1. Berdasarkan Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN

Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 yang selanjutnya diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 dan pada 24 Juni 2020 diatur kembali pada Peraturan Presiden RI 72/2020 tentang Perubahan atas Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 dimana terdapat penyesuaian anggaran lingkup KKP dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang semula sebesar Rp6.448.661.749.000,- menjadi Rp4.600.264.778.000.

2. Terdapat anggaran belanja tambahan sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-180/MK.2/2020 tanggal 8 Agustus 2020 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08 dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA KKP (BA 032) untuk Tambahan Anggaran KKP Tahun 2020 sebesar Rp. 474,9 miliar yang tersebar di 5 Program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Penguatan Daya Saing Produk KP dan Program Pengelolaan Ruang.
3. Terdapat anggran tambahan sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-267/MK.2/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08 dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA KKP (BA 032) untuk Tambahan Anggaran KKP Tahun 2020 dimana KKP mendapat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 153,80 miliar untuk Program Pengelolaan Ruang Laut terkait Program Restorasi Terumbu Karang dan Program Rehabilitasi Kawasan Mangrove, sehingga alokasi anggaran KKP Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 5.269.641.991.000 dengan realisasi per 21 Januari 2021 sebesar Rp. 4.809.642.208.575 atau mencapai 91,27% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 459.999.782.425 atau mencapai 8,73%.



GAMBAR 44. PAGU DAN REALISASI APBN KKP 2015-2020

Penyerapan anggaran KKP tahun 2020 cenderung positif, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,51% apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Mengingat di tahun 2020, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan menghadapi tantangan besar akibat adanya pandemic Covid-19 yang tentu saja berdampak hampir disemua sektor dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran per unit kerja eselon I adalah sebagai berikut:

**TABEL 49. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KKP TAHUN 2020 PER UNIT KERJA ESELON I**

No	Program	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Sekretariat Jenderal	400.700.274.000	371.774.244.798	92,78%
2	Program Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas	Inspektorat Jenderal	68.784.539.000	65.520.750.972	95,26%
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Ditjen Perikanan Tangkap	575.400.303.000	492.002.352.961	85,51%
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Ditjen Perikanan Budidaya	1.018.205.687.000	816.747.196.652	80,21%
5	Program Pengawasan SDKP	Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	708.278.921.000	678.507.729.219	95,80%
6	Program Penguatan Daya Saing KP	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	212.391.107.000	205.414.204.379	96,72%
7	Program Pengelolaan Ruang Laut	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	411.880.638.000	393.614.623.041	95,57%
8	Program Riset Sumber Daya KP	Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan	1.384.561.733.000	1.320.523.548.885	95,37%
9	Program Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil KP	Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan	489.438.789.000	465.537.557.721	95,12%
<b>JUMLAH</b>			<b>5.269.641.991.000</b>	<b>4.809.642.208.628</b>	<b>91,27%</b>

Sumber: OMSPAN, Kementerian Keuangan (21 Januari 2021)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada Program Penguatan Daya Saing KP dengan realisasi sebesar 96,72% dan realisasi

terendah pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan realisasi sebesar 80,21%. Apabila dibandingkan dengan realisasi secara nasional berdasarkan Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan per 21 Januari 2021, realisasi KKP Tahun 2020 sebesar 91,73% berada dalam urutan ke 65 dari 87 KL.



GAMBAR 46. PAGU DAN REALISASI APBN KKP 2020

Sedangkan berdasarkan jenis belanja, anggaran KKP tahun 2020 terdistribusi kedalam 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 1,82 triliun dengan realisasi sebesar Rp. 1,71 triliun atau mencapai 93,84%, belanja barang dengan anggaran sebesar Rp. 3,11 triliun dan realisasi sebesar Rp. 2,76 triliun atau mencapai 89,66% dan belanja modal dengan anggaran sebesar Rp. 334 miliar dengan realisasi sebesar 308 miliar atau mencapai 92,24%. Sisa anggaran KKP Tahun 2020 sebesar Rp.459,99 miliar berasal dari sisa belanja pegawai yaitu tunjangan kinerja yang tidak dapat dicairkan, kegiatan gagal lelang sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan, sisa lelang, sisa anggaran kegiatan dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2020.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 antara lain :

1. Adanya beberapa kegiatan yang mengalami gagal lelang
2. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk;
3. Adanya pandemi covid 19 sehingga banyak kegiatan yang terhambat pelaksanaannya.

4. Dengan adanya penambahan alokasi anggaran pada bulan Agustus dan September yang bersumber dari BA BUN (BA 999.08) atau biasa yang disebut (ABT) dimana anggaran ini difokuskan kepada kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga terdapat kegiatan-kegiatan baru yang membutuhkan revisi anggaran terlebih dahulu selanjutnya proses perencanaan kegiatan, mempersiapkan dokumen pengadaan sekaligus verifikasi calon penerima bantuan, juknis dan proses Pengadaan Barang/Jasa yang memakan banyak waktu dalam memproses kegiatan tersebut yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup KKP, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan *refocusing/penajaman* kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur *output* kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, integrasi/kerjasama dengan pihak terkait terkait kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya serta efisiensi harga satuan. KKP terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran serta meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan *stakeholder*.

Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran KKP tahun 2021, beberapa langkah strategis yang telah dan dalam proses pelaksanaan di lingkungan KKP sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1097/MK/05/20202 perihal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2021 antara lain :

1. Melakukan reviu terhadap DIPA 2021 yang sudah disahkan dan hal diperlukan agar segera mengajukan usulan revisi DIPA.
2. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan meliputi :
  - a. Penetapan Petunjuk Operasional kegiatan
  - b. Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara.
3. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa yang mencakup :
  - a. Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jas dan atau kelompok kerja pengadaan
  - b. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja



- setelah kontrak ditandatangani sesuai dengan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan;
- c. Penandatanganan kontrak ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
4. Melakukan percepatan persiapan penyaluran bantuan pemerintah sehingga penyalurannya bisa dilaksanakan mulai Januari 2021 yang mencakup :
- a. Penetapan pedoman umum dan Petunjuk Teknis
  - b. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima/kelompok
  - c. Penetapan surat keputusan penerima

Selain itu KKP juga terus melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran serta *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang mencakup :

1. Proses penyusunan anggaran telah memperhatikan urutan prioritas diantaranya kebutuhan anggaran operasional yang sifatnya mendasar, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 khususnya kegiatan yang termasuk *Major Project*, kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multiyears*) dan penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Alokasi anggaran KKP juga difokuskan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan, salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana arahan Presiden. Tak hanya budidaya, pengelolaan perikanan tangkap, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengwasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengendalian mutu dan perkarantinaan serta pengawasan keuangan dan dukungan manajemen juga akan menjadi fokus utama pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021.

Selain itu perencanaan pembangunan KP tahun 2021 juga ditekankan dalam rangka pemulihan ekonomi *stakeholder* KP yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 yang diperkirakan berpotensi akan mempengaruhi pencapaian pembangunan nasional selama kurun waktu 2020-2024.

1. Alokasi anggaran mengutamakan kegiatan prioritas (*money follow program*

- prioritas). Pengalokasian anggaran tidak lagi berbasis pada pelaksanaan tugas dan fungsi namun berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi presiden.
2. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan;
  3. Melibatkan peran aktif bagian yang menangani *Monitoring*, Evaluasi dan pengelola keuangan seluruh unit eselon I lingkup KKP untuk memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta perkembangan realisasi anggaran belanja;
  4. Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP.
  5. Selain itu, untuk perbaikan dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Inspektorat Jenderal KKP sejak November s.d Desember 2020 telah melakukan pendampingan dini dalam bentuk *reviu* terhadap DIPA/RKAKL Tahun 2021 dan terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2021 melalui pendampingan sejak dini dalam pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang.

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui sebesar besar tingkat efisiensi KL dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi (1) Data capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis, (2) Data Pagu Anggaran, (3) Data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan, dan pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, dimana Efisiensi anggaran KKP sebesar 10,21% dengan rincian efisiensi per Program sebagai berikut :



TABEL 50. EFISIENSI KKP TAHUN 2020 BERDASARKAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Program	Capaian Sasaran Program	Capaian Keluaran Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	Program Dukungan Manajemen	100,00	100,00	400.700.274.000	371.774.244.798	92,78%	10,76
2	Program Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas	100,00	100,00	68.784.539.000	65.520.750.972	95,26%	20
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap	100,00	100,00	575.400.303.000	492.002.352.961	85,51%	20
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	90,12	91,80	1.018.205.687.000	816.747.196.652	80,21%	12,62
5	Program Pengawasan SDKP	100,00	100,00	708.278.921.000	678.507.729.219	95,80%	8,86
6	Program Penguatan Daya Saing KP	100,00	100,00	212.391.107.000	205.414.204.379	96,72%	8,6
7	Program Pengelolaan Ruang Laut	98,70	22,13	411.880.638.000	393.614.623.041	95,57%	-20
8	Program Riset Sumber Daya KP	100,00	100,00	1.384.561.733.000	1.320.523.548.885	95,37%	20
9	Program Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil KP	100,00	100,00	489.438.789.000	465.537.557.721	95,12%	11,02
<b>JUMLAH</b>				<b>5.269.641.991.000</b>	<b>4.809.642.208.628</b>	<b>91,27%</b>	
<b>Efisiensi Anggaran KKP (%)</b>							<b>10,21</b>

Sumber: OMSPAN, Kementerian Keuangan (21 Januari 2021)



## PENUTUP

Laporan Kinerja KKP Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis tahun 2020 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian IKU. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP selama tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan periode pelaporan tahun pertama atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Menteri KP Nomor 57 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, KKP mempunyai 9 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Nilai kinerja atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020 yaitu sebesar 102,14%. Meskipun beberapa indikator masih belum tercapai, namun secara keseluruhan capaian Kinerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja KKP tahun 2020 tercermin dari realisasi capaian 17 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terdapat 10 indikator kinerja yang **telah mencapai target atau bahkan melebihi target** dengan rincian sebagai berikut :
  1. Konsumsi ikan target 56,39 kg/kapita/tahun realisasi 56,39 kg/kapita/tahun atau tercapai 100% (angka sementara).
  2. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman target  $\leq 64\%$ , realisasi 56,91% atau mencapai 111,08 % atau 120% dalam aplikasi kinerjaku.
  3. Luas kawasan konservasi perairan target 23,4 juta ha, realisasi 24,11 juta ha atau tercapai 103,03%
  4. Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan target 5 hasil riset, realisasi 5 hasil riset atau tercapai 100%.
  5. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola target 3 WPP, realisasi 3 WPP atau tercapai 100%.
  6. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir target 14 rencana zonasi, realisasi sebesar 14 atau tercapai 100%.
  7. Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan target 94%, realisasi 94,76% atau tercapai 100,81%.
  8. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*



target 54%, realisasi 67,8% atau telah mencapai 125,56% atau setara dengan 120% pada aplikasi kinerja.

9. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP target 71, realisasi 85,48 atau tercapai 120,39 % atau sebesar 120% pada aplikasi kinerja.
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP target 88, realisasi 93,95 atau tercapai 106,76%.

b. Terdapat 7 indikator kinerja yang **belum mencapai target** dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan target 59,16 dengan realisasi sebesar 58,31 atau tercapai 98,56%
2. Pertumbuhan PDB Perikanan target 7,9 realisasi 0,73% atau tercapai 9,24%
3. Nilai Ekspor Hasil Perikanan target 5,3 USD miliar tercapai 5,2 USD miliar atau tercapai 98,11%
4. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri/DUDI target 60%, realisasi 54,82% atau tercapai 91,37%.
5. Produksi Perikanan target 26,46 juta ton, realisasi 23,16 juta ton atau tercapai 87,53% (angka sangat sementara).
6. Produksi garam target 2 juta ton realisasi 1,37 juta ton atau tercapai 68,5%.
7. Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan target 93%, realisasi 86,78% atau tercapai 93,31%.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh segenap jajaran di lingkungan KKP. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh KKP serta dukungan dari stakeholder terkait.

KKP mengelola anggaran sebesar Rp. 5.269.641.991.000 dengan realisasi sebesar Rp.4.809.642.208.628 atau mencapai 91,27% yang terbagi dalam 9 (sembilan) program pembangunan kelautan dan perikanan, 51 kegiatan dan tersebar di 421 satuan kerja (Pusat, Unit Pelaksana Teknis, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi periode selanjutnya, beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi

ke depan antara lain :

- a. Untuk meningkatkan nilai IKU 1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, opsi rekomendasi kebijakan yang ditawarkan antara lain: 1) menciptakan iklim kondusif agar pelaku utama usaha baik perikanan tangkap, budidaya, pengolah dan pemasar serta masyarakat pengawas mampu untuk menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif; 2) meningkatkan kapasitas penyuluh perikanan dalam teknik fasilitasi, kewirausahaan dan manajemen usaha masyarakat kelautan dan perikanan dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) mendorong peningkatan produksi garam nasional; serta 4) mendorong peningkatan kinerja ekspor dan impor produk perikanan.
- b. Untuk meningkatkan capaian IKU 12. Produksi Perikanan yang berdampak pada pencapaian IKU 2. Pertumbuhan PDB Perikanan diharapkan agar KKP terus meningkatkan bantuan sarana dan prasarana input produksi untuk perikanan budidaya dan tangkap, serta membuka akses permodalan dan pembiayaan bagi usaha nelayan dan pembudidaya ikan.
- c. KKP diharapkan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan untuk masyarakat kelautan dan perikanan serta penyelenggaraan satuan pendidikan KP, koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, pendampingan intensif bagi lulusan pelatihan KP serta penyelenggaraan sistem pendataan alumni satuan pendidikan KP dalam rangka meningkatkan capaian IKU 7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI
- d. Dalam rangka meningkatkan capaian IKU 13. Produksi Garam, kedepan diharapkan KKP dapat memberikan program dan kegiatan peningkatan produksi garam diantaranya melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang produksi garam, pengusulan garam sebagai bahan pokok garam sebagai barang kebutuhan pokok /penting, agar kemudian ditetapkan Harga Pokok Penjualan Garam, serta fasilitasi sarana dan prasarana produksi garam diantaranya geomembran, pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR), saluran dan jalan produksi serta integrasi lahan garam.
- e. Untuk meningkatkan capaian IKU 15. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, KKP akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait antara lain Kejaksaan untuk penanganan barang bukti pasca putusan pengadilan.
- f. Dalam rangka meningkatkan IKU 3. Nilai Ekspor Hasil Perikanan, KKP akan terus mendorong peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis, menjaga hubungan baik dengan negara-negara




tujuan ekspor, berkoordinasi dengan K/L terkait penyelesaian hambatan ekspor dan perluasan pasar ekspor, serta berpartisipasi aktif dalam pameran internasional dan kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional.

- g. Pada tahun 2020, pembangunan kelautan dan perikanan mengalami dinamika dengan adanya Pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Terjadinya pandemi global *Corona Virus Disease* (COVID-19) berdampak besar terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode berikutnya. Perencanaan pembangunan kedepan perlu diarahkan kepada proses pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang terdampak pandemi COVID-19. Beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan pasca pandemi COVID-19 perlu ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan perlu dioptimalkan sebagai salah satu upaya penyesuaian terhadap adaptasi kebiasaan baru dengan adanya pandemi covid.
- h. *Monitoring* dan pengawalan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP agar dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tepat sasaran dan tepat waktu.
- i. Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar setiap unit kerja disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya.
- j. Menjadikan capaian kinerja tahun 2020 sebagai dasar pemutakhiran target kinerja di periode selanjutnya.

Laporan Kinerja KKP tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan akuntabel atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga berdampak positif dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di KKP, Kementerian Lembaga/instansi terkait serta *stakeholder* kelautan dan perikanan.

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2020

  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

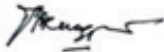
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**  
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Desember 2020  
Menteri Kelautan dan Perikanan

  
**Sakti Wahyu Trenggono**

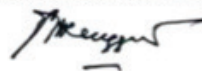


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>		
1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	59,16
<b>COSTUMER PERSPECTIVE</b>		
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)	7,9
	3. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,3
	4. Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)	56,39
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤64
	6. Luas kawasan konservasi perairan (Juta Ha)	23,40
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>		
4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	60
5. Hasil riset dan inovasi termanfaatkan	8. Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5
6. Tatakelola SDKP bertanggung jawab	9. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)	3
	10. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (rencana zonasi)	14
	11. Persentase Kepatuhan ( <i>compliance</i> ) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94
7. Industrialisasi KP berdaya saing	12. Produksi perikanan (Juta ton)	26,46
	13. Produksi garam (Juta ton)	2
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	14. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	54
	15. Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>		
9. Tatakelola pemerintahan yang baik	16. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	71
	17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	88

No.	Program	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Rp. 400.700.274.000
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	Rp. 68.784.539.000
3.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 575.400.303.000
4.	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Rp. 1.018.205.687.000
5.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 708.278.921.000
6.	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Rp. 212.391.107.000
7.	Pengelolaan Ruang laut	Rp. 411.880.638.000
8.	Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.384.561.733.000
9.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 489.438.789.000
Total Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020		Rp. 5.269.641.991.000

Jakarta, 27 Desember 2020  
Menteri Kelautan dan Perikanan



**Sakti Wahyu Trenggono**

## Lampiran 2. Penghargaan

### Anugerah Badan Publik Informatif

KKP meraih penghargaan skala nasional dari Komisi Informasi Pusat (KIP). KKP berhasil mempertahankan kategori Badan Publik Informatif dari KIP. Penghargaan ini menjadi penyemangat sekaligus pengingat agar pelayanan selalu prima untuk mendorong kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. KKP selama ini semaksimal mungkin menerapkan keterbukaan informasi publik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam melayani masyarakat. Melalui unit kerja, KKP juga menciptakan berbagai aplikasi inovasi dan kolaborasi agar semakin prima dalam melayani masyarakat. Diantaranya ada Laut Nusantara, Silat, serta SI CANTIK, yang akhirnya terpilih mewakili KKP pada tahapan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2020. Aplikasi yang menjadi perwakilan ini sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, yaitu memiliki unsur inovasi pelayanan publik serta inovasi di masa pandemi Covid-19. Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sendiri bertujuan untuk melihat badan publik mana saja yang masuk kategori informatif, dan sebaliknya. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk perbaikan dan penyempurnaan di masing-masing badan publik. Penganugerahan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin secara daring, pada 5 November 2020.



### Bhumandala Award 2020

KKP menerima Bhumandala Award 2020 pada tanggal 27 November 2020 di Hotel Borobudur Jakarta. Bhumandala Award merupakan Penghargaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan 5 (lima) elemen simpul Jaringan Informasi Geospasial



Nasional (JIGN) yaitu kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia, standar, dan teknologi. Bhumandala Award telah memasuki tahun keempat sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014.

Meskipun pembangunan simpul jaringan di KKP baru dimulai pada tahun 2016 ketika dijadikan *pilot project* oleh Kantor Staf Presiden, namun upaya untuk memperbaiki tata kelola data di internal KKP telah berhasil dilaksanakan. Konsep, kebijakan serta implementasinya sudah sejalan dengan yang diamanatkan dalam Perpres JIGN dan Perpres Satu Data Indonesia. Kesadaran



pimpinan tentang pentingnya simpul jaringan, diterjemahkan dengan baik untuk mendukung pengelolaan data agar interoperabilitas dapat berjalan lancar. Kebijakan satu aplikasi diseminasi data dalam rangka mendukung SPBE, merupakan salah satu bentuk strategi KKP untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan pengelolaan Informasi Geospasial. Sebagai 'pendatang baru', KKP mampu membuktikan bahwa pembangunan simpul jaringan telah berperan banyak dalam mendokumentasikan dan mengelola kekayaan laut di Indonesia.

### **Herudi Technical Commite Award (HTCA)**



HTCA adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Komite Teknis Perumusan SNI yang memiliki kinerja terbaik. Kriterianya yang digunakan adalah Komite Teknis yang memiliki kinerja sekretariat yang baik dan dapat merumuskan SNI yang sesuai dengan kebutuhan pasar, telah menerapkan

tahapan proses perumusan standar sesuai dengan Program Nasional Perumusan Standarisasi (PNPS), serta mampu menyelesaikan program kerjanya sesuai target



yang telah ditetapkan. iprah Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan non pangan semakin menggema setelah dinobatkan sebagai Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nilai kinerja tertinggi. Tak hanya itu, komite yang dibentuk 2014 tersebut juga mendapat penghargaan HTCA dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Hasil penilaian diumumkan pada Seminar Nasional Standardisasi sekaligus Pembukaan Bulan Mutu Nasional 2020 dan Peresmian Gedung Laboratorium SNSU-BSN tanggal 4 November 2020. Penyerahan plakat penghargaan HTCA dilakukan langsung oleh Kepala BSN kepada Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan dilaksanakan tanggal 6 November 2020 di kantor BSN, Jakarta.

Komite Teknis 65-08 bertugas dalam perumusan SNI produk perikanan nonpangan yang berasal dari hasil kelautan dan perikanan. Tahun 2018 dan 2019, Komite Teknis 65-08 selalu masuk sebagai nominasi 10 besar dalam ajang HTCA. Kemudian tahun ini, Komite Teknis 65-08 berhasil meraih HTCA untuk pertama kali setelah berkompetisi dengan 156 Komite Teknis di Indonesia. Melalui pencapaian ini, Komite Teknis 65-08 berhasil meneruskan jejak kesuksesan Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan yang telah menerima penghargaan HTCA selama 5 kali berturut-turut dari Tahun 2015-2019 sampai memperoleh predikat “Platinum”.

### **MURI “Makan Ikan Serentak di Lokasi Terbanyak di Seluruh Indonesia.”**

Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang biasanya dirayakan secara besar-besaran di setiap daerah di Indonesia tahun ini dirayakan secara berbeda. Dengan adanya wabah Covid, tidak memungkinkan untuk mengumpulkan massa secara langsung dan besar-besaran seperti biasanya. Namun, hal ini tidak mengurangi antusiasme masyarakat perikanan dalam menyambut Harkannas dengan cara yang aman dan tetap taat pada protokol kesehatan.

KKP berinisiatif untuk merayakan Harkannas ke-7 tahun 2020 ini secara daring melalui aplikasi Zoomcloud dan Live streaming Youtube bersama dengan seluruh masyarakat perikanan Indonesia. Keseruan perayaan Harkannas ke-7 ini juga disiarkan secara daring dari 34 provinsi di Indonesia pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020. Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-7 dilaksanakan kembali mencatatkan sejarah. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi se-Indonesia secara virtual itu berhasil mencatatkan rekor MURI Makan Ikan di waktu bersamaan oleh 34 DKP se Indonesia.

## Anugerah ASN Inspiratif 2020



Ajang Anugerah ASN merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan penghargaan tingkat nasional bagi sosok ASN yang telah berkontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat. Anugerah ASN 2020 dapat dijadikan momentum untuk mendorong ASN terus berinovasi dan membuktikan kontribusi

yang nyata bagi kemajuan bangsa. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menganugerahkan Piala Adhigana kepada tiga kandidat terbaik dari masing-masing kategori dalam Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2020. Kategori tersebut yakni PNS Inspiratif, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Teladan, dan *The Future Leader*.

Dalam anugerah tersebut, salah satu ASN KKP yaitu Arif Wibowo yang berasal dari Balai Riset Perikanan, Perairan Umum, dan Penyuluhan Perikanan Palembang berhasil meraih Top 3 PNS Inspiratif. Salah satu peraih penghargaan ASN inspiratif tahun 2020 adalah Dr. Arif Wibowo, M.Si, yang meraih penghargaan sebagai ASN yang memiliki segudang prestasi baik tingkat nasional maupun manca negara. Pada kategori ini Dr. Arif Wibowo, M.Si mampu menciptakan Inovasi Speectra (*special area for conservation and fish refugia*) Speectra diharapkan menjadi suaka perikanan buatan yang menjadi tempat spawning, nursery dan feeding ground, serta menjadi cadangan produksi ikan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan sekitar pada khususnya, serta mencukupi kebutuhan protein masyarakat pada umumnya. Adapun Speectra sendiri ialah pembuatan lubang-lubang di lahan rawa banjiran yang terintegrasikan dengan anak sungai Musi. Tempat tersebut sebagai tempat ikan-ikan endemik berlindung dan berkembang biak, termasuk di saat musim kemarau. Konsep ini pun bisa diaplikasikan di lahan gambut. Terlebih di Indonesia, terdapat sekira 6,5 juta lahan gambut yang rusak dan rentan terbakar. Selain manfaat lingkungan dan ketahanan pangan, Speectra juga bisa digunakan untuk mencegah kebakaran lahan gambut.



## TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik

Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) salah satu program prioritas nasional KKP terpilih sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Pengumuman KemenPAN-RB Nomor: B/190/PP.00.05/2020.

Sebelumnya PUGaR lolos ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional setelah lolos seleksi dari 2.126 proposal inovasi kategori umum yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Keberhasilan PUGaR masuk dalam Top 45 terwujud setelah melalui proses presentasi dan wawancara oleh tim panelis dan bersaing dengan 98 inovasi lainnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

PUGaR merupakan wujud implementasi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengamanatkan untuk memberikan jaminan kepastian berusaha dan keadilan bagi petambak garam rakyat. Strategi untuk melindungi petambak dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, memberikan jaminan kepastian usaha, serta mengendalikan stok yang ada. PUGaR didasarkan pada kondisi petambak garam yang rentan miskin sehingga KKP mengembangkan PUGaR yang tujuannya adalah memberdayakan petambak garam. Inovasi layanan PUGaR yang diajukan dalam inovasi meliputi integrasi lahan garam, pembangunan dan pengelolaan gudang garam nasional (GGN), serta penguatan SDM Kelembagaan. Melalui inovasi ini, produktivitas meningkat dari 40-60 ton/ha/tahun menjadi di atas 100 ton/ha/tahun, keuntungan petambak bisa mencapai 3 kali lipat. Melalui tiga inovasi tersebut, masyarakat petambak garam mulai belajar berusaha bersama-sama untuk berkembang dan semakin maju. Dari sisi komoditas garam, saat ini kandungan NaCl garam petambak bisa di atas 90%. Sedangkan garam-garam yang disimpan lebih terjaga mutunya karena gudangnya bagus.



# LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

# 2020

